



"Besok lusa
bila saya telah meninggal,
janganlah engkau mengangkat
seorang mara'dia (pemimpin, pen),
kendatipun anakku atau cucuku,
kalau bukan orang yang akan menyayangi
negara, kalau tutur katanya tidak senonoh,
kalau tindak lakunya kaku dan kasar,
sebab orang yang seperti itulah yang
akan menghancurkan negara."
(I Manyabungi, Mara'dia Balanipa)

Perjuangan
Hammad Saleh
Menentang Jepang & Belanda
Di Mandar 1942-1947

MUHAMMAD AMIR

Perjuangan
Hammad Saleh
Menentang Jepang dan Belanda
di Mandar 1942-1947

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Barang Siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

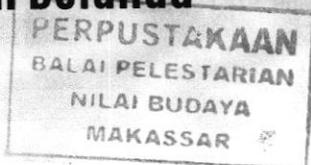
Muhammad Amir

Perjuangan

Hammad Saleh

Menentang Jepang dan Belanda

di Mandar 1942-1947



DITERBITKAN ATAS KERJASAMA
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
DENGAN PENERBIT ARUS TIMUR
2014

ARUS TIMUR
Enak Dibaca Dan Berkah!

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Perjuangan Hammad Saleh Menentang Jepang dan Belanda di Mandar 1942-1947
Makassar: 2014
xvi + 172 = 188 hal.; 14,8 x 21 cm

Hak Cipta © 2014 pada Penulis
Hak penerbitan pada Arus Timur. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan penerbit Arus Timur.

Penulis : Muhammad Amir
Editor : Syafruddin Muhtamar, SH., MH.
Desain Grafis : djanoerkoening adv.

Penerbit:



Redaksi & Pemasaran:
Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No.10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5047064.
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 – 081342183116
Email: arusbook@yahoo.co.id

*Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved*

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan

Cetakan I, 2014
ISBN: 978-602-9057-88-1

PENGANTAR PENERBIT

Sejarah perjuangan seorang tokoh dalam menegakkan kebenaran, memperjuangkan kemerdekaan adalah bagian dari nilai-nilai kearifan universal yang bisa juga menjadi kearifan lokal. Setiap penerbit buku seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kearifan lokal atau sejarah lokal dalam sebuah buku. Mengapa, kearifan lokal adalah falsafah kehidupan masyarakat di suatu wilayah.

Dengan lahirnya buku-buku kearifan lokal, akan melahirkan pula sikap-sikap kearifan di kalangan masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal akan menuntun masyarakat menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Sejarah membuktikan, orang-orang yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang beradab akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai nilai-nilai budaya lingkungannya.

Oleh karena itu, kehadiran buku “Perjuangan Hammad Saleh, Menentang Jepang dan Belanda di Mandar 1942 – 1947” adalah bagian dari mengangkat nilai-nilai kearifan orang Mandar. Semua orang tahu, penjajahan suatu masyarakat atau bangsa oleh bangsa lain sangat bertentangan dengan nilai-nilai kearifan

bangsa Indonesia. Perjuangan melawan penindasan, perbudakan, dan kesewenang-wenangan, adalah bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran, dan nilai-nilai spiritual.

Penerbit Arus Timur (Kelompok Pustaka Refleksi) punya kepedulian yang tinggi terhadap penerbitan buku-buku yang bertekankan kearifan budaya. Semoga dengan kehadiran buku ini, semakin menambah pencerahan nilai-nilai kejuangan para pahlawan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kerja keras, menegakkan kebenaran, keadilan, dan pantang menyerah sebelum cita-cita tercapai. Semoga.

ARUS TIMUR

PENGANTAR EDITOR

Kisah-kisah kepahlawanan, heroisme, patriotisme, perjuangan untuk kemerdekaan, selalu menarik untuk disimak. Bangsa-bangsa yang pernah mengalami pahit getirnya pendudukan penjajahan, tentu memiliki segudang cerita dan kisah-kisah perjuangan perlawanan mengagumkan, sebagaimana bangsa kita. Banyak di antara cerita dan kisah-kisah kepahlawanan itu kemudian digali lewat riset-riset mendalam untuk disajikan kembali dalam format publikasi berstandar ilmiah tertentu.

Misalnya, pasca proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, pemerintah secara resmi menyusun sejarah perjuangan kemerdekaan itu dalam pendekatan saintifik, yang pada gilirannya kemudian menyusul banyak penelitian sejarah mengenai tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang bergaya biografis. Hingga hari ini, bermunculan hasil-hasil penelitian dan penulisan biografi pejuang-pejuang kemerdekaan, dari tokoh paling populer secara nasional, sampai tokoh pejuang yang populer di mata masyarakat lokal. Baik yang diteliti dan ditulis resmi oleh pemerintah, sebagai karya akademik maupun karya umum penulis-penulis sejarah tokoh kepahlawanan tanah air.

Buku ini termasuk dari jenis yang pertama. Wujud usaha pemerintah untuk terus menggali jasa-jasa kepahlawanan warga bangsa yang telah mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga untuk kemerdekaan bangsa, namun belum mendapat ruang publikasi layak sehingga masyarakat tidak mengenal mereka sebagai orang-orang yang memiliki jasa besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa lampau.

Baik dalam era penjajahan maupun zaman revolusi, rakyat tanah air mengalami penderitaan bukan hanya karena pendudukan militer yang menyalpkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian, namun juga proses perjuangan memperoleh kembali keadilan, kesejahteraan dan kemerdekaan yang terampas itu, menimbulkan tidak terkira pengorbanan rakyat. Terutama pribadi-pribadi yang terlibat secara langsung dan aktif karena keterpanggilan jiwa untuk berbuat lebih dalam perjuangan kemerdekaan. Secara sistematis dan terorganisis melakukan gerakan perlawanan terhadap pendudukan kolonial, dengan pegorbanan tenaga, harta dan jiwa sekaligus. Pribadi-pribadi ini kemudian dikenal sebagai tokoh pejuang, pahlawan yang merelakan hidup dan matinya bagi cita-cita menggapai kemerdekaan bangsa.

Demikian pula buku ini, sebuah tutur kisah pribadi pejuang lokal di tanah Mandar. Ketika era kejarn pendudukan Jepang tahun 1942, hingga 'kembalinya' Belanda bermaksud menguasai Indonesia lagi tahun 1947, di kawasan tanah Mandar. Muhammad Saleh Puangna I Sudding (Hammad Saleh), lahir ketika imperialisme Belanda mulai memaksakan ketundukan raja-raja di jazirah Sulawesi Selatan, termasuk kepada sejumlah kerajaan di bumi Mandar. Sebagai keturunan bangsawan kerajaan Alu, Hammad Saleh melewati kehidupan sejak kecil hingga dewasa dalam dua

atmosfir ketegangan yang berseberangan secara diametral: Penjajahan dan Perjuangan Kemerdekaan.

Sepanjang kehidupannya dalam bayang-bayang kolonialisme, matanya menyaksikan langsung penderitaan rakyat Mandar, dan perasaannya menyimpan pengalaman itu sebagai kekayaan batin. Yang kelak memberinya alasan substansial untuk melakukan perlawanan habis-habisan pada kekejaman pendudukan militer Jepang tahun 1942. Perjuangannya berlanjut secara teroganisir beberapa tahun pasca proklamasi kemerdekaan hingga ke tahun 1947, dia tertangkap. Lingkungan kebangsawanan telah membentuk karakternya dalam tradisi pendidikan tradisonal yang terpola. Nilai-nilai budaya Mandar dan adab religi dalam konteks kepemimpinan yang terpuji menjadi muatan utama pendidikan dari keluarganya, dan telah mengisi penuh kepribadiannya. Pengalaman hidup dan hasil pendidikan dalam tradisi lokal terakumulasi, membuatnya sensitif terhadap penderitaan rakyat, dan mendorongnya dalam kerelaan berkorban untuk bangkit melawan dan berjuang.

Perjuangan sang tokoh tidak dideskripsi secara tunggal dalam buku ini, tetapi beberapa setting historis dari perjuangannya, oleh penulis, juga diceritakan secara lengkap, terutama dalam dua bagian, yakni ketika perjuangannya menentang Jepang dan pada bagian akhir, ketika menentang keberadaan Belanda pasca deklarasi kemerdekaan Indonesia. Dan tentu secara keseluruhan, buku ini adalah sebuah kisah sejarah seorang tokoh lokal dalam konstruksi kekejaman kolonialisme dunia, yang terjadi di tanah Mandar.

Syafruddin Muhtamar

Penyunting/Editor

PENGANTAR PENULIS

Buku ini diangkat dari laporan hasil penelitian penulis, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar. Secara spesifik buku ini tidak hanya memuat uraian tentang perjuangan Hammad Saleh dalam menentang pendudukan militer Jepang, tetapi juga tentang perjuangan menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Mandar. Selain itu, juga memuat uraian tentang latar belakang kehidupan dan perlawanan Hammad Saleh dalam menentang penjajahan (Jepang dan Belanda) di Sulawesi Barat.

Buku ini tidak akan pernah terwujud seperti apa adanya sekarang, tanpa dorongan, bantuan, dan kebaikan hati dari semua pihak, baik sebagai instansi maupun sebagai pribadi. Untuk itu, pada tempatnyalah saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Dra. Lindyastuti Setiawati, MM. yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan serta arahan

dan bimbingan, mulai dari tahap awal proses penelitian hingga terwujudnya buku ini.

Ucapan terima kasih yang sama saya haturkan sedalam-dalamnya kepada Dr. Jumadi, S.Pd., M.Si selaku konsultan. Beliau dalam kesibukannya, tetap berupaya meluangkan waktunya untuk memeriksa dan menelaah serta memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis untuk membenahi dan mewujudkan tulisan ini. Oleh karena tanpa bantuan dan kebaikan hati beliau, pastilah buku ini tidak akan pernah terwujud untuk sampai kepada pembaca sebagaimana adanya sekarang.

Pernyataan terima kasih saya tujukan pula kepada penyunting/ editor, Syafruddin Muhtamar, yang dalam kesibukannya masih bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk membaca dan mengedit buku ini. Banyak saran dan kritikan berharga yang saya peroleh dari beliau. Kebaikan hati dan keramahannya di dalam memberikan petunjuk yang amat berharga pada saya, tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kejernihan pikiran dan kesehatan yang baik, sehingga beliau selalu mampu untuk membimbing generasi-generasi terdidik bangsa di masa mendatang.

Terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), dan Pemerintah Kabupaten Majene. Demikian pula kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Perputakaan Nasional, dan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Polewali Mandar, dan Kepala Museum Mandar beserta seluruh stafnya

masing-masing yang telah bermurah hati membantu saya selama melakukan penelitian. Ucapan yang sama juga kepada pimpinan dan seluruh staf penerbit Arus Timur. Sebab, tanpa bantuan mereka semua, saya yakin tidak dapat mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Pada ruang terbatas ini, penulis juga seharusnya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peneliti dan seluruh staf Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, serta kerabat dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tak ternilai. Atas semua kebaikan hati mereka itu, tidak akan pernah saya lupakan dan tentu tidak dapat saya balas hanya dengan ucapan terima kasih. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah swt, atas segala amal kebajikannya.

Akhirnya, buku ini saya persembahkan kepada mereka semua sebagai wujud dari penghargaan dan terima kasih saya. Walaupun demikian, semua kesalahan dan kekurangan buku ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan buku ini.

Makassar, 2014

Penulis

... yang telah dilakukan oleh pemerintah...
... yang telah dilakukan oleh pemerintah...
... yang telah dilakukan oleh pemerintah...

... yang telah dilakukan oleh pemerintah...
... yang telah dilakukan oleh pemerintah...
... yang telah dilakukan oleh pemerintah...

... yang telah dilakukan oleh pemerintah...
... yang telah dilakukan oleh pemerintah...
... yang telah dilakukan oleh pemerintah...

Mg...

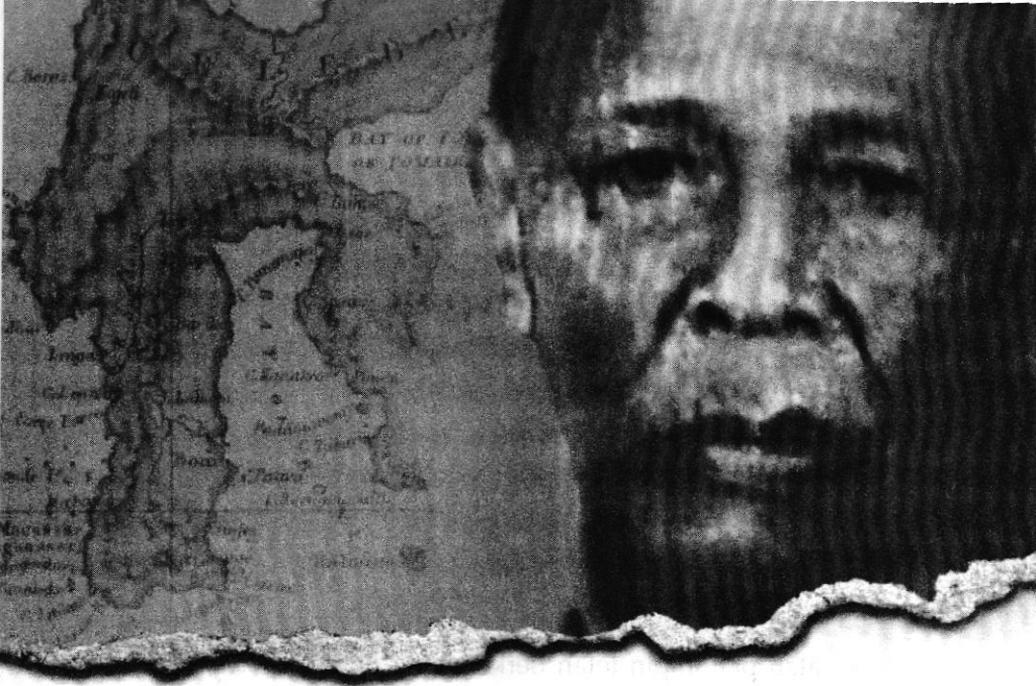
...

ISI BUKU

Pengantar Penerbit — v
Pengantar Editor — vii
Pengantar Penulis — xi
Isi Buku — xv

Pendahuluan — 1
Alu Sebagai Fokus Lokasi Penelitian — 17
Latar Belakang Keluarga Hammad Saleh — 53
Perjuangan Menentang Jepang — 79
Perjuangan Menentang Belanda — 107
Kesimpulan — 141

Daftar Pustaka — 153
Indeks — 163
Tentang Penulis — 171



PENDAHULUAN

Penulisan biografi atau riwayat hidup seorang tokoh pejuang atau pemimpin telah berkembang dengan pesat, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun masih banyak di antara para pemimpin atau tokoh-tokoh pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, terutama yang telah berjuang sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang tidak lagi dikenal oleh masyarakat mengenai jasa-jasanya karena biografi tentang dirinya tidak pernah ditulis atau terungkap di masyarakat. Jelas, konsekuensinya adalah suatu kerugian besar bagi masyarakat. Sebab, peranan mereka sebagai pemimpin bangsa, sebagai pejuang di zaman penjajahan atau di zaman revolusi, sebagai pemimpin politik di masyarakat, atau sebagai pembaharu di zaman kemerdekaan, dan lain-lain, tidak lagi banyak dikenal oleh bangsa kita. Itulah sebabnya Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memperingatkan, bahwa “hanya bangsa yang tahu menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya yang dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar”.¹

¹ Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 110. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan

Salah satu tokoh pejuang dari Mandar (Sulawesi Barat) yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah Hammad Saleh atau yang biasa juga dikenal dengan Muhammad Saleh Puangna I Sudding. Oleh karena tokoh pejuang ini merupakan seorang pemimpin yang mempunyai peranan yang amat penting dalam perlawanan menentang pendudukan Jepang di daerah Mandar. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa pendudukan militer Jepang, hanya sedikit tokoh yang berani tampil ke depan untuk memimpin perlawanan menentang kekuasaan Jepang. Demikian pula daerah Mandar khususnya Alu merupakan salah satu dari dua daerah di jazirah selatan Sulawesi, yakni selain daerah Unra (Bone) yang bergolak menentang kekuasaan Jepang atau melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pasukan Jepang.²

Selain itu, tokoh pejuang ini juga mempunyai peranan penting, bukan hanya dalam perjuangan menentang kehadiran *NICA* (*Nederlandsch Indisch Civil Administratie* atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) di daerah Mandar, tetapi juga mempunyai peranan yang tidak kecil artinya dalam perlawanan terhadap usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan kekuasaan kolonial Belanda di daerah Mandar setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.³ Sebagaimana diketahui

Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menghormati dan menghargai jasa seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang bertujuan menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar ataupun telah berjasa baik di bidang politik, ketatanegaraan, sosial ekonomi, kebudayaan, maupun di bidang ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan bangsa, adalah dengan meneliti dan menulis biografinya.

² Amir, Muhammad. 1990. *Pemberontakan Rakyat Unra Terhadap Jepang Pada 1943*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Baca, Kila, Syhrir. 1993. *Pemberontakan Rakyat Petani Terhadap Pendudukan Militer Jepang di Unra, Bone Tahun 1943*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan. Baca, Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu Pada Masa Pendudukan Militer Jepang di Daerah Mandar Tahun 1945*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan.

³ Arsip NIT, No. 140, *Inlichtingen Rapport* No. 22/SPN. dd. 30 Juli 1947.

bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena pemerintah Belanda bukan hanya tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menolak memberikan pengakuan kepada Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Bukan hanya itu karena pemerintah Belanda bahkan berusaha untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah bekas jajahannya (Hindia Belanda), termasuk di daerah Mandar (Sulawesi Barat). Hal ini tentunya berkaitan dengan sikap Sekutu yang tampil sebagai pemenang dalam Perang Dunia II, yang tidak mengakui sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan pemerintah Republik Indonesia. Semua ini terjadi sebagai akibat dari proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapat dukungan dari Jepang, dan proklamasi kemerdekaan serta penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia, merupakan tokoh-tokoh yang terlibat kerjasama dengan pihak Jepang. Tambahan pula bahwa perumusan pembentukan negara yang dilaksanakan oleh PPKI, merupakan wadah ciptaan pemerintah militer Jepang. Itulah sebabnya pihak Inggris dan Australia yang mewakili Sekutu untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, tampaknya membenarkan kehadiran *NICA* yang bertugas memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.⁴

⁴ Poelinggomang, Edward L. 2002. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Makalah pada "Seminar dan Temu Tokoh" yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, yang berlangsung di Makassar pada tanggal 27 Juni 2002, hlm. 6; Ijzeeref, Willem. 1984. *De Zuid-Celebes Affaire*. Dieren: De Bataafsche Leew, hlm. 17.

Sikap Sekutu itu tentu tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dicapai antara pihak Inggris dengan pihak pemerintah Belanda yang tertuang dalam *Civil Affaire Agreement* pada 24 Agustus 1945, yang pada dasarnya menerima dan menempatkan *NICA* menjadi bagian yang integral dari pasukan Sekutu dalam melaksanakan tugas di Indonesia. Itulah sebabnya ketika tentara Australia atas nama pasukan Sekutu mendarat di jazirah selatan Pulau Sulawesi pada September 1945, ikut pula aparat-aparat *NICA* di bawah pimpinan Mayor J. G. Wegner, yang bertugas untuk memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini. Terlebih lagi karena kehadiran pasukan Sekutu (Tentara Australia) yang semula hanya bertugas untuk membebaskan para tawanan Perang Dunia II, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, serta memulihkan keamanan dan ketertiban, tetapi dalam kenyataannya banyak membantu aparat-aparat *NICA* dalam mewujudkan keinginannya itu. Berkat dukungan dan bantuan dari pasukan Sekutu, aparat-aparat *NICA* berhasil memperkuat kedudukan kekuasaannya di daerah Sulawesi Barat dalam waktu singkat.⁵

Kenyataan itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai pergolakan rakyat yang bertujuan menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini. Reaksi rakyat itu tentu tidak terlepas dari dukungan dan peran penguasa-penguasa tradisional yang bergiat mendorong rakyatnya untuk tampil dengan gigih menentang usaha *NICA* yang mendapat dukungan dan bantuan dari Sekutu. Oleh karena raja-raja di

⁵ Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti, hlm. 112; Agung, Ide Anak Agung Gde. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 4 dan 40; Poelinggomang, Edward L. 2002, *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia ...*, hlm. 6.

daerah ini mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menyatakan wilayah kekuasaan dan aparata-aparat pemerintahannya adalah bagian dari wilayah dan aparat pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan sikap itulah yang memotivasi rakyat di daerah ini berupaya membangun kekuatan untuk menentang kehadiran dan usaha *NICA*. Usaha-usaha itu akhirnya melapangkan pembentukan-pembentukan kelas-kelas pada berbagai wilayah pemerintahan di jazirah selatan Sulawesi, termasuk di daerah Mandar.⁶

Pembentukan organisasi perjuangan atau kelaskaran dan perlawanan yang ditampilkan dalam menentang pemulihan kedudukan kekuasaan kolonial Belanda tetap tidak memudarkan keinginan *NICA*. Itulah sebabnya berbagai usaha yang dilakukan *NICA* untuk mematahkan dan memudarkan perlawanan rakyat, namun kenyataannya usaha perlawanan semakin berapi-api.⁷ Dalam laporan *NICA* dinyatakan bahwa perlawanan yang paling keras dan berapi-api menentang kekuasaannya, terutama di wilayah Afdeling Makassar yang berpusat di Polombangkeng dan wilayah Afdeling Parepare yang berpusat di Suppa.⁸ Oleh

⁶ Hal ini dibuktikan ketika raja-raja di daerah ini melaksanakan serangkaian pertemuan, termasuk yang diselenggarakan di Jongaya pada 15 Oktober 1945. Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan untuk menyampaikan kepada wakil Sekutu di Makassar, tentang sikap raja-raja di daerah ini yakni mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menyatakan wilayah kekuasaan dan aparata-aparat pemerintahannya adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia dan aparat pemerintah Indonesia. Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir. 1993. *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim*. Ujung Pandang: Depdikbud; Harvey, B. Sillars. 1989. *Peberontakan Kahar Muzakkar*, hlm. 115; Poelinggomang, Edward L. 2002. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 7.

⁷ Amir, Muhammad, dkk. 2003. *Kelaskaran Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar. Baca, Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sulawesi Selatan (1945-1950)*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unhas.

⁸ Arsip Negara Indonesia Timur (NIT), No. 109-119 (berbagai dokumen tentang laporan politik); Amir, Muhammad, 2008. *Peranan Andi Abdullah Bau Massepe Dalam Perjuangan Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sulawesi Selatan (1945-1947)*. Makassar: Laporan Penelitian, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar; Kadir, Harun, dkk., 1984, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan...*, hlm. 136.

karena itu, jika perjuangan dan perlawanan rakyat tersebut tidak dapat diakhiri, maka pasti usaha pemulihan kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda mengalami kegagalan. Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah kolonial Belanda mengumumkan *staat van orloog en beleg* (negara dalam keadaan darurat dan perang, disingkat *SOB*) pada 11 Desember 1946. Pernyataan *SOB* yang meliputi wilayah Afdeling Makassar, Parepare, Mandar, dan Bantaeng itu, kemudian disusul pula dengan "perintah harian" (*dag order*) dari Letjen S. Spoor kepada seluruh jajaran militer Belanda untuk melaksanakan aksi militer di wilayah-wilayah tersebut.⁹

Patut dicatat bahwa beberapa hari sebelum pernyataan *SOB* dan perintah harian itu dikeluarkan, telah didatangkan bantuan tentara dari Divisi 7 Desember langsung dari Negeri Belanda yang tiba di Makassar pada 1 Desember 1946, dan *Detaschemen Speciale Troepen (DST)*, yang kemudian disebut *Depot Speciale Troepen* di bawah pimpinan Letnan I Rijmond P. P. Westerling (kemudian dinaikkan pangkatnya dan lebih dikenal dengan Kapten Westerling) yang tiba di Makassar pada 5 Desember 1946. Pasukan militer Belanda inilah yang kemudian mengemban tugas pelaksanaan aksi militer yang tertuang dalam perintah harian Letjen S. Spoor. Aksi militer yang dilakukan itu mengakibatkan terjadinya peristiwa penting di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang kemudian dikenal dengan "korban empat puluh ribu jiwa".¹⁰

⁹ Pernyataan *SOB* itu diundangkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) No. 139; Poelingomang, Edward L. 2002, *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 7; Kadir, Harun, dkk., 1984, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, hlm. 200.

¹⁰ Poelingomang, Edward L. 2002, *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 7; Harvey, Barbara Sillars, 1989, *Pemberontakan Kahar Muzakkar.*, hlm. 119-139; Kadir, Harun, dkk., 1984, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, hlm. 200-205.

Sehubungan dengan gambaran singkat tersebut, maka tampak bahwa penelusuran, pengungkapan, dan penjelasan tentang perjuangan Hammad Saleh dalam menentang penjajahan patut mendapat perhatian. Sebab mempunyai makna yang amat penting bagi pemahaman sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Namun hingga kini, kajian tentang perjuangan Hammad Saleh dalam menentang penjajahan, baik terhadap kekuasaan Jepang maupun terhadap *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda masih sangat terbatas. Padahal perjuangan itu, selain dapat memberikan gambaran mengenai berbagai peristiwa kesejarahan dalam konteks ruang dan waktu, juga dapat merangsang dan menggugah kesadaran untuk memahami serta menghayati makna dan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, kajian ini sangat relevan dan dapat memberikan petunjuk serta pengetahuan yang amat berarti dalam meningkatkan kesadaran dan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, juga dapat memberikan pemahaman dalam membangun karakter dan jatidiri bangsa serta menyumbangkan pemikiran yang baik dalam pemantapan integrasi bangsa agar terluput dari gejala disintegrasi bangsa di dalam membangun kekinian dan hari esok.

Ruang lingkup kajian ini berlokasi di daerah Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Batasan spasial Sulawesi Barat yang dimaksud adalah berdasarkan pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2004.¹¹ Berdasarkan UU No. 26 tersebut, wilayah

¹¹ Sekarang ini Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi di antara 35 provinsi di Indonesia. Namun pemekaran wilayah baik provinsi maupun kabupaten, tampaknya akan terus berlanjut. Bahkan pemerintah sekarang ini sedang mengkaji sejumlah pemekaran tingkat provinsi dan puluhan tingkat kabupaten/kota, dan jika ini sukses Indonesia akan memiliki 51 provinsi dan

ungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah dimaksudkan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para tokoh pejuang atau pemimpin yang berguna sebagai suriteladan bagi generasi penerus demi kesinambungan perjuangan bangsa dan negara dalam mengislah kemerdekaan di Era Reformasi sekarang ini.

Patut dikemukakan bahwa penulisan riwayat hidup dan perjuangan seorang tokoh pemimpin, selain menuturkan secara kronologis kejadian-kejadian penting dalam kehidupan seseorang atau tidak hanya sekedar mengisahkan riwayat hidupnya, pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Tetapi pada hakekatnya, juga menyangkut sejarah kehidupan masyarakat lingkungannya, komponen-komponen lain di masyarakat, kondisi politik pada waktu itu, perannya sebagai pemimpin, sistem sosial yang berlaku pada masa itu, dan lain-lain. Dengan demikian, maka penelusuran kembali perjalanan hidup dan kehidupan seorang tokoh pejuang atau pemimpin, bertujuan untuk mengungkapkan tabir atau nilai-nilai yang selama ini seolah-olah menutupi diri mereka yang sebenarnya, bagaimana mereka hidup, mengembangkan diri, berintegrasi dengan masyarakat zamannya, serta memberikan refleksi dan sumbangan terhadap dinamika kesejarahan.

Berdasarkan persoalan penelitian dan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis dan praktis maupun kelembagaan. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan memperkaya khasanah historiografi Indonesia, khususnya sejarah lokal di Indonesia. Sebab, dalam sejarah nasional hingga kini masih kurang proporsional nuansa lokalnya, khususnya di luar Jawa.

berusaha untuk mengungkapkan dan menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu sesungguhnya. Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan sebab musabab serta faktor kondisional yang ada dan berkembang pada waktu itu atau yang mendasari terjadinya perjuangan atau perlawanan itu.

Mengacu pada pokok dan rumusan persoalan penelitian yang diajukan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan berbagai hal menyangkut dinamika kesejarahan perjuangan rakyat Mandar dalam menentang pejaman. Terutama menyangkut perlawanan Hammad Saleh dalam menentang kekuasaan Jepang dan pemerintah kolonial Belanda, yakni sebagai berikut; (1) untuk mengungkapkan dan menguraikan siapa sesungguhnya Hammad Saleh, (2) untuk mengungkap dan menguraikan dinamika perlawanan Hammad Saleh menentang kekuasaan Jepang, dan (3) untuk mengungkap dan menguraikan dinamika perjuangan Hammad Saleh dalam melawan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi, dimana dan kapan itu terjadi, tetapi juga untuk mengungkapkan dan menguraikan bagaimana dan mengapa terjadi tindak perlawanan terhadap Jepang dan pemerintah kolonial Belanda. Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan sebab-musabab dan faktor-faktor kondisional yang mendasari terjadinya tindak perlawanan yang dipimpin oleh Hammad Saleh.

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menghargai dan menghormati jasa-jasa para tokoh pejuang. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, meng-

Hammad Saleh berlanjut ketika ia mendengar dan mengetahui dengan pasti bahwa kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamasikan. Oleh karena pemerintah Belanda, bukan hanya tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga berusaha untuk memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, termasuk di daerah Mandar. Itulah sebabnya Hammad Saleh kembali tampil ke depan untuk memimpin rakyat Mandar dalam perjuangan membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka kajian ini berusaha untuk mengungkapkan dan menjelaskan berbagai hal tentang perjuangan Hammad Saleh dalam menentang penjajahan, baik dalam perlawanan terhadap kekuasaan Jepang maupun dalam perjuangan menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena dalam pandangan penulis, perjuangan Hammad Saleh mempunyai makna historis yang patut diungkap, direnungkan, dan dipahami. Bertolak dari uraian singkat itu, maka yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini, adalah mengapa Hammad Saleh berani melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Jepang dan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu? Pokok persoalan ini dirumuskan dalam sejumlah pertanyaan, yaitu (1) siapa sesungguhnya Hammad Saleh? (2) bagaimana peranan Hammad Saleh dalam perlawanan menentang kekuasaan Jepang? dan (3) bagaimana peranan Hammad Saleh dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda? Dari rumusan persoalan tersebut, nampaklah dengan jelas bahwa kajian ini tidak hanya berusaha untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan kapan terjadinya perlawanan Hammad Saleh, tetapi juga

Provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami dua kali pemekaran, yaitu ketika dibentuk Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964. Bahkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah "Sulawesi Selatan" (*Zuid Celebes*) meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pulau Sumbawa, yang daerah pemerintahannya dikenal dengan nama "Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Takluknya" (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*).¹²Sehubungan dengan itu dipandang perlu memperjelas batasan spasial dari penelitian ini. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sekarang ini meliputi Kabupaten Majene, Mamuju, Polewali – Mandar (Polman), Mamasa, dan Mamuju Utara.

Sedangkan batasan temporalnya berawal dari masa pendudukan Jepang pada 1942 hingga tertangkapnya Hammad Saleh pada 24 Juli 1947. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penelusuran ke masa sebelumnya, terutama yang merupakan proses historis tidak dapat diabaikan. Karena perjuangan rakyat di Sulawesi Barat dalam menentang pendudukan Jepang dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga terwujudnya negara Republik Indonesia, merupakan rangkaian dan akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Batasan temporal diawali masa pendudukan militer Jepang, karena Hammad Saleh mengawali perjuangannya menentang kekuasaan kolonial ketika aparat-aparat Jepang melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap rakyat Mandar. Perjuangan

513 kabupaten/kota. Tribun, Selasa 7 Desember 2004.

¹² Kadir, Harun, ddk., 1984, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan...*, hlm. 6.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, terutama di dalam membangun karakter dan jatidiri bangsa serta dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah di dalam menentukan arah kebijakan mengenai pembinaan dan pengembangan budaya Bangsa.

Secara kelembagaan, yaitu tersedianya data dan informasi kesejarahan tentang perjuangan Hammad Saleh dalam menentang kekuasaan Jepang dan pemerintah Hindia Belanda pada Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, baik untuk kepentingan masyarakat umum, maupun untuk kajian lebih lanjut. Perlu disadari bahwa realitas dewasa ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Itulah sebabnya para sejarawan sering menampilkan pernyataan, bahwa studi sejarah tidak hanya suatu dialog antara sejarawan dengan masa lalu, tetapi seharusnya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Penggunaan metode dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu keharusan. Di dalam suatu penelitian pada hakekatnya dapat menggunakan berbagai macam cara atau metode.¹³ Penggunaan metode tersebut, tergantung dari jenis, persoalan, dan tujuan penelitian.¹⁴ Sejarah sebagai bahagian dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa lampau, memiliki metode tersendiri yang disebut metode sejarah (*historical*

¹³ Sebenarnya metode mempunyai hubungan erat dengan metodologi, namun dapat dibedakan antara keduanya. Menurut Sartono Kartodirdjo, bahwa metode dan metodologi adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Metode adalah "bagaimana memperoleh pengetahuan" (*how to know*), sedangkan metodologi adalah "mengetahui bagaimana harus mengetahui" (*to know how to know*). Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, metode sejarah adalah "bagaimana mengetahui sejarah", sedangkan metodologi adalah "mengetahui bagaimana mengetahui sejarah" (Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, hlm. ix; Sjamsuddin, Helius, 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta; Ombak, hlm. 14.

¹⁴ Sumadi, Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 15.

method) yang meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah.

Sehubungan dengan uraian itu, maka penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Secara tematik dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal,¹⁵ dengan fokus perhatian pada perjuangan Hammad Saleh di daerah Madar, Sulawesi Barat. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan adalah metode penelitian sejarah.¹⁶ Pada intinya metode penelitian sejarah ini, meliputi *heuristik* (pencarian dan pengumpulan sumber), kritik (analisa sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Prosedur kerjanya dilakukan secara sistematis.¹⁷ Maksudnya, kritik dilakukan setelah data terkumpul, begitu pula interpretasi dilakukan setelah melalui tahap penilaian atau kritik sumber.

Prosedur penelitian mengikuti tahapan-tahapan kegiatan penelitian sejarah dan menyajikan dengan berpedoman pada prinsip penulisan sejarah, yaitu secara kronologis. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, baik berupa dokumen dan sumber-sumber sejarah lainnya yang tersimpan pada lembaga kearsipan, maupun berupa naskah *lontarak*, surat kabar, majalah, hasil penelitian, dan sumber tertulis lainnya pada lembaga perpustakaan dan sejumlah instansi pemerintah

¹⁵ Sejarah lokal dimaksudkan sebagai suatu peristiwa masa lalu dari sekelompok komunitas yang hidup dan berkembang di daerah geografi tertentu. Mengenai batas-batas dan asal mula sejarah lokal serta maknanya bagi penulisan sejarah nasional (Abdullah, Taufik, 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 310-323).

¹⁶ Menurut Gilbert J. Garraghan, bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya, dan mengajukan sintesa secara tertulis (Gilbert J. Garraghan, 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordam University Press, hlm. 33). Louis Gottschalk merumuskan metode penelitian sejarah sebagai suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang disimpulkan dari dokumen menjadi suatu kisah sejarah yang saling berkaitan (Gottschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 18).

¹⁷ Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu, 1978, hlm. 17; Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah*, hlm. 18 dan 34.

yang bergiat dalam pendataan sejarah dan kebudayaan daerah. Misalnya, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Daerah Mandar, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Bahasa, Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, serta Museum Daerah Mandar.

Selain itu, juga dilakukan penelitian pada instansi pemerintah daerah, lembaga swasta, dan koleksi-koleksi pribadi di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Di samping itu, dilakukan pula penelitian terhadap tradisi-tradisi lisan. Sebab, pada umumnya rakyat yang menyimpan tradisi lisan, selalu menuangkan kenyataan historis dan landasan kultur kehidupan politik dan sosial mereka dalam bentuk cerita rakyat misalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sikap memarjinalkan kenyataan historis yang tidak tertuang dalam naskah (dokumen dan manuskrip).

Dokumen dan keterangan yang dikumpulkan tersebut, sebelum diinterpretasi dan digunakan dalam penyusunan naskah, dikritik terlebih dahulu untuk memastikan otentitas dan validitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan keterangan dan ulasan yang bermanfaat dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Langkah selanjutnya, adalah melakukan penafsiran terhadap sumber yang telah dikritik atau lulus seleksi sebagai suatu fakta. Penafsiran ini dilakukan dengan jalan merangkaikan berbagai fakta dan memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta itu secara maksimal dan objektif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arti dan makna fakta itu dalam rangka penyusunan naskah hasil penelitian.

Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah penulisan naskah hasil penelitian (historiografi) dalam bentuk kisah sejarah yang bersifat deskripsi analitis, tanpa mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena itu, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peristiwa itu dan perubahan sosial yang menyertainya harus dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. Berbeda halnya dengan penulisan yang bersifat deskripsi narasi, yang hanya menampilkan gambaran kisah sejarah dalam urutan waktu (kronologis). Perlu disadari bahwa penulisan sejarah yang hanya bersifat deskripsi narasi, kurang memberikan kepuasan bagi pemahaman peristiwa dan perubahan sosial yang menyertainya.

Alu merupakan salah satu kerajaan otonom yang mempunyai kedudukan penting dalam Kerajaan Balanipa. Sebab kerajaan yang bergabung secara sukarela dengan Kerajaan Balanipa pada masa kekuasaan *Mara'dia* Balanipa Tomepayun, bukan hanya menjadi pusat perlawanan terhadap kekuasaan Jepang, tetapi juga menjadi salah satu basis perlawanan terhadap *NICA* di wilayah Mandar. Dewasa ini, bekas kerajaan ini menjadi salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Ibukota kecamatan ini berkedudukan di Petoosang yang juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Alu sekarang.

ALU DALAM KONTEKS BALANIPA

Sebelum dibahas lebih lanjut kedudukan Alu dalam konteks Balanipa, terlebih dahulu diuraikan pembagian wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa. Wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa pada umumnya dapat dibedakan atas daerah inti kerajaan dan wilayah

di luar daerah inti kerajaan. Daerah inti kerajaan terdiri atas *Appe Banua Kaiyang* (empat negeri besar), *Annang Banua Manassa* (enam negeri otonom), dan daerah khusus atau pusat kerajaan. Sementara wilayah di luar daerah inti terdiri atas tiga negeri atau kerajaan otonom (*Tallu Bocco*), dan tiga daerah otonom (*Tallumbanua*), serta delapan daerah taklukan (*Palili Arruwa*). Daerah inti Kerajaan Balanipa tersebut, adalah sebagai berikut:

1. *Appe Banua Kaiyang*

Appe Banua Kaiyang (empat negeri besar) terdiri atas *banua kaiyang* Napo, Samasundu, Mosso, dan Todatodang. *Banua kaiyang* Napo dipimpin oleh seorang *papuangan* (pemimpin kaum *ada'*) yang bergelar *papuangan* Napo yang biasa juga disebut dengan *papuangan* Saleko. Ia juga sebagai ketua dari ikatan atau persekutuan *Appe Banua Kaiyang* yang berkedudukan di Napo, sebelum persekutuan itu membentuk satu kesatuan pemerintahan yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Balanipa. Ia dibantu oleh seorang wakil yang digelar *papuangan* Buyung. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, mereka didampingi oleh dewan pemangku adat (*parri'ba ada'*) yang terdiri atas *tomabubeng* (orang yang dituakan atau penasehat), *poambi* (pemelihara), dan *andongguru* (pemimpin keahlian khusus). Selain itu, juga ada pemangku adat yang secara khusus untuk menangani urusan agama Islam yang disebut dengan *kali* (kadhi) bersama dengan para pembantunya (*imang, katte, dan doya*).¹⁸ *Banua kaiyang*

¹⁸ Rahman. 1988. *Puang dan Daeng*, hlm. 191. Asdy, Ahmad. 2003. *Mandar Dalam Kenangan Tentang Latar Belakang Keberadaan Arajang Balanipa Ke-52*. Makassar: Yayasan Maha Putra Mandar. Sedangkan Saharuddin menyebutkan bahwa pejabat khusus untuk urusan agama Islam di Napo dan Samasundu dinamai *andongguru kaiyang* (Saharuddin. 1977. "Susunan dan Sistem Pemerintahan Balanipa Dahulu Dalam Hubungannya Dengan Kebudayaan Mandar", dalam *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Su;awesi Selatan, hlm. 17.

Napo membawahi tiga *ana' banua* (anak negeri), yaitu: (1) *Ana' banua* Renggeang dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Renggeang. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ia dibantu oleh pemangku adat *ana' banua* yang terdiri atas seorang *tomabubeng* dan *punggawa* atau pemimpin pasukan. (2) *Ana' banua* Balanipa dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Balanipa. Ia dibantu oleh seorang *tomabubeng* dan *punggawa* dalam tugas sehari-hari. (3) *Ana' banua* Lemosusu dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Lemasusu. Dalam tugas sehari-hari, ia dibantu oleh seorang *tomabubeng* dan *punggawa*.¹⁹

Banua kaiyang Samasundu dipimpin oleh seorang *papuangan* (pemimpin kaum *ada'*) yang bergelar *papuangan* Samasundu atau biasa juga disebut dengan *papuangan* Garongkong dan dibantu oleh seorang wakil yang bergelar *papuangan* Pangale. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, mereka didampingi oleh dewan pemangku adat yang terdiri atas seorang *punggawa* (pemimpin pasukan) dan *andongguru kaiyang* atau *penghulu syara'* (imam) serta para pemimpin *ana' banuanya*. *Banua kaiyang* Samasundu membawahi tiga *ana' banua* (anak negeri), yaitu: (1) *Ana' banua* Lembalembang dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Lembalembang. Dalam tugas sehari-hari, ia dibantu oleh seorang *tomabubeng* dan *punggawa*. (2) *Ana' banua* Sallari dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Sallari dan dibantu oleh seorang *tomabubeng* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. (3) *Ana' banua* Jamarang atau

¹⁹ Asdy, Ahmad. 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 152; Rahman. 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 191-192; Saharuddin. 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan Balanipa...*, hlm. 17-18.

Manjopai dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Jamarang. Ia dibantu oleh seorang *tomabubeng* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.²⁰

Banua kaiyang Mosso dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Mosso, dan ia dibantu oleh seorang *tomabubeng* dan *andoangguru joa'* (pemimpin pasukan) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. *Banua inti* Mosso dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Mosso, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang *toma-bubeng*. *Banua kaiyang* Mosso terdiri atas tiga *ana' banua* (negeri kecil), yaitu: (1) *Ana' banua* Pambusuang dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Pambusuang. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, ia dibantu oleh seorang *papuangan* (pemimpin kaum adat) dan *tomabubeng*. (2) *Ana' banua* Lombok dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Lombok, dan dibantu oleh seorang *papuangan* dan *tomabubeng* dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (3) *Ana' banua* Batu dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Batu, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dibantu oleh seorang *tomabubeng*.²¹

Banua kaiyang Todatodang dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Todatodang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh seorang *papuangan*, *tomabubeng*, *andongguru joa'* (pimpinan pasukan), dan *imang* (imam) untuk urusan agama

²⁰ Rahman. 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 192; Saharuddin, 1977, *Susunan dan Sistem Pemerintahan Balanipa...*, hlm.18; Sjam, A.M. Sarbin. 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa dan Fungsi-fungsi Pejabatnya*. Tinambung: belum terbit, hlm. 11; Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 153.

²¹ Saharuddin, 1977, *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm. 18; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 192-193; Asdy. 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 153-154.

Islam. *Banua* intinya dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Todatodang. *Banua kaiyang* Todatodang terdiri atas tiga *ana' banua* (negeri kecil), yaitu: (1) *Ana' banua* Batulaja dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Batulaja, dan dibantu oleh seorang *papuangan* dan *tomabubeng* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. (2) *Ana' banua* Timbo dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Timbo, dan ia dibantu oleh seorang *tomabubeng* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. (3) *Ana' banua* Pandulangan dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Pandulangan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ia dibantu oleh seorang *papuangan* dan *tomabubeng*.²²

2. *Annang Banua Manassa*

Annang Banua Manassa (enam negeri otonom) terdiri atas *banua* Limboro, Biring Lembang, Lambe, Lakka, Luyo, dan Tenggeleng. Keenam *banua* itu berdiri sendiri dalam mengatur dan mengangkat pemangku adat untuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Pemangku adat pada masing-masing *banua* itu bergelar dan terdiri atas: (1) *Banua* Limboro dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Limboro dan biasa juga disebut dan disapa *puang* Limboro.²³ (2) *Banua* Biring Lembang dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Biring Lembang atau biasa juga disebut dengan *papuangan* Tammangalle, dan

²² Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 193-194; Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 154; Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa...*, hlm. 12; Saharuddin, 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm. 18.

²³ *Papuangan* Limboro merupakan ketua dewan *ada' kaiyang* (adat besar) Kerajaan Balanipa dan salah seorang anggota dewan *ada' sappulo sokko* (sepuluh pemangku adat) di pusat pemerintahan kerajaan.

disapa dengan *puang* Lembang atau *puang* Tammangalle.²⁴ (3) *Banua* Lambe dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Lambe. (4) *Banua* Lakka dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Lakka. (5) *Banua* Luyo dipimpin oleh seorang *papuangan* yang bergelar *papuangan* Luyo, dan (6) *Banua* Tenggeleng dipimpin oleh *papuangan* yang bergelar *papuangan* Tenggeleng. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah kekuasaannya masing-masing, para *papuangan* atau pemimpin *banua* itu masing-masing dibantu oleh seorang *tomabubeng* (orang yang dituakan), *so'bo* (pemuka masyarakat di bidang pertanian), dan *imang* (imam). Selain sebagai pemimpin di daerah kekuasaannya masing-masing, mereka juga menjadi anggota pemangku adat yang dikenal dengan dewan pemangku *Ada' Sappulo Sokko* (sepuluh pemangku adat) di pusat pemerintahan kerajaan.²⁵

3. Daerah Khusus atau Pusat Kerajaan

Daerah khusus atau pusat kerajaan merupakan perkampungan-perkampungan yang didiami oleh *maradia* Balanipa (termasuk *maradia matoa* dan *maradia malolo*) dan keturunannya bersama pengikut-pengikutnya. Daerah khusus ini tidak termasuk dalam wilayah *Appe Banua Kaiyang* atau *indo banua* (empat negeri besar atau induk negeri), *Annang Banua Manassa* (enam negeri otonom), dan *Sappulo Duwa Ana' Banua* (dua belas anak negeri atau negeri kecil). Akan tetap daerah khusus ini, berada di bawah kekuasaan

²⁴ *Papuangan* Biring Lembang merupakan wakil ketua dewan *ada' kaiyang* (adat besar) Kerajaan Balanipa dan salah seorang anggota dewan *ada' sappulo sokko* (sepuluh pemangku adat) di pusat pemerintahan kerajaan.

²⁵ Rahman. 1988. *Puang dan Daeng*, hlm. 194-195; Saharuddin. 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm.18; Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa...*, hlm. 12.

langsung *mara'dia* Balanipa. Untuk urusan ke dalam, *mara'dia* Balanipa dibantu oleh pejabat-pejabat tertentu yang terdiri atas *mara'dia*, *papuangan*, dan *tomabubeng*. Menyangkut urusan penyelenggaraan pemerintahan kerajaan, misalnya dalam rapat-rapat kerajaan dipimpin langsung oleh *mara'dia* Balanipa. Namun, jika *mara'dia* Balanipa berhalangan maka dilaksanakan oleh *mara'dia matoa* (wakil *mara'dia*). Selain sebagai wakil *mara'dia*, *mara'dia matoa* juga sebagai penasehat dan mengkoordinir pemangku adat di pusat pemerintahan kerajaan yang berjumlah sepuluh orang dan berdomisili di luar pusat kerajaan yang disebut dengan *Ada' Sappulo Sokko*. Di daerah pusat itu, berkedudukan *mara'dia* Balanipa, *mara'dia matoa*, *mara'dia malolo* (panglima angkatan perang), *andonggurunna ana' mara'dia* (orang yang melaksanakan pendidikan calon *mara'dia*), *sawannar* (sahbandar), dan *kali* (kadhi). Pusat pemerintahan kerajaan yang semula ditempatkan di Napo, kemudian dipindahkan ke Tangga-Tangga, yang terletak di muara Sungai Mandar atau pesisir pantai Teluk Mandar, sejak masa pemerintahan *Mara'dia* Tomepayung. Daerah pusat itu meliputi: (1) Tandung dipimpin oleh *papuangan* dan dibantu *tomabubeng*. (2) Allealle merupakan perkampungan bagi petugas gendang kerajaan (*lette ganrang*). (3) Tandassura dipimpin oleh seorang *mara'dia*. (4) Perkampungan bagi para pengrajin yang disebut dengan *sakka manarang* (lengkap segala kepandaian), yang antara lain terdiri atas tukang kayu, pandai emas, pandai besi, pandai kuningan, pembuat alat batu, pemintal tali, pembuat alat kesenian, pengukir, dan pembuat layar perahu. (5) Parrommo terdiri atas perkampungan Puttappi, Pussui, Sambali, Peburru, Pattermarang,

Salunase, dan Sattako. (6) Pallis dipimpin oleh *mara'dia* Pallis dan dibantu oleh *papuangan* dan *tomabubeng*.²⁶

Sementara wilayah yang dinyatakan berada di luar daerah inti Kerajaan Balanipa adalah sebagai berikut:

1. *Tallu Banua Bocco*

Tallu Banua Bocco (tiga negeri atau kerajaan otonom) terdiri atas Kerajaan Alu, Taramanu, dan Tu'bi.²⁷ Ketiga *banua* (negeri) yang terletak di bagian utara wilayah inti Balanipa, merupakan negeri-negeri yang menjadi bagian atau bergabung setelah terbentuknya Kerajaan Balanipa melalui perjanjian persaudaraan atau ikatan persatuan. Dalam *Lontarak Balanipa Mandar*, antara lain dikisahkan bahwa perjanjian antara Tomepayung (Kerajaan Balanipa) dengan Puatta Saragiang di Alu (Kerajaan Alu) ditandai dengan pengambilan segenggam tanah, lalu dibawa dan ditanam di perbatasan karena hanya itulah yang dianggap kekal sebagai tanda hubungan kekeluargaan dan tidak akan saling melupakan berfamili di antara mereka.²⁸ Bahkan Kerajaan Alu dikisahkan sebagai suatu kerajaan yang lebih tua atau lebih dahulu terbentuk daripada Balanipa. Namun dalam perkembangannya, kerajaan itu kemudian bergabung

²⁶ Syah, 1991, *Lontarak Pattodioloang Mandar...*, hlm. 41; Mandra, 1991, *Lontara Balanipa Mandar...*, hlm. 151; Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan...*, hlm. 12; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 69 dan 190; Saharuddin, 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm. 18-19; Syah, 1997. *Sejarah Mandar Jilid I...*, hlm. 61-63.

²⁷ Dua dari ketiga kerajaan ini, yaitu Kerajaan Alu dan Taramanu telah mengadakan perjanjian persahabatan dengan Kerajaan Sendana. Perjanjian persahabatan ketiga kerajaan ini, kemudian dikenal dengan persekutuan "bocco tallu" (tiga bersahabat), yang diadakan sebelum terbentuknya persekutuan *pitu ba'bana binanga* (tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir pantai). Mandra, A. Muis, 1987. *Beberapa Perjanjian dan Hukum Tradisi Mandar*. Majene: Yayasan Saq Adawang; Asdy, 2003, *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 144.

²⁸ Mandra. 1991. *Lontarak Balanipa Mandar...*, hlm. 97-98; Syah. 1991. *Lontarak Pattodioloang Mandar...*, hlm.43-44.

atau menjadi bagian dari Balanipa, sebagaimana yang disebutkan dalam suatu sumber bahwa "*Kaka tuoi Alu, kaka oroi Balanipa*" (Alu lebih tua dalam kekerabatan, sedangkan Balanipa lebih tua dalam kedudukan atau jabatan).²⁹

Alu, Taramanu, Tu'bi merupakan *banua-banua* yang berdiri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, kecuali dalam hal pertahanan dan keamanan bersama. Ketiga *banua* itu, masing-masing dipimpin oleh seorang *mara'dia* dan dibantu oleh satu atau dua orang pejabat (*baligau* dan *pa'bicara*) serta didampingi oleh dewan pemangku adat yang terdiri atas *tomabubeng*, *so'bo*, *andongguru*, dan *poambi*. Selain itu, juga terdapat seorang *imang* (imam) yang bertugas mengatur berbagai urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Untuk menentukan pejabat yang memegang kepemimpinan dalam *banua-banua* tersebut, tetap dimusyawarahkan dengan dewan pemangku adatnya.³⁰

Banua Alu misalnya, dipimpin oleh *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Alu. Ia dibantu oleh *pa'bicara kaiyang* (wakil *mara'dia*) dan *pa'bicara bari* (juru bicara) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. *Pa'bicara* bertugas sebagai penghubung antara rakyat dan *mara'dia*, baik dalam menyampaikan sesuatu dari rakyat untuk *mara'dia* maupun sebaliknya. Sebagai *banua* yang berdiri sendiri, *banua* Alu mempunyai sejumlah *ana' banua* atau daerah bawahan yang juga memiliki aparat sendiri-sendiri. *Ana' banua* itu

²⁹ Hubungan antara Balanipa dan Alu tersebut tetap dikenang oleh masyarakat hingga sekarang. Asdy. 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 144; Syah, 1983. *I Calo Ammana I Wewang...*, hlm. 59.

³⁰ Rahman. 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 195; Saharuddin. 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm. 19.

antara lain Pussui, Tagolo, Tanase, Puppuring, Paopao, Kalumammang, Malimbung, Sayoang, Sosso, Petoosang, Mombi, dan Tu'bu. Masing-masing *ana' banua* ini dipimpin oleh seorang *mara'dia* atau *papuangan* yang dibantu oleh seorang, *tomabubeng*, dan *so'bo*.³¹

Demikian pula dengan *banua* Taramanu dan *banua* Tu'bi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Taramanu dan *mara'dia* Tu'bi. *Mara'dia* Taramanu dibantu oleh *pa'bicara kaiyang* (wakil *mara'dia*) dan *pa'bicara Taramanu* dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Sementara *mara'dia* Tu'bi dibantu oleh seorang *baligau* (wakil *mara'dia*). Jabatan *pa'bicara* tersebut, sama fungsinya dengan jabatan yang serupa di *banua* Alu. Kedua *banua* itu, masing-masing juga mempunyai sejumlah *ana' banua*. *Ana' banua* Taramanu terdiri atas Tapparang, Tibung, Ratte, Kata, Bolobolo. Masing-masing *ana' banua* itu, dipimpin oleh seorang *papuangan* dan dibantu oleh seorang *tomabubeng* dan *so'bo*. Sedangkan *ana' banua* Tu'bi terdiri atas Puppenga, Bunu, Bahong Batu, dan Manuwa, masing-masing dipimpin oleh seorang *mara'dia*, serta *ana' banua* yang dipimpin oleh seorang *papuangan* terdiri atas Piriang, Alariba, Talolo, dan Talassu. *Ana' banua* Tu'bi, baik yang dipimpin oleh *mara'dia* maupun *papuangan*, masing-masing dibantu oleh seorang *tomabubeng* dan *so'bo*.³²

³¹ Mandra, 1991, *Lontara Balanipa Mandar ...*, hlm. 97-98; Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan...*, hlm. 12; Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm.142-143; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 195-196; Saharuddin, 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm. 19.

³² Asdy, 2002. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 142-143; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 195-196; Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan...*, 13; Saharuddin, 1977, *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm. 19.

2. Tallumbanua

Tallumbanua (tiga *banua* atau negeri sekerabat) terdiri atas *banua* Campalagian atau Tomadio, *banua* Mapilli, dan *banua* Tapango atau Nepo. Ketiga *banua* yang terletak di sebelah Timur wilayah inti Balanipa tersebut, pada awalnya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Passokkorang. Setelah kerajaan itu ditaklukkan oleh Kerajaan Balanipa, *banua-banua* itu kemudian dijadikan sebagai daerah *palili* (taklukan) Balanipa. Dalam perkembangannya, status ketiga *banua* itu ditingkatkan menjadi daerah *bate* (penyanggah) yang “setingkat” dengan *banua* otonom lainnya atas kesetiiaannya kepada Balanipa.³³ Namun, mereka mempunyai tugas membantu dan menyiapkan bantuan pasukan jika mendapat *bila-bila musu'* (undangan untuk membantu dalam suatu peperangan) dan mempertunjukkan “*pattu'du*” (penari *panggandarang*) pada acara-acara kerajaan. Ketiga *banua* itu juga berdiri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, kecuali dalam hal pertahanan dan keamanan bersama yang merupakan kewenangan pemerintahan pusat kerajaan. Masing-masing *banua* itu, dipimpin oleh seorang *mara'dia* dan dibantu oleh sejumlah pemangku adat, yang pada umumnya terdiri atas *papuangan*, *pa'bicara*, *punggawa*, *andongguru*, *so'bo*, dan *imang*.³⁴

³³ Dalam *Lontara Patturiyoloangnga ri tu Gowaya*, alenia 75 (Koleksi Yayasan Ke-budayaan Sulawesi Selatan), antara lain dikisahkan bahwa Bungka, Mapilli, Poda-Poda, dan Campalagian adalah daerah *palili ata ri kale* dari Gowa (1560-1593). Akan tetapi ketika perang penaklukan Bone, penguasa dan rakyat Mandar memberikan suatu pengorbanan yang besar kepada Gowa, sehingga statusnya sebagai daerah *palili ata ri kale* berubah menjadi *palili ata metene* (Mukhlis, 1971. *Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa Jaman Pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669)*. Yogyakarta: Thesis (belum terbit) Universitas Gadjah Mada, hlm. 67 dan 149). Sedangkan menurut Leyds, bahwa berdasarkan perajjian tahun 1674, Campalagian, Mapilli, Takatidung, dan Ujung merupakan daerah *anreapina* Bone dan ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Arung Palakka (Leyds. 1940. *Memori van Overgave...*, hlm. 31-32)

³⁴ Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan...*, hlm. 13-14; Asdy, 2003. *Mandar Dalam*

Pemimpin dan pemangku adat *banua* Campalagian³⁵ misalnya, kepala pemerintahannya bergelar *mara'dia* Tomadio. Ia juga sering disebut dengan *arruang* ('raja') Campalagian dan adakalanya ia disebut dengan *mara'dia* Campalagian. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh pemangku adat yang terdiri atas seorang *papuangan*, *pa'bicara*, *punggawa*, *andongguru*, *so'bo lita* (tanah), *so'bo uwai*, (air), dan *kali* (kadhi). Seperti halnya dengan *banua* Campalagian, *banua* Mapilli juga dipimpin oleh seorang *mara'dia*. Hanya yang membedakannya bahwa pemimpin *banuanya* bergelar *mara'dia* Mapilli atau *arruang* Mapilli. Ia juga dibantu oleh sejumlah pemangku adat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari, yaitu lima orang *papuangan* (Panagur, Lapari, Lambagu, Lapada, dan Tarupa), serta seorang *punggawa*, *so'bo*, dan imang. Demikian pula *banua* Tapango atau Nepo dipimpin oleh seorang *mara'dia* yang bergelar *mara'dia* Tapango yang biasa juga disebut *mara'dia* Nepo. Dalam tugas sehari-hari, ia dibantu oleh pemangku adat yang terdiri atas *pa'bicara* Nepo (Sorai), *pa'bicara aruang*, *papuangan*, *so'bo tana*, *so'bo uwai*, dan *imang*.³⁶

Kenangan..., hlm. 144-145; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 196-197; Saharuddin, 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm. 18-19.

³⁵ Menurut Rahman, bahwa berdasarkan tradisi lisan (*oral history*), *banua* itu mempunyai penduduk yang berasal dari daerah Campalagi – Palakka (Bone). Hal ini dibuktikan dari sub dialek Bugis yang dipakai oleh orang Campalagian hingga dewasa ini Sub dialek itu disebut juga dengan sub dialek Bugis *Tallumpunua* (tiga negeri sekerabat) yang terdiri atas Campalagian, Mapilli, dan Nepo (Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 197 dan 271).

³⁶ Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 145; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 196-197; Saharuddin, 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan...* hlm.19; Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan...*, hlm. 14.

3. *Arruwa Banua Palili*

Arruwa banua palili (delapan banua taklukan) terdiri atas *appe banua di buttu* (empat daerah di pergunungan atau dataran tinggi) dan *appe banua di lappar* (empat daerah di dataran rendah). Pada awalnya daerah-daerah ini, juga merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Passokkorang, dan setelah kerajaan itu ditaklukkan oleh Balanipa, daerah-daerah itu kemudian dijadikan sebagai daerah *palili* Kerajaan Balanipa. Keempat daerah taklukan di pergunungan itu terdiri atas Sabura (dipimpin oleh *arruang* dan dibantu oleh seorang *pa'bicara*), Daala (dipimpin oleh *mara'dia* dan dibantu oleh seorang *papuangan* dan *pa'bicara*), Lenggo (dipimpin oleh *mara'dia* dan dibantu oleh *papuangan* dan *pa'bicara*), dan Batu dipimpin oleh *arruang* dan dibantu oleh *papuangan*). Sementara keempat daerah taklukan di dataran rendah, yaitu meliputi Rea, Bungin, Belua (Paku), dan Tabone. Masing-masing daerah ini dipimpin oleh *tomakaka* dan dibantu oleh seorang *tomabubeng*.³⁷

Selain dari kedelapan daerah *palili* itu, juga masih terdapat sejumlah *banua* kecil yang merupakan daerah *palili*. *Banua-banua* itu, antara lain *limambanua* (lima daerah) dan *suro tama di Ulu Salu* (utusan khusus ke Hulu Sungai). *Limambanua* terdiri atas daerah Poda-Poda, Lulung, dan Bulewang (masing-masing daerah ini dipimpin oleh *mara'dia* dan dibantu oleh seorang *pa'bicara* dan *tomabubeng*), serta Pumbeyagi dan Limboro, yang masing-masing dipimpin oleh *papuangan* dan dibantu oleh seorang *tomabubeng*. Sedangkan *suro tama di Ulu Salu* terdiri atas daerah Padang,

³⁷ Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 197-198; Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 145; Menurut Sarbin Sjam bahwa daerah-daerah *palili* itu di bawah koordinasi *papuangan* Limboro dan *papuangan* Biring Lembang (Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan...*, hlm. 14).

Talepo, dan Sappoang, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *papuangan*, serta Tapua dipimpin oleh seorang *tomakaka*.³⁸

Gambaran itu menunjukkan, bahwa baik daerah inti kerajaan (kecuali daerah khusus atau pusat kerajaan yang berada sepenuhnya dalam urusan *mara'dia*) maupun daerah di luar wilayah inti kerajaan, penguasa setempat tetap menjadi pemimpin dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Namun kegiatannya dibatasi hanya menyangkut urusan ke dalam. Dalam urusan ke luar menjadi kewenangan pemerintahan pusat Kerajaan Balanipa (*mara'dia* Balanipa bersama dewan pemangku *Ada' Sappulo Sokko*). Menyangkut urusan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemimpin *banua kaiyang*, *banua*, dan *ana' banua* yang bergelar *papuangan*, juga menunjukkan bahwa daerah-daerah itu merupakan wilayah kekuasaan keturunan kaum adat atau pemangku adat (*bija parri'ba ada'*) yang disebut dengan golongan *tau pia* (orang pilihan). Sedangkan *banua* dan *ana' banua* yang kepala pemerintahannya bergelar *mara'dia*, merupakan daerah-daerah kekuasaan bangsawan *bija mara'dia* (keturunan *mara'dia*) atau keturunan I Manyambungi (*mara'dia* Balanipa yang pertama), yang disebut dengan golongan *todiang lai yana*.

Pembagian wilayah kekuasaan itu, didasarkan atas kesepkatan bersama antara I Manyambungi (calon *mara'dia*) dengan Puang Dipoyosan (*penghulu parri'ba ada'*) dalam proses pembentukan Kerajaan Balanipa, yang berbunyi bahwa "*O kaiyang tammacinna di kende-kende', o kende-kende' tammacinna di*

³⁸ Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 155; Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan...*, hlm. 14-15; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 198.

kaiyang" (yang besar tidak menginginkan yang kecil, dan yang kecil tidak menginginkan yang besar).³⁹ Maksudnya, keturunan *maradia* tidak akan merampas hak jabatan untuk keturunan pemangku adat, demikian pula sebaliknya keturunan pemangku adat tidak akan merampas hak jabatan untuk keturunan *maradia*. Uraian lebih lanjut tentang *bija maradia* yang disebut dengan golongan bangsawan *todiang lai yana* dan *bija parri'ba ada'* yang disebut dengan golongan bangsawan *tau pia*, akan dijelaskan pada pembahasan berikut menyangkut stratifikasi sosial atau pelapisan sosial.

Kita kembali pada pembahasan tentang Alu, bahwa bekas kerajaan ini dibelah oleh Sungai Mandar yang mengalir dan bermuara ke Selat Makassar melewati Tinambung. Bekas kerajaan ini mempunyai ketinggian sekitar lima ratus meter di atas permukaan laut dengan jarak 61,5 kilometer dari Polewali, ibu kota kabupaten. Secara administrasi pemerintahan bekas Kerajaan Alu memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan daerah Pitu Ulunna Salu dan bekas Kerajaan Taramanu
- Bagian timur berbatasan dengan bekas Kerajaan Taramanu dan wilayah inti Kerajaan Balanipa
- Bagian selatan berbatasan dengan wilayah inti Kerajaan Balanipa
- Bagian barat berbatasan dengan bekas Kerajaan Sendana dan Pamboang

Alu yang terdiri atas sejumlah *ana'banua* atau daerah bawahan, antara lain Pussui, Tagolo, Tanase, Puppuring, Paopao, Kalumammang, Malimbung, Sayoang, Sosso, Petoosang, Mombi,

³⁹ Saharuddin, 1985. *Mengenal Pitu Babana Binanga (Mandar) Dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Mallomo Karya, hlm. 9.

dan Tu'bu. Pada umumnya keadaan tanah di *ana' banua* itu hanya sedikit yang datar dan merupakan tempat pemukiman penduduk setempat serta berfungsi pula sebagai lahan pertanian. Pada bagian timur, utara, dan barat terdapat gunung-gunung, di mana mengalir Sungai Mandar. Penduduk pada umumnya hidup dari hasil pertanian, terutama dari tanaman panjang seperti kelapa, kemiri, dan kopi, serta juga tanaman jangka pendek seperti pisang, papaya, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Dari beberapa hasil komoditas penduduk sebagai mata pencaharian tersebut, maka yang paling utama adalah produksi komoditi kemiri, sehingga hampir di setiap rumah penduduk terdapat tungku-tungku pembakaran kemiri. Selain hidup dari hasil pertanian, sebagian penduduk juga bergelut dalam perdagangan. Di samping mata pencaharian tersebut, masih ada lagi sumber penghasilan yang dimonopoli oleh kaum perempuan dari masyarakat Alu dan pada masyarakat Mandar pada umumnya, yakni keterampilan menenun sarung Mandar. Keterampilan ini dikuasai oleh hampir seluruh penduduk wanita Mandar yang kemudian hasilnya dipasarkan.⁴⁰

KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ALU

Kehidupan sosial budaya masyarakat Alu hingga saat ini nampaknya masih diwarisi oleh nilai-nilai kultural dari masa lalu. Namun hal tersebut tidak lagi berlaku kaku yang disebabkan dengan adanya pengaruh agama Islam. Salah satu dari warisan masa lalu yang masih tampak adalah adanya sistem pelapisan

⁴⁰ Mandra, 1991, *Lontarak Balanipa Mandar...*, hlm. 97-98; Sjam, 1990. *Struktur Pemerintahan Kerajaan...*, hlm. 19; Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm.142-143; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 195-196; Saharuddin, 1977. *Susunan dan Sistem Pemerintahan...*, hlm. 19-20; Junaeda, St. 2001. *Pemberontakan Petani Allu 1945, Studi Tentang Gerakan Sosial*. Makassar: Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, hlm. 59-60.

sosial (stratifikasi sosial) dikalangan masyarakat, yang terdiri atas tiga bagian, yaitu *todiang laiyana* atau keturunan bangsawan, *tau maradeka* atau orang merdeka, dan *batua* atau hamba. Golongan *todiang laiyang* atau keturunan bangsawan ini dibedakan atas keturunan raja (*mara'dia*) dan keturunan kaum adat yang disebut *tau pia*.⁴¹

Sistem pelapisan sosial merupakan salah satu bentuk pranata sosial yang digunakan dalam mengatur kelangsungan hidup dan kehidupan suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan sistem kekerabatan, sehingga dua bentuk pranata sosial ini mempunyai kedudukan penting di dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keduanya tidak hanya dapat memberikan berbagai hal yang menyangkut latar belakang pandangan hidup, watak atau sifat-sifat mendasar dari suatu masyarakat. Akan tetapi lebih daripada itu, sebab dengan mengetahui pelapisan sosial dan sistem kekerabatan dapat diungkapkan hubungan-hubungan kejadian dalam masyarakat yang menyangkut tingkah laku segenap kegiatan dalam masyarakat, termasuk kegiatan dan tingkah laku politiknya.⁴² Oleh karena itu, kedua pranata sosial itu tidak dapat diabaikan di dalam upaya untuk memperoleh gambaran menyangkut kehidupan suatu masyarakat, termasuk masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial. Bagi mereka, mempertahankan pelapisan sosial dipandang sebagai salah satu syarat memperkuat

⁴¹ Junaeda, St. 2001. *Pemberontakan Petani Allu...*, hlm. 60.

⁴² Gonggong, Anhar, 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Yogyakarta: Ombak, Edisi Revisi, hlm. 130; Mattulada, 1985. *Latoa Suaru Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 24.

negeri.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan peranan-pe-
ranan berdasarkan status sosial dipandang sebagai norma yang
patut dipelihara, diikuti, dan dijalankan dalam kehidupan masya-
rakat Bugis, Makassar, dan Mandar. Hal penting yang harus
diperhatikan dalam hubungan dengan pandangan itu adalah
aturan yang mengatur status sosial seseorang di dalam masya-
rakat. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat,
semakin banyak pula hak-hak istimewa yang menyertai atau
dimilikinya. Lapisan yang status sosialnya lebih rendah, tidak
diperkenankan melakukan kekuasaan terhadap mereka yang
status sosialnya lebih tinggi.⁴⁴ Aturan ini tentu erat kaitannya
dengan sistem pelapisan sosial yang ditentukan berdasarkan
hubungan perkawinan di dalam masyarakat Bugis, Makassar, dan
Mandar pada masa lampau.

Menyangkut pelapisan sosial masyarakat Bugis dan Makassar,
sesungguhnya telah diteliti oleh seorang sarjana Belanda, yaitu
H.J. Friedericy. Ia telah berusaha untuk menggambarkan pela-
pisan sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan sebelum daerah
ini dikuasai secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda
pada 1905. Menurut H.J. Friedericy, bahwa pelapisan sosial
masyarakat Sulawesi Selatan, pada hakekatnya hanya mengenal
dua kelompok pelapisan sosial, yaitu bangsawan (*anakarung* atau
ana'karaeng) dan orang merdeka (*tomaradeka* atau *tumaradeka*).
Sedangkan hamba sahaya (*ata*) hanyalah merupakan lapisan
sekunder, yaitu terjadi karena mengikuti pertumbuhan dan

⁴³ Friedericy, H.J., 1933. "De Standen bij de Boeginezen en Makassar", dalam BKI
(*Bijdragen tot de Taal, Landen en Volkenkunde van Nederlandsche-Indie*), No. 90, hlm. 447;
Poelinggomang, 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaana...*, hlm. 67; Dalam *Latoa* antara
lain dinyatakan bahwa apabila pelapisan sosial (*wari*) tidak dipelihara, maka tidak bersepatlah
rakyat (Mattrulada 1985. *Latoa...*, hlm. 107-109, 117, dan 380-382).

⁴⁴ PaEni, Mukhlis, dkk., 2002. *Batara Gowa...*, hlm. 47-48; Poelinggomang, 2004. *Perubahan
Politik...*, hlm. 68.

perkembangan sosial dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, baik terjadi karena kalah perang dan hutang maupun karena putusan pengadilan.⁴⁵

Demikian pula halnya dengan pelapisan sosial masyarakat Mandar, terdiri atas sejumlah kelompok pelapisan sosial. Menurut Mallinckrodt, bahwa pelapisan sosial masyarakat Mandar, pada dasarnya terdiri atas tiga kelompok pelapisan sosial, yaitu bangsawan (*todiang laiyana*),⁴⁶ orang merdeka (*tau maradeka*) dan hamba sahaya (*batuwa*).⁴⁷ Namun, berdasarkan hasil kajian Darmawan Mas'ud Rahman, bahwa pelapisan sosial masyarakat Mandar pada umumnya dan masyarakat Balanipa pada khususnya, terdiri atas empat kelompok pelapisan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. *Todiang laiyana* (bangsawan), yaitu lapisan *bija mara'dia* (keturunan *mara'dia*) yang terdiri atas *puang ressu* (ranuh), *puang sangnging* (murni), *puang tallupparapa'* (tiga perempat), *puang sassigi* (setengah atau separuh), *puang separapa'* (seperempat), *puang sallesor* atau *salleso'* (kurang dari seperempat), dan *puang dipisupai ana sarombong* (nanti digosok baru menghasilkan bau harum).⁴⁸

⁴⁵ Mattulada, 1985. *Latoa...*, hlm. 24-30; Friedericy, 1933. *De Standen...*, hlm. 476; Poelinggomang, 2004. *Perubahan Politik...*, hlm. 65-66; PaEni, Mukhlis, dkk. 2002. *Batara Gowa...*, hlm. 48.

⁴⁶ *Todiang laiyana* secara harfiah berarti orang yang mempunyai *laiya*. *Laiya* adalah sejenis tumbuhan yang umbinya selalu berbau khusus (harum), sehingga lapisan yang dianggap bangsawan mempunyai kekhususan dalam perhitungan kadar darah (Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 122 dan 161).

⁴⁷ Mallinckrodt, J., 1933. Zuid-Celebes Serie P. No. 77, Gegevens over Mandar en Andere Landschappen van Zuid-Celebes, dalam KITLV (*Koninklijk Instituut voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie*) *Adatrechtbundels XXXVI*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 324-329; Friedericy, 1933. *De Standen...*, hlm. 5-11.

⁴⁸ Perbedaan status kebangsawanan itu, didasarkan pada hubungan perkawinan, dalam arti derajat kebangsawanan seseorang ditentukan oleh pertimbangan kadar darah kebangsawanan yang mengalir dalam tubuhnya, melalui ukuran yang dikenal dengan *ana' batu* (*biji batu*). *Puang ressu* dan *puang sangnging* dinilai dengan 16 *ana' batu*, *puang tallupparapa'* dinilai dengan 12 *ana' batu*, *puang sassigi* dinilai dengan 8 *ana' batu*, *puang saparapa'* dinilai dengan 4 *ana' batu*, *puang*

2. *Tau pia* (manusia pilihan), yaitu lapisan *bija parri'ba ada'* (keturunan pemangku adat) yang terdiri atas *tau pia tongan* atau *tau pia manassa* (manusia pilihan asli), *tau pia na'e* (manusia pilihan dari hasil perkawinan antara *bija mara'dia* dan *bija parri'ba ada'*), dan *tau pia biasa* (manusia pilihan biasa).⁴⁹
3. *Tau samar* (manusia biasa), yaitu lapisan orang kebanyakan yang biasa juga disebut dengan *tau maradeka* atau *tomaradeka* (manusia bebas).
4. *Batuwa* (hamba sahaya), yaitu merupakan lapisan terbawah yang terdiri atas *batuwa inranan* (budak karena utang), *batuwa nialli* (budak dibeli), *batuwa sassabuaran* (budak sejak lahir), *batuwa sossoran* (budak turun temurun), dan *batuwa nalaung paleko'* (budak karena membuat kesalahan).⁵⁰

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelapisan sosial masyarakat telah ada sejak terbentuknya kerajaan-kerajaan di

sallesor dinilai dengan 2 *ana' batu*, dan *puang dipisupai anna sarompong* dengan 1 *ana' batu*. Selain itu, perhitungan kadar darah kebangsawanan seseorang, juga dapat didasarkan pada perhitungan persentase (%), yaitu *puang ressu* dan *puang sangging* dikategorikan mempunyai kadar darah 100 %, *puang tallup-parapa'* 75 %, *puang sassigi* 50 %, *puang saparapa'* 25 %, *puang sallesor* di bawah 25 %, dan *puang dipisupai anna sarompong* di bawah 10 %. Sebagai contoh misalnya, hasil perkawinan antara seorang ayah yang berkadar darah bangsawan 16 *ana' batu* (*puang ressu* atau *puang sangging*) dengan seorang ibu yang berkadar darah bangsawan 8 *ana' batu* (*puang sassigi*), dengan rincian $16 + 8 = 24$; $2 = 12$ (*puang tallupparapa'*) atau dengan perhitungan persentasi, yaitu $100 \% + 50 \% = 150 \%$; $2 = 75 \%$ (*puang tallupparapa'*), maka anak atau keturunan dari hasil perkawinan itu, baik melalui perhitungan *ana' batu* maupun dengan per-sentase adalah *puang tallupparapa'* (Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 65-68; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 126-127).

⁴⁹ Lapisan *tau pia* berhak menduduki jabatan pemangku adat (*ada' kaiyang*, *ada' sappulo sokko*, *papuangan*, *pa'bicara,kali*, dan *ada' keccu*) baik di pusat kerajaan maupun di daerah dalam wilayah Kerajaan Balanipa. Meskipun lapisan ini tidak memperhitungkan kadar darah yang dimiliki melalui perhitungan *ana' batu* atau persentase, tetapi perbedaan status *tau pia* itu juga didasarkan pada hubungan perkawinan, misalnya hasil perkawinan antara seorang *tau pia* dengan *tau pia* mejadi *tau pia tongan*, *tau pia* dengan *bija mara'dia* atau *todiang layana* (bangsawan) menjadi *tau pia na'e*, atau *tau pia* dengan lapisan *tau samar* (orang biasa) menjadi *tau pia biasa* (Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 127-128; Asdy, 2003. *Mandar Dalam Kenangan...*, hlm. 68).

⁵⁰ Rahman. 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm.129. Meskipun uraian tentang pelapisan sosial orang Balanipa Mandar, antara kajian Darmawan Mas'ud Rahman dengan tulisan Ahmad Asdy, terdapat sedikit perbedaan, tetapi pada dasarnya dapat dikatakan substansinya tetap sama.

kawasan ini, dan berkembang seiring dengan pertumbuhan kerajaan-kerajaan di wilayah Mandar pada umumnya dan di Kerajaan Alu pada khususnya. Hal itu didasarkan atas keberhasilan *Puatta* di Saragian mempersatukan *banua-banua* dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang sering dilanda konflik atau pertentangan saat itu. Berkat keberhasilan itu dan juga karena dianggap mampu mengatur kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat, sehingga ia kemudian dinobatkan menjadi *mará'dia* Alu yang pertama, untuk mengatur dan memimpin pelaksanaan pemerintahan di kerajaan yang baru dibentuk. Itulah sebabnya *Puatta* di Saragian dianggap sebagai peletak dasar bagi Kerajaan Alu dan merupakan cikal bakal *mará'dia-mará'dia* berikutnya di kerajaan itu. Sebab, semua *mará'dia* Alu beserta keturunannya, merupakan keturunan atau berasal dari *Puatta* di Saragian.⁵¹ Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan golongan bangsawan (*todiang lai yana*) dan menempati lapisan paling atas. Sedangkan lapisan lainnya disebut dengan *tau pia* (manusia pilihan) yang merupakan golongan pemangku adat. Golongan di bawahnya disebut dengan *tau samar* (manusia biasa), merupakan anggota masyarakat pada umumnya yang biasa juga disebut dengan *tomaradeka* (orang merdeka), dan lapisan terbawah disebut dengan *batuwa* atau hamba sahaya.

Golongan bangsawan yang merupakan lapisan teratas, memiliki kedudukan politik, sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Mereka inilah yang dapat menduduki jabatan puncak kepemimpinan atau *mará'dia* di pusat pemerintahan kerajaan. Di Kerajaan Balanipa misalnya, mereka yang berkadar darah *puang ressu*, *puang sangning*, dan *puang tallu parapa'*, yang biasa juga disebut dengan *ana' pattola payung* (calon *mará'dia* atau putra

⁵¹ Mandra, dkk, 1991. *Transliterasi dan Terjemahan Lontar Mandar*. Jakarta: Depdikbud. hlm. 99-100.

mahkota) yang patut dan berhak dipilih untuk menduduki jabatan *mara'dia*, *mara'dia matoa*, dan *mara'dia malolo*. Sementara *puang sassigi* dan *puang separapa'* dapat dipilih untuk menduduki jabatan pemimpin *banua* dan *ana' banua* yang bergelar *mara'dia* pada daerah bawahan Kerajaan Balanipa. Sedangkan golongan *tau pia* yang berada di bawah lapisan *todiang lai yana*, berhak dipilih untuk menduduki jabatan pemangku *ada' sappulo sokko*, *kali* (kadhi), dan pemimpin pada sejumlah *banua* dan *ana' banua* yang bergelar *papuangan* dalam lingkungan wilayah Kerajaan Balanipa. Demikian pula halnya di Kerajaan Alu, golongan bangsawan (*todiang lai yana*) yang menempati lapisan paling atas yang dapat dipilih untuk menduduki jabatan *mara'dia* Alu. Sementara golongan *tau pia* (manusia pilihan) dapat dipilih untuk menduduki jabatan sebagai pemangku adat, misalnya *baligau*, *pabbicara*, *andongguru*, *tomabubeng*, *so'bo*, *poambi*, *imang*, dan pemimpin pada sejumlah *ana' banua* atau daerah bawahan yang bergelar *papuangan* dalam lingkungan wilayah Kerajaan Alu.

Meskipun kadar darah kebangsawanan mempunyai peranan penting dalam kedudukan kepemimpinan di masyarakat, namun bukanlah merupakan satu-satunya persyaratan dalam kepemimpinan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai persyaratan dalam memilih seorang pemimpin adalah sifat-sifat pribadi yang menunjukkan keunggulan, antara lain seperti *malabbi pau* atau *pau-pau* (baik dalam bertutur kata), *malabbi gau* (baik dalam bertindak), dan *malabbi kedo* (baik dalam berbuat). Sifat-sifat pribadi yang terpuji itu, diharapkan dapat menjadi panutan di masyarakat. Persyaratan yang berhubungan dengan sifat-sifat terpuji itu, tampak dalam pesan Mara'dia Balanipa, I Manyambungi yang kemudian menjadi referensi bagi para *mara'dia* di wilayah Mandar, sebagai berikut:

“Besok lusa bila saya telah meninggal, janganlah engkau mengangkat seorang *mara'dia* (pemimpin, pen), kendatipun anakku atau cucuku, kalau bukan orang yang akan menyayangi negara, kalau tutur katanya tidak senonoh, kalau tindak lakunya kaku dan kasar, sebab orang yang seperti itulah yang akan menghancurkan negara (*Madondong duang bongi anna matea', da mupajari maradia, mau ana'u, mau appou, mua' tania, tonama' assayangi lita', mua masuangi pulu-pulunna, mato' doro kedona, apa' iyamo tu'u ditingo, namarruppu-ruppu lita'*).⁵²

Pesan I Manyambungi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan yang didambakan atau kedudukan kepangkatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kadar darah kebangsawanan, tetapi juga oleh sifat-sifat pribadi yang terpuji, seperti setia dan siap berkorban untuk kepentingan rakyat dan negara. Salah satu contoh misalnya, ketika Kerajaan Balanipa diserang oleh pasukan Arung Palakka bersama sekutunya setelah Perjanjian Bungaya, salah seorang *bija mara'dia* yang berkadar darah *puang sassigi* (setengan atau 50 %), yang bernama Magga Daeng Rioso, tampil ke depan memimpin perlawanan. Berkat jasanya dalam membela negara, Magga Daeng Rioso kemudian dinobatkan menjadi *mara'dia* Balanipa meskipun ia bukan *ana' pattola payung*. Namun dalam perkembangannya, karena sifat dan tingkah lakunya dianggap tidak terpuji sehingga ia pun dipecat dari kedudukannya sebagai *mara'dia*. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin juga diharapkan harus memiliki sifat *tomalabbi* (manusia utama), yaitu baik dalam bertutur kata, bertindak, dan berbuat. Tentu saja sifat-sifat lainnya, seperti kejujuran, kepandaian, keberanian, kemanusiaan, dan keadilan merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebab, jika seorang pemimpin

⁵² Saharuddin, 1985. *Mengenal Pitu Babana Binangan...*, hlm. 14; Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 220.

tidak memiliki sifat-sifat yang demikian itu, maka itulah yang akan menghancurkan negara. Itulah sebabnya seorang *ana' pattola payung* (calon *mara'dia*) atau *ana' pattola ada'* (calon pemangku adat) tidak secara otomatis dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja (*mara'dia*) atau pemangku adat (*papuangang*).

Jika seorang *ana' pattola payung* atau *ana' pattola ada'* telah terpilih menjadi calon *mara'dia* atau pemangku adat, maka ia diwajibkan mencari atau memperkaya pengalamannya di masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar ia dapat mengetahui dengan baik apa yang menjadi keinginan rakyatnya, kerisauan hati rakyatnya, dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya, jika tiba saatnya menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Tentu saja ia harus memperlihatkan tingkah laku yang terpuji di masyarakat, termasuk apa yang dipesankan oleh I Manyambungi, jika ia ingin mendapat dukungan atau simpati dari masyarakat. Itulah sebabnya selama masa pencalonan atau sebelum pelantikan yang defenitif, calon *mara'dia* atau pengaku adat tetap terus menerus diamati tingkah lakunya oleh rakyat melalui kejadian-kejadian alam yang ada hubungannya dengan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Kejadian atau peristiwa yang dianggap baik akan membawa calon *mara'dia* atau pemangku adat pada pelantikan defenitif. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka calon *mara'dia* atau pemangku adat itu tidak dapat dilantik dan dewan adat yang berwenang dalam hal ini akan mencari calon lain.⁵³

⁵³ Kejadian-kejadian alam yang dianggap baik tersebut, antara lain seperti makanan melimpah, ikan di laut dan di tambak banyak, tidak ada keributan yang akan menggelisahkan rakyat, dan tidak ada penyakit epidemi. Sedangkan kejadian-kejadian alam yang dianggap kurang baik antara lain seperti *loppa lita'* (tanah akan panas atau musim kemarau yang panjang), *lelei sai* (penyakit merajalela), *tanang-tanang tammenjari* (gagal panen), *nupu penjai olo'-olo'* (ternak akan musnah), dan *bau nasoro'i wai* (ikan akan ditinggalkan air). Hal ini sering dihubungkan

Pelapisan sosial masyarakat Balanipa, juga menunjukkan bahwa seseorang yang dilahirkan dari lapisan *todiang lai yana* dan *tau pia* cenderung untuk menjadi pemimpin. Namun, tidak berarti bahwa lapisan di luar atau selain *todiang lai yana* dan *tau pia*, seperti *tomaradeka* tertutup peluang untuk menempati kedudukan sosial yang lebih tinggi. Sebab, dengan prestasi atau reputasi sosial seseorang, misalnya *amanarangan* atau *apaissanang* (kepandaian atau kepintaran), *abaraniang* (keberanian), *asugirang* (kekayaan) dapat menjadi pemimpin. Seseorang yang memiliki salah satu diantaranya itu dapat menempati kedudukan sebagai pemimpin, yang berarti orang yang akan diikuti perintahnya. Bahkan dari lapisan *batuwa* atau hamba sahaya sekalipun, dapat mencapai tingkatan yang lebih tinggi di bidang-bidang tersebut, dan dapat pula menjadi *tomaradeka*. Dengan demikian, dalam status sosial atau sistem kepemimpinan masyarakat Mandar sebagaimana halnya dengan masyarakat Bugis dan Makassar, ada keluwesan dalam mobilitas sosial secara horisontal yang diakui dalam tradisi.⁵⁴

Dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat Alu, golongan bangsawan itu dikenal dengan sapaan *puang* atau *daeng*. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya ternyata sapaan *puang* juga digunakan terhadap orang-orang yang dituakan atau dihormati seperti pemimpin formal, yaitu Pak Camat, Kepala

dengan sifat atau tingkah laku calon *mara'dia* atau pemangkuh adat dalam arti baik atau tidak, yang konsekuensinya adalah dapat atau tidak dilakukan pelantikan terhadap calon tersebut (Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 223-225). Salah satu contoh kasus misalnya, ketika I Mararabali dicalonkan menjadi *mara'dia* oleh dewan *ada' kaiyang*, untuk menggantikan *Mara'dia* Balanipa ke-44, Passaleppa yang mengundurkan diri pada 1863. Namun karena adanya kejadian dalam negeri (antara lain karena adanya serangan Belanda) sehingga I Mararabali batal dilantik menjadi *mara'dia* Balanipa.

⁵⁴ Mattulada, 1985. *Latoa...*, hlm. 34-35; Rahman. 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 132-133; PaEni, Mukhlis, 1986. "Landasan Kultur Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar", dalam *Dinamika Sosial Bugis Makassar*. Ujung Pandang: PLPIIS, hlm. 23; Gonggong, 2004. *Abdul Kahhar Muzakkar...*, hlm. 137 dan 141-142.

Desa atau pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Mereka yang disapa dengan sebutan *puang* tersebut diyakini sebagai orang memiliki darah turunan bangsawan. Dia merupakan manusia *todipeccoal* manusia pemimpin atau panutan yang memiliki sifat-sifat yang patut diteladani. Sementara laki-laki atau perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak, mereka tidak lagi dipanggil dengan nama aslinya. Mereka biasanya dipanggil dengan menambahkan kata di depannya nama anak sulungnya, misalnya *kamaq* atau *kindo'* Fatimah yang berarti bapak atau ibunya Fatimah. Inilah salah satu aspek budaya masyarakat Alu dan masyarakat Mandar pada umumnya yang kemudian menjelma dalam masyarakat dan sistem hubungan sosial dalam bentuk stratifikasi sosial. Ia tumbuh dan kemudian berkembang hingga saat ini sebagai interaksi simbolik dalam kehidupan mereka, sebagaimana masyarakat lainnya diberbagai golongan etnis.⁵⁵

Kehidupan sosial lainnya di kalangan warga masyarakat Alu yang masih nyata dan sangat menonjol, sebagaimana pada masyarakat lainnya di daerah Mandar adalah semangat kerja secara gotong-royong, sebagai sosialisasi kebersamaan dalam satu warga yang dikenal dengan istilah *sibaliparri* atau *sirondorondoi* yang bermakna saling membantu dengan sepenuh hati tanpa pamrih untuk kemaslahatan bersama. Hal ini bukan hanya berlaku di masyarakat Alu, tetapi juga masyarakat Mandar pada umumnya. Kenyataan ini terlihat pada keikut sertaannya seorang istri bertanggungjawab dalam menanggung beban ekonomi

⁵⁵ Demikian pula halnya dalam pergaulan sangat nampak sikap saling hormat menghormati sekalipun berasal dari lingkungan kerabat sendiri. Walaupun usianya jauh lebih muda jika dibandingkan dengan usia kerabat lainnya, namun dalam percakapan tetap mengiringi ucapan-ucapan mereka dengan sapaan *puang*. Sementara seorang nenek akan tetap mengiringi kata *appo* untuk sapaan cucunya, demikian halnya seorang adik akan tetap memanggil sapaan *puang* terhadap kakaknya (Junaeda, St. 2001. *Pemberontakan Patani Allu...*, hlm.62).

keluarga. Sifat *sibaliparri* ini adalah perwujudan sosial dari rasa tanggungjawab seorang wanita atau istri terhadap kelangsungan hidup keluarganya.⁵⁶

Selain itu, pranata sosial yang mempunyai arti penting dalam per-kembangan kehidupan masyarakat adalah sistem kekerabatan. Seperti halnya dengan orang Bugis Makassar pada umumnya, dan orang Mandar pada khususnya, sistem kekerabatannya bersifat bilateral. Artinya status seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu pada posisi yang sama. Hal itu tercermin dari ungkapan di masyarakat, bahwa *tommuanne anna tobaine para mappabbati* (laki-laki dan wanita masing-masing menurunkan turunan dalam posisi yang sama). Mereka berhak mendapatkan penghargaan yang sama, sehingga status sosial dari keturunannya ditentukan berdasarkan percampuran darah ayah dan ibu. Karena itu jaringan kekerabatan di dalam kehidupan masyarakat orang Mandar juga sangat luas, sebab tidak hanya dari keluarga ayah, tetapi juga dari keluarga ibu. Itulah sebabnya orang Mandar yang hidup dalam satu keluarga atau satu rumah tangga, biasanya juga tidak hanya terdiri atas keluarga inti atau keluarga batih, tetapi juga saudara-saudari, paman dan bibi yang belum berkeluarga, dan nenek dari ayah ataupun ibu. Bahkan sepupu dan keluarga jauh yang hanya mengaku ada hubungan darah setelah dilakukan *matuttung bija-bija* (menelusuri asal usul).⁵⁷

Kekerabatan pada dasarnya merupakan keterkaitan seseorang dengan orang lain di dalam masyarakat. Keterkaitan itu dapat terjadi karena hubungan perkawinan dan hubungan darah

⁵⁶ Junaeda, St. 2001. *Pemberontakan Patani Allu...*, hlm.63; Bodi, Muh. Idham Khalid, 2005. *Sibaliparri: Gender Masyarakat Mandar*. Makassar: PT. Graha Media Celebes.

⁵⁷ Rahman, 1988. *Puang dan Daeng...*, hlm. 79 dan 126; Mattulada, 1985. *Latoa...*, hlm. 38; PaEni, 1986. *Landasan Kultur...*, hlm. 33;

karena keturunan. Jika disimak jaringan kekerabatan melalui hubungan perkawinan di kalangan kaum bangsawan di kawasan ini misalnya, maka tampak bahwa perkawinan itu tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan kemurnian darah kebangsawanan dan kekayaan, tetapi juga untuk memperluas pengaruh dan mempertahankan kekuasaan.⁵⁸ Menurut Chabot, bahwa perkawinan di kalangan bangsawan terdapat dua kecenderungan, yaitu bertujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih erat, dan usaha ke arah hubungan dengan kelompok lain yang dimaksudkan untuk mencapai hubungan yang menguntungkan. Kecenderungan inilah yang mendasari sehingga Chabot menyimpulkan bahwa perkawinan di kalangan bangsawan merupakan perkawinan politik.⁵⁹

Keterkaitan jaringan hubungan kekeluargaan dengan usaha memperluas pengaruh dan mempertahankan kekuasaan, juga tampak dalam kajian Shelly Errington yang menampilkan konsep *massedi siri* (bersatu *siri*).⁶⁰ Ia beranjak dari asumsi bahwa luasnya

⁵⁸ Gonggong, 2004. *Abdul Kahhar Muzakkar...*, hlm. 131-132. Salah satu contoh misalnya, adalah jaringan kekerabatan yang dibangun oleh Raja Bone, Arung Palakka, yang menggunakan sistem perkawinan kerabat di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan yang dipimpinya. Selain dimaksudkan untuk memperluas jaringan kekerabatannya, juga untuk mempertahankan kekuasaan dan menciptakan kesatuan di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Sejak itu perkawinan di antara kerabat kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan menjadi kebiasaan, dan terus berlanjut sampai abad ke-20, bahkan sampai sekarang.

⁵⁹ Chabot, H.Th, 1950. *Verwantschap, Stand en Sexe in Zuid-Celebes*. Groningen-Jakarta: J.B. Walters Uitgeversmaatschappij N.V. hlm. 83-86; Poelinggomang, 2004. *Perubahan Politik...*, hlm. 68-69.

⁶⁰ Errington, Shelly, 1977. "Siri", Darah dan Kekuasaan Politik di Dalam Kerajaan Luwu Zman Dahulu", dalam *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*, No. 1, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 43-60. *Masseddi siri* secara harfiah berarti menyatu *siri*. *Siri* tidak hanya berarti malu, tetapi juga dapat diartikan dengan kehormatan, harga diri atau martabat. Sebab, esensi *siri* adalah rasa malu yang erat kaitannya dengan kehormatan, harga diri atau martabat sebagai seorang manusia. Dalam hal ini *siri* menunjukkan pada suatu gagasan nilai untuk mempertahankan kehormatan, harga diri atau martabat yang berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan pada aturan-aturan dan norma yang berlaku. Dengan demikian *masseddi siri* merupakan suatu kesatuan jaringan ikatan kekeluargaan dalam usaha untuk menyatukan dan mempertahankan kehormatan, harga diri atau martabat dalam kehidupan masyarakat

pengaruh, tingginya kewibawaan, dan kuatnya kedudukan kekuasaan seorang bangsawan berkaitan erat dengan luasnya jaringan ikatan keluarga. Hal inilah yang mendasari ia menjejaki latar belakang hubungan perkawinan di kalangan bangsawan yang menunjukkan adanya poligami dan mengaitkan dengan konsep *siri* dalam kehidupan kekeluargaan yang bersifat bilateral di kawasan ini. Dari kajian Errington itu menunjukkan, bahwa *siri* dapat berperan sebagai alat perekat dalam menghubungkan dan membentuk suatu kesatuan jaringan ikatan keluarga (*masseddi siri*), baik melalui hubungan darah maupun perkawinan. Karena itu, semakin luas jaringan ikatan keluarga, semakin luas pula pengaruh kelompok *masseddi siri* itu. Hal itu tentunya akan mempertinggi kewibawaan pemimpin kelompok *masseddi siri* dan memperkuat kedudukan kekuasaannya.⁶¹

Usaha perluasan pengaruh, mempertinggi kewibawaan, dan memperkuat kedudukan kekuasaan tersebut, yang mendasari pernyataan dalam masyarakat, bahwa bangsawan memiliki tiga ujung senjata yaitu kelincahan ujung lidahnya, ketajaman ujung badiknya, dan ketajaman ujung kemaluannya.⁶² Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa seorang bangsawan tidak hanya harus memiliki kepintaran dalam berbicara atau berdiplomasi untuk menjalin hubungan dan keberanian dalam perang. Akan tetapi juga harus memiliki kepandaian dalam menjalin ikatan kekeluargaan yang menguntungkan dengan pihak yang berpengaruh melalui hubungan perkawinan. Kecenderungan itu

(Poelinggomang, 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan...*, hlm. 69; Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Unhas dengan Bappeda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan, hlm. 36-37).

⁶¹ Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, hlm. 43-48; Poelinggomang, 2004. *Perubahan Politik...*, hlm. 69-70.

⁶² Abidin, A.Z., 1980. "La Ma'dukelleng Menggalang Persatuan Sulawesi Selatan Mengusir VOC", dalam *Prisma*, No. 8, hlm. 38-57.

menunjukkan bahwa hubungan perkawinan di kalangan bangsawan berkaitan erat dengan usaha memperluas pengaruh, mempertinggi kewibawaan, dan memperkuat kedudukan kekuasaan di kawasan ini, sehingga kekuasaan politik tidak dapat dipisahkan dari masalah keluarga.⁶³

Jika gambaran singkat tentang sistem kekerabatan itu dikaitkan dengan perlawanan terhadap Belanda dan Jepang, maka jaringan ikatan kekeluargaan (kekerabatan) yang disebut dengan *mesangngana* atau *passeajingang*, memiliki arti yang amat penting karena dipandang dapat menunjang dukungan dalam perjuangan. Sebagai contoh misalnya hubungan antara Kerajaan Balanipa dengan Kerajaan Gowa.⁶⁴ Dalam *Lontara' Pattodioloang di Mandar* dan *Lontara' Balanipa Mandar*, antara lain dikisahkan bahwa I Manyambungi, *mara'dia* Balanipa yang pertama kawin dengan Karaeng Suria, cucu Raja Gowa. Hasil dari perkawinan itu lahir seorang putra yang bernama Tomepayung dan tiga orang putri yang tidak disebutkan namanya. Tomepayung kemudian diangkat menjadi *mara'dia* Balanipa yang kedua, dan ketiga putri I Manyambungi itu masing-masing dikawinkan dengan putra Raja Tanete, Banggae, dan Alu.⁶⁵ Perluasan jaringan ikatan kekeluargaan yang dilakukan oleh I Manyambungi itu, tidak dapat dinafikan telah memperkuat hubungan kekeluargaan antara Kerajaan Balanipa dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Itulah sebabnya *ana' pattola payung* di Alu dapat diangkat menjadi *mara'dia*

⁶³ Poelinggomang. 2004. *Perubahan Politik...*, hlm. 70; Abidin. 1980. *La Ma'dukkelleng*, hlm. 39.

⁶⁴ Hubungan kekeluargaan antara Kerajaan Gowa dan Balanipa sesungguhnya telah terjalin sejak Raja Gowa ke-7, Batara Gowa. Sebab, Batara Gowa dikisahkan kawin dengan I Rerasi, putri Tomakaka Balanipa (Napo). Dari hasil perkawinan itu lahirlah Daeng Matanre Tumaparrisik Kalonna yang kemudian dinobatkan menjadi raja Gowa ke-9 (Daeng Patunru, 1983, *Sejarah Gowa...*, hlm. 10 dan 153).

⁶⁵ Syah, 1991. *Lontarak Pattodioloang di Mandar...*, hlm. 38; Mandra, 1991. *Lontarak Balanipa Mandar...*, hlm. 108; Leyds, 1940. *Memori van Overgave*, hlm. 24; Saharuddin, 1985. *Mengenal Pitu Babana Binanga...*, hlm. 42.

Balanipa dan kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah Mandar. Sebagaimana yang disebutkan dalam suatu sumber bahwa “*Naiya anak pattola payungna Alu, malai diala menri maadia di Balanipa*” (putra mahkota Kerajaan Alu dapat diangkat sebagai raja pada Kerajaan Baranipa, bahkan seluruh jabatan *maradia* dalam *Pitu Babanna Binanga* (tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir patau).⁶⁶

Perluasan jaringan ikatan kekeluargaan yang dilakukan oleh I Manyambungi itu, juga dilanjutkan oleh *mara'dia* Balanipa berikutnya. Tompepayung misalnya, yang dinobatkan menggantikan I Mayambungi, bergiat menjalin dan mempererat hubungan kekeluargaan dengan kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah Mandar. Hal itu tampak ketika ia memprakarsai pertemuan di Tammajarra (Balanipa) yang menghasilkan persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga* (tujuh kerajaan di muara sungai).⁶⁷ Kedudukan ketujuh kerajaan yang tergabung dalam persekutuan itu, diatur berdasarkan istilah kekerabatan, yaitu Balanipa sebagai *ama* (ayah), Sendana sebagai *indo* (ibu), Banggae sebagai *ana' tommuane* (anak laki-laki), Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang, masing-masing sebagai *ana' tobaine* (anak perempuan).⁶⁸ Sejak itu, perkawinan kerabat di antara pemimpin kerajaan-kerajaan di wilayah Mandar menjadi kebiasaan dan

⁶⁶ Syah, 1983. *Biografi I Calo Ammana I Wewang Topole di Balitung*: Ujung Pandang: Yayasan Taruna Remaja, hlm. 59.

⁶⁷ Dalam *Lontara' Pattappingan Mandar*, antara lain disebutkan bahwa salah satu sebab diselenggarakannya pertemuan di Tammajarra karena mereka semua sesungguhnya bersaudara, yaitu berasal dari Tokombong di Bura. Pertemuan itu melahirkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dikenal dengan *Assitalliang Tammajarra*, dan perjanjian inilah yang mendasari terbentuknya persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga*, yaitu Kerajaan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamaju, dan Binuang (*Lontara' Pattappingan Mandar*, Koleksi Museum Mandar, hlm. 8-9; Amier, Sjarifuddin. 1989. *Perjanjian Antarkerajaan...*, hlm. 283-284).

⁶⁸ Rahman, Darmawan Mas'ud, 1987. “Sistem Kekerabatan dan Politik di Balanipa, Suatu Cermin Hubungan Balanipa dan Gowa (Makassar) di Abad XVI – XIX Masehi”. Makalah pada Seminar Mahasiswa Sejarah se-Sulawesi, yang diselenggarakan di Ujung Pandang, pada tanggal 28-30 Desember 1987, hlm. 9.

terus berlanjut hingga paruh kedua abad ke-20. Itulah sebabnya *ana' pattola payung* di Kerajaan Balanipa, dapat pula diangkat menjadi *mara'dia* di kerajaan lain dalam persekutuan itu.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Penduduk yang mendiami wilayah Alu dewasa ini dapat dikatakan bahwa seratus persen menganut agama Islam. Namun perlu dikemukakan bahwa jauh sebelum masuknya Islam di daerah Alu dan wilayah Mandar pada umumnya, masyarakat telah mengenal suatu sistem religi (kepercayaan) yang mengakui adanya suatu kekuatan yang maha kuasa di luar manusia yang mengatur hidup, mendatangkan kemakmuran, dan bala bencana. Untuk menghindari datangnya bencana itulah, maka perlu melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara melakukan persembahan atau sesajian-sesajian. Dalam perkembangan selanjutnya ketika agama Islam telah diterima, kekuasaan maha pencipta yang dikenal dengan *dewata seuwae* itu diidentikkan dengan *Puang Allah Taala* (Tuhan Yang Maha Esa). Oleh karena itu, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Namun dalam beberapa hal masih tetap dilakukan, misalnya tentang hari baik dan hari buruk dalam memulai atau melakukan suatu kegiatan, seperti turun ke laut, mengadakan pesta perkawinan, bepergian, naik rumah baru, dan pembuatan perahu. Demikian pula dengan kepercayaan tentang kekebalan terhadap senjata tajam masih tetap diyakini oleh sebagian anggota masyarakat. Bahkan terjadi semacam akulturasi karena ilmu kekebalan itu terkadang menggunakan mantera-mantera yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Qur'an atau diperoleh dengan jalan berpuasa pada tempat-tempat yang sepi

serta harus menghindari beberapa pantangan-pantangan.⁶⁹

Selain penghormatan dan pemujaan terhadap adanya kekuatan super natural di luar diri manusia, masyarakat Alu pun nampaknya masih mempercayai adanya makhluk-mahluk halus dan roh-roh jahat yang menghuni tempat-tempat tertentu. Roh-roh ini mereka namakan setan seperti; *setan pakkammi'na batu miana* (setan yang menghuni sebuah batu besar), *setangna butta ciping*, *setan tapparang*, yaitu setan yang sering mengganggu nelayan atau pelaut. Roh-roh tersebut bisa saja dijinakkan atau malah membawa kemakmuran jika diberikan sesajen-sesajen secara benar. Untuk menghindari gangguan tersebut, maka dibuatlah penangkalnya yang mereka sebut *jima-jima* yang hingga saat ini masih sangat dipercaya oleh masyarakat setempat. Bahkan, masyarakat Mandar secara umum juga dikenal dengan ilmu sihirnya yang disebut dengan *doti* yang digunakan dengan maksud untuk mencelakakan seseorang yang dianggap sebagai pihak musuh.⁷⁰

Di samping kepercayaan-kepercayaan tersebut, masyarakat Alu juga memiliki sistem kepercayaan yang merupakan sistem pengetahuan mereka terhadap gejala-gejala atau tingkah laku dari binatang-binatang antara lain:

- *Karra* (burung malam), menurut anggapan sebagian masyarakat Alu jika burung ini terbang dekat rumah dan berbunyi satu kali, maka seisi rumah akan menerima berita kematian dan jika berbunyi tiga kali, maka akan mendapat berita sakit dari seseorang.

⁶⁹ Bodi, Muh. Idham Khalid, 2005. *Siballiparri...*, hlm. 64-65; Junaeda, St. 2001. *Pemberontakan Petani Allu...*, hlm. 63-64.

⁷⁰ Junaeda, St. 2001. *Pemberontakan Petani Allu...*, hlm. 64-65.

- *Kalumpang* (kupu-kupu), bahwa sebagian masyarakat mempercayai jika kupu-kupu terbang masuk ke rumah atau sampai dalam kamar, maka tuan rumah akan kedatangan tamu.
- *Alipang* (lipan), menurut anggapan sebagian masyarakat bahwa jika binatang ini berada di atas rumah pada malam Jum'at, maka itu pertanda tuan akan ditimpa malapetaka atau ada orang lain berniat yang kepadanya.

Demikian halnya dengan sistem pengetahuan mereka terhadap gejala-gejala alam, yang mereka warisi dari leluhurnya sudah merupakan suatu sistem kepercayaan yang hingga saat ini masih tetap diyakini. Misalnya jika hujan tak kunjung datang di musim penghujan, maka itu menandakan bahwa ada warga masyarakat atau kampung yang hamil di luar nikah. Begitu pula jika udara amat dingin pada malam Jumat, maka itu berarti bahwa ada warga kampung yang akan bersalin. Semua hal tersebut di atas merupakan sistem kepercayaan masyarakat Alu dan masyarakat Mandar secara umum.⁷¹

⁷¹ Junaeda, St. 2001. *Pemberontakan Petani Allu...*, hlm. 66.



LATAR BELAKANG KELUARGA HAMMAD SALEH

Hammad Saleh dilahirkan di Kampung Mombi, Alu – Balanipa pada 1915.⁷² Waktu yang tepat mengenai tanggal kelahirannya agak sulit untuk diketahui, karena cacatan yang ada hanya menyebutkan tahun kelahirannya. Putra yang dilahirkan di daerah Alu (suatu wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa) ini merupakan cucu dari Maradia Alu. Ibunya bernama Balisa, seorang putri bangsawan *todiang laiyana* dari Kerajaan Balanipa. Sementara ayahnya bernama Palindungi, putra Mara'dia Alu. Oleh karena itu, kedua orang tua Hammad Saleh merupakan bangsawan *todiang laiyana* yang berstatus atau berkedudukan sebagai *ana' pattola payung*. Bahkan ayahnya yang

⁷² Arsip Negara Indonesia Timur (NIT), No. 140. *Inlichtingen Rapport* Hammad Saleh pada 30 Juli 1947. Sesungguhnya nama tokoh pejuang ini masih terdapat perbedaan dari sejumlah penulis, misalnya Darmawan Mas'ud Rahman menulis "Hamma Saleh Puanna I Sudding" (Rahman, 1988. *Puang dan Daeng: Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar*. Ujung Pandang: Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin, hlm. 304); Darwas Rasyid, menulis nama tokoh pejuang ini dengan "Muhammad Saleh Puanna I Sudding" (Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Pada Masa Pendudukan Militer Jepang di Daerah Mandar*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, hlm. 52); dan St. Junaeda menulis nama tokoh pejuang ini dengan "Muhammad Saleh Puangna I Sudding" (St. Junaeda, 2001. *Pemberontakan Petani Allu 1945, Studi Tentang Gerakan Sosial*. Makassar: Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, hlm. 94).

berkedudukan sebagai *ana' pattola payung* Alu, bukan hanya merupakan pewaris atas tahta Kerajaan Alu, tetapi juga dapat diangkat menjadi *maradia* di Kerajaan Balanipa dan kerajaan-kerajaan lainnya di daerah Mandar. Oleh karena dalam tradisi suksesi kepemimpinan di Kerajaan Balanipa, bahwa *ana' pattola payung* Alu bukan hanya berhak diangkat menjadi *maradia* di Kerajaan Alu, tetapi juga di Kerajaan Balanipa dan kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah Mandar, terutama di kerajaan yang tergabung dalam persekutuan *Pitu Babana Binanga* (tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir pantai), yaitu Kerajaan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang.⁷³

Anak manusia yang dilahirkan pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tersebut, adalah merupakan putra pertama dari dua bersaudara bagi pasangan suami istri Palindungi dengan Balisa. Oleh karena anak laki-laki tersebut, adalah merupakan karunia dari Tuhan, maka kedua orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya serta lingkungan masyarakatnya, senantiasa mendoakan dan menumpukkan harapan kepadanya, agar kelak menjadi seorang manusia yang dapat berbakti kepada orang tua, terpuji tingkah lakunya, dan menjadi pemimpin yang disegani serta dihormati oleh masyarakat.⁷⁴

Berkat doa dari kedua orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya atau keluarganya serta harapan dari lingkungan

⁷³ Dalam suatu sumber disebutkan bahwa "*Naiya anak pattola payungna Alu, malai diala menri maadia di Balanipa*" (putra mahkota Kerajaan Alu dapat diangkat sebagai raja pada Kerajaan Baranipa, bahkan seluruh jabatan *maradia* dalam *Pitu Babanna Binanga* (tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir pantai). Syah, 1983. *Biografi I Calo Ammana I Wewang Topole di Balitung Pahlawan Daerah Mandar Sulawesi Selatan.*: Ujung Pandang: Yayasan Taruna Remaja, hlm. 59; Mandra, A.M., dkk., 1986. *Transliterasi dan Terjemahan Lontara Mandar*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 159.

⁷⁴ Putra lainnya dari kedua pasangan suami istri Palindungi dengan Balisa adalah bernama Pano. Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Pada Masa Pendudukan Militer Jepang di Daerah Mandar*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, hlm. 52.

masyarakatnya, kurang lebih dua puluh tahun kemudian, doa dan harapan yang mulai tersebut, mulai terwujud dalam suatu kenyataan sejarah. Sebab putra Palindungi ini diangkat menjadi *maradia malolo* Kerajaan Alu pada tahun 1935.⁷⁵ Perjalanan hidup dan kehidupan putra Palindungi hingga sampai ke puncak kariernya, bukanlah merupakan suatu kisah perjalanan yang mulus, licin, dan tanpa gelombang, tetapi melalui berbagai tantangan dan rintangan yang tidak terkirakan beratnya. Jika bukan karena bantuan dan pertolongan dari Tuhan, yang disertai dengan sikap mentalnya yang kokoh bagaikan batu karang dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, maka tentulah putra dari pasangan suami istri Palindungi dengan Balisa, tidak akan sampai ke puncak kariernya sebagai pemimpin yang dicintai, disegani, dan dihormati oleh masyarakat.

Setelah melalui upacara adat sebagaimana lazimnya dalam kehidupan masyarakat Mandar yang masih memegang teguh pada tradisi budaya yang terpelihara dengan baik, maka putra dari pasangan suami istri Palindungi dengan Balisa tersebut, diberi nama Hammad Saleh. Dalam perkembangan selanjutnya namanya berubah atau bertambah menjadi Hammad Saleh Puangna I Sudding. Penambahan nama "Puangna I Sudding" adalah merupakan nama dari anak atau kemanakannya yang bernama I Sudding, sebab terasa tidak sopan atau tidak hormat jika masih menyebut nama pribadi seseorang bangsawan yang telah berkeluarga. Penyematan gelar seperti itu, sudah menjadi tradisi bagi keturunan bangsawan Mandar. Namun dalam pembahasan ini hanya dipakai nama Hammad Saleh saja. Adapun saudara kandung Hammad Saleh atau putra yang lain dari kedua pasangan suami isteri Palindungi dengan Balisa adalah

⁷⁵ Arsip NIT, No. 140, *Inlictingen Rapport* Hammad Saleh pada 30 Juli 1947.

bernama Pano Puangna I Turi. Saudara kandung Hammad Saleh ini senantiasa pula terlibat dalam perjuangan, baik dalam perjuangan menentang pendudukan militer Jepang maupun dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah Mandar.⁷⁶

Latar belakang keluarga Hammad Saleh yang menarik disimak karena merupakan keturunan *maradia* Alu. Sebab, sejumlah keturunan dari *maradia* Alu yang telah tercatat dalam sejarah sebagai penentang yang gigih terhadap Belanda. Salah satu di antaranya adalah I Calo Ammana I Wewang. Ia kemudian menggantikan ayahnya (I Gaang) menjadi Mara'dia Alu, dan sekaligus merangkap sebagai *mara'dia malolo* (panglima perang) Kerajaan Balanipa. I Calo Ammana I Wewang merupakan salah seorang pimpinan pasukan Mandar dalam perlawanan terhadap pendudukan militer Belanda pada 1905-1907. Selain itu, putra *mara'dia* Alu lainnya yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa menentang kekuasaan kolonial Belanda adalah Kaco' Puang Ammana I Pattolawali. Ia merupakan *mara'dia malolo* (panglima perang) Kerajaan Alu yang juga merangkap sebagai *mara'dia malolo* Kerajaan Banggae dan Pamboang. Kedua tokoh pejuang yang memegang peranan penting ini, tidak dapat diabaikan di dalam memahami dinamika sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam perlawanan menentang kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Mandar pada awal abad ke-20.⁷⁷

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang peran kedua tokoh pejuang tersebut, terlebih dahulu patut dikemukakan bahwa

⁷⁶ Rasyid, Darwas, 1996, *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu.*; Sinrang, A. Saiful, 1994. *Mengenal Mandar Sekilas Lintas*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio, hlm. 303; Syah, 1983, *I Calo Amana I Wewang.*, hlm. 58.

⁷⁷ Sinrang, A. Saiful, 1994, *Mengenal Mandar...*, hlm. 181.

pemerintah kolonial Belanda bergiat memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat kedudukannya dengan menguasai secara langsung seluruh jazirah selatan Sulawesi pada awal abad ke-20. Oleh karena itu, Belanda melancarkan kebijakan “politik fasifikasi” yang secara harfiah berarti politik perdamaian. Namun di balik kebijakan itu, bahwa Belanda hendak menguasai secara langsung seluruh wilayah yang secara *de jure* dipandang berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tetapi secara *de facto* sejumlah wilayah masih dinyatakan sebagai kerajaan merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya pelaksanaan politik pasifikasi itu disertai dengan tindakan pengiriman pasukan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat, apabila mereka menolak menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah kolonial Belanda. Penyerahan kekuasaan itu ditandai dengan penandatanganan “pernyataan pendek” (*korte verklaring*), yaitu suatu pernyataan tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda.⁷⁸

Setelah Bone berhasil ditaklukkan dan diduduki, aksi militer selanjutnya diarahkan kepada kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Kerajaan Gowa, Luwu, Sidenreng, Wajo, Barru, Suppa, Sawitto, dan lainnya. Menurut Gubernur Kroesen bahwa “sukses gemilang tindakan militer di Bone, hanya menyelesaikan separuh pekerjaan”.⁷⁹ Itulah sebabnya setelah tindakan penaklukan terhadap Kerajaan Bone, dilakukan pula tindakan penaklukan terhadap

⁷⁸ Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak, hlm. 42. Sesungguhnya *korte verklaring* ini terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 1 memuat pernyataan menyerahkan wilayah kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda dan menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah Belanda dan perwakilannya di Hindia Belanda, Pasal 2 memuat janji untuk tidak melakukan hubungan dengan kerajaan asing, musuh pemerintah juga menjadi musuhnya dan sahabat pemerintah menjadi sahabatnya, dan Pasal 3 mengakui dan menjalankan semua perintah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

⁷⁹ Harvey, 1989, *Pemberontakan Kahar Muzakkar.*, hlm. 49.

kerajaan-kerajaan lainnya di jazirah selatan Sulawesi. Selain itu, juga karena pada umumnya penguasa lokal bersikap menolak tuntutan Belanda sehingga tindakan militer terus dilancarkan. Meskipun demikian tindakan militer yang dilancarkan pemerintah akhirnya berhasil memaksa kerajaan-kerajaan itu untuk tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sementara kerajaan-kerajaan kecil tidak melakukan perlawanan yang berarti. Bahkan sebagian langsung bersedia menerima dan menandatangani pernyataan tunduk yang disodorkan oleh Belanda. Hal itu tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan besar dan kuat saja tidak mampu menghadapi agresi militer Belanda.

Kenyataan itu pula yang menyebabkan para penguasa kerajaan di daerah Mandar (sekarang, Sulawesi Barat) tidak dapat menolak perjanjian yang disodorkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan Balanipa misalnya terpaksa harus menandatangani "tambahan perjanjian" (*supplementair*) tentang hak pemerintah untuk memungut pajak impor dan ekspor, cukai, pajak jangkar, pajak pelabuhan, dan pajak lainnya yang menyangkut pelayaran, serta hak pemerintah untuk mengawasi pelabuhan pada tanggal 12 Agustus 1905. Perjanjian yang sama dilakukan pula terhadap kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Banggae (13 Agustus 1905), Pamboang (14 Agustus 1905), Binuang (21 Agustus 1905), Mamuju (5 Oktober 1905), Sendana (6 Oktober 1905), dan Tappalang (8 Desember 1905). Perjanjian itu masing-masing mendapat persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Februari 1906.⁸⁰

⁸⁰ Penandatanganan Tambahan Perjanjian antara para penguasa (*mar'dia*) bersama hadatnya dengan Pemerintah Hindia Belanda tersebut, baca, Pemda, 1991., *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, hlm. 181-197; Nooteboom C. 1912, Kerajaan Balanipa-Mandar (terj) "Nota

Sesungguhnya perjanjian itu merupakan tambahan dari perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya antara para penguasa Mandar dengan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena menjelang akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai mendesak dan berhasil memaksa kerajaan-kerajaan di Mandar agar mengakui dan menyatakan berada dan merupakan bagian dari wilayah pemerintah Hindia Belanda. Ini jelas dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang disodorkan dan ditandatangani oleh para penguasa Mandar.⁸¹ Itulah sebabnya ketika Residen Brugman dan Kontrolir Dhomen dalam perjalanan dinasny untuk mengetahui berbagai persoalan politik dan lainnya di daerah Mandar, tidak mengalami hambatan atau kesulitan dan bahkan dinyatakan berhasil dengan baik.⁸²

van toelichting betreffende het Lansschap Balangnipa Taid. LIV, hlm. 503-535. Ujung Pandang: BKSNT, hlm. 25.

⁸¹ Perjanjian-perjanjian itu misalnya: Kerajaan Balanipa oleh Mara'dia I Mandawari bersama hadatnya pada 18 Januari 1873 dan 21 Juni 1897; Kerajaan Cendana oleh Matte Ambo Cetto Pappuangang Puttada-Pengganti Mada'dia Cendana dan Hadatnya pada 14 Oktober 1862 dan La Guliga-Pemerintah Cendana dan para pembesar negerinya pada 29 September 1896; Kerajaan Banggae oleh Mara'dia I Juawara bersama Hadatnya pada 20 Agustus 1892; Kerajaan Pamboang oleh Mara'dia Latta bersama Hadatnya pada 31 Oktober 1892; Kerajaan Tappalang oleh Mara'dia Andi Musu bersama Hadatnya pada 31 Oktober 1892; Kerajaan Mamuju oleh Mara'dia Karanene bersama Hadatnya pada 30 September 1896; dan Kerajaan Binuang oleh Mara'dia La Magga Daeng Silasa bersama Hadatnya pada 2 Oktober 1888 dan 19 Juni 1897 (Pemda, 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan*, hlm. 185-187).

⁸² Hal ini jelas dinyatakan dalam kawat yang dikirim oleh Gubernur Sulawesi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 340, tertanggal 18 Juni 1905, bahwa "*Resident terug Mandharsche landschappen gingen alle nieuw contract aan bedregen schadeloosstellingeng uitvoerrecht overal vastgesteld onder teekening overeen-komsten rechten later door in Mandhar te plaatsen die overal welkom was*" (Residen kembali dari kerajaan-kerajaan Mandar dan semuanya membuat perjanjian baru tentang sejumlah ganti rugi atas bea cukai ekspor-impor yang ditetapkan dengan menandatangani perjanjian yang akan ditentukan kemudian oleh kontrolir yang ditempatkan di Mandar, dimana-mana kedatangannya diterima dengan baik). Berdasarkan Surat Keputusan No. 2580/2 tert. 1 Juli 1905, Controleur Dhomen diangkat menjadi Controleur Mandar dan sekaligus tugas untuk menemani Residen Brugman, yang diperbantukan pada Gubernur dalam perjalanan dinasny untuk mengetahui perkara-perkara penting dalam masalah politik sebelum memangku jabatannya (Leyds, 1940, "*Memori van Overgave*", hlm. 45).

Meskipun demikian bagi yang menolak kesepakatan atau perjanjian itu turus pula menggalang kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan itu antara lain gerakan perlawanan I Senjata di Campalagiang pada November 1905. Gerakan ini bermula ketika sekitar seratus orang bersenjata di bawah pimpinan I Senjata melakukan gerakan perlawanan terhadap campur tangan Belanda dalam pengangkatan *mara'dia* Campalagiang I Ramang, sehingga dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban di Campalagian.⁸³ Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda mengirim suatu pasukan yang terdiri dari lima puluh orang serdadu untuk menumpas gerakan perlawanan itu pada Desember 1905. Pada mulanya usaha itu tidak berhasil karena I Sanjata bersama pasukannya mengundurkan diri ke arah utara. Mereka kemudian bergabung dengan gerakan perlawanan yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali yang menentang kehadiran Belanda dan perjajian tambahan itu. Kedua putra Mara'dia Alu, I Gaang itu masing-masing berkedudukan sebagai *mara'dia malolo* (panglima perang) Balanipa dan Banggae. Itulah sebabnya pasukan militer Belanda melancarkan serangan untuk menumpas gerakan perlawanan itu pada akhir Januari 1906. Walaupun serangan itu mendapat perlawanan dari laskar Mandar yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali, namun pasukan Belanda berhasil merebut benteng pertahanan laskar Mandar di daerah Tandung.⁸⁴

⁸³ Sesungguhnya perlawanan itu dipicu oleh campur tangan Belanda dalam pengangkatan I Ramang (cucu Mara'dia Balanipa dan juga kemanakan Mara'dia Majene) menjadi Mara'dia Campalagiang. Pengangkatan itu mendapat protes dari I Sanjata (anak dari mantan Mara'dia Campalagiang, La Tongae yang diturunkan karena terlibat dalam penculikan manusia dan perdagangan budak) yang juga merasa berhak atas jabatan itu (Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar*, hlm. 207-208; Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 45-46).

⁸⁴ Menurut laporan Belanda bahwa kubuh pertahanan yang berjarak sekitar dua jam perjalanan dari Balanipa itu diperkuat sekitar delapan puluh orang "gerombolan perampok".

Kenyataan itu mendorong para penentang perjanjian mengadakan pertemuan di Timbogading Adolang. Pada pertemuan itu dihasilkan suatu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan *Assamalewuang* di Timbogading, untuk melancarkan serangan balasan terhadap kedudukan Belanda di Majene.⁸⁵ Pada tanggal 6 April 1906, gabungan laskar (Balanipa, Banggae, Pamboang, Alu, Tubbi, Taramanu, dan lainnya) melancarkan serang secara mendadak terhadap tangsi militer Belanda di Majene. Serangan laskar Mandar itu, memaksa Kontrolir Ketting Olivera melarikan diri dengan kapal ke Makassar.⁸⁶ Oleh karena itu, pemerintah segera mengirim bantuan pasukan ke Mandar untuk menumpas gerakan perlawanan itu. Sementara para pejuang mengundurkan diri ke markas atau benteng pertahanan masing-masing di daerah padalaman.⁸⁷

Setelah peristiwa itu, para penguasa dan rakyat Mandar mulai menunjukkan "sikap baik" terhadap Belanda, sehingga sebagian pasukan Belanda di Mandar ditarik kembali ke Makassar. Namun beberapa hari setelah penarikan pasukan itu, sekitar 150 orang pasukan bersenjata di bawah pimpinan antara lain I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali melancarkan serangan terhadap pusat pemerintahan Belanda di Majene pada malam tanggal 6 dan dini hari 7 Juni 1906. Mereka

Pada peristiwa itu pihak Belanda dinyatakan tidak mengalami kerugian apa-apa, sedangkan pihak gerombolan 14 orang meninggal dan 13 orang mengalami luka-luka baik berat maupun ringan (Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 46; Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar*, hlm. 212-213).

⁸⁵ Pada pertemuan itu antara lain dihadiri oleh Mara'dia Banggae I Juwara, Mara'dia Pamboang I Latta, Mara'dia Alu I Gaang, I Calo Ammana I Wewang, dan I Kaco Ammana I Pattolawalo (Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar*, hlm. 203-205).

⁸⁶ Dalam laporan Belanda peristiwa itu disebutkan bahwa "*Lang heef Dhomen hier niet gewert, van het is Controleur Ketting die hier bij de overval op het etablissement op 6 April 1906 moet vluchten*" (Dhomen sekian lama tidak dapat bekerja, karena Kontrolir Ketting Olivera telah melarikan diri pada waktu ada serangan secara tiba-tiba terhadap tangsi militer (Belanda) tanggal 6 April 1906). Baca, Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 46.

⁸⁷ Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar*, hlm. 217.

itu sebagian besar terdiri dari orang-orang Alu-Balanipa dan Majene. Pada peristiwa itu pihak penyerang berhasil membakar Pasanggerahan yang dipakai sebagai tempat kediaman kontrolir dan rumah syahbandar yang telah memihak pada Belanda. Oleh karena itu Kontrolir Mandar, Dhomen terpaksa melarikan diri dengan menggunakan "samang" (perahu bersayap/ bercadik kecil) ke Parepare. Sementara pegawai kontrolir yang bernama Schmidthamer dan seorang opas polisi ditangkap dan dibawa ke pedalaman lalu dibunuh. Selain itu, pihak penyerang juga dilaporkan merampas barang-barang dan banyak uang.⁸⁸

Gerakan perlawanan itu dengan cepat meluas ke berbagai penjuru wilayah Mandar. Sebagian raja-raja yang semula memberi dukungan terhadap kehadiran Belanda, berlahan-lahan memihak kepada gerakan perlawanan yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali. Patut dikemukakan bahwa kedua kakak-beradik ini bersepuhu satu kali dengan I Juwara Mara'dia Banggae. Bahkan I Kaco Ammana Patolawali adalah menantu dari Mara'dia Banggae dan Pamboang (I Juwara dan I Latta). Oleh karena itu, kedua *mara'dia* ini tidak dapat dipungkiri keterlibatannya dalam gerakan perlawanan tersebut.⁸⁹ Untuk menumpas gerakan perlawanan itu, pemerintah

⁸⁸ Mededeelingen Betreffende Eenige Mandharsche Landschappen, 1909, dalam "Bijdragen Tot De Taal-, Land-En Volkenkunde van Nederlandsche - Indie", 62: 649-746., hlm. 666; Leyds, 1940, "Memori van Overgave, hlm. 46. Kedua sumber asing ini memberikan penanggalan bulan yang berbeda tentang peristiwa itu, namun berdasarkan proses kesejarahan selanjutnya maka tanggal 6 jalan 7 Juni 1906 lebih dapat dipercaya daripada tanggal 6 jalan 7 Juli 1906. Sementara perampokan atau perampasan barang-barang itu dapat diperoleh dari berbagai sumber lokal yang menyebutkan bahwa pihak penyerang berhasil menyita: 81 pucuk senjata api, 42 peti peluru, 8 peti uang kertas, 2 peti uang perak, dan 10 ekor kuda. Syah, H.M. Tanawali Azis. 1998. *Sejarah Mandar Jilid II*. Ujung Pandang: Yayasan "Al Azis", hlm.74-75; Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar...*, hlm. 221.

⁸⁹ Dalam Mededeeling Betreffende...disebutkan bahwa "Met uitzondering van I Djoewara en I Latta, de Maradia's van Madjene en van Pembaeang, die oogluikend de overall te Madjene in den nacht van 6 op 7 Juni 1906 toelieten, waren het hoofdzakelijk lieden van buiten het landschap Madjene..." (Kecuali I Juwara dan I Latta Mada'dia Majene (Banggae) dan Mara'dia Pamboang

Hindia Belanda segera mengirimkan pasukannya ke Mandar demi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah itu. Namun serangan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Lenshoek ke pusat perlawanan di Alu dan daerah sekitarnya, mendapat perlawanan dari laskar Mandar di bawah pimpinan I Calo Ammana I Wewang di Paropo. Itulah sebabnya pasukan Belanda ini mengundurkan diri dan kembali ke Balanipa pada 13 Juni 1905.⁹⁰

Kenyataan itu mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk lebih meningkatkan tekanan karena gerakan perlawanan itu ternyata lebih besar daripada dugaan semula. Itulah sebabnya ketika bantuan pasukan dari Makassar di bawah pimpinan Mayor Lanzing tiba di Mandar (Majene) 19 Juni 1906, Asisten Residen Vermeulen segera memerintahkan pasukan itu untuk melancarkan serangan terhadap pusat-pusat gerakan perlawanan.⁹¹ Tanggal 22 Juni 1906, mulailah terjadi serangkaian pertempuran sengit pasukan Belanda dengan laskar Mandar. Namun pada penghujung peperangan sengit itu laskar Mandar di bawah pimpinan I Kaco Ammana Pattolawali yang mengundurkan diri ke pedalaman dan bertahan di Benteng Galung Adolang, akhirnya harus mengakui keunggulan musuh (Belanda) pada 26 Juni 1906. Pada peristiwa itu, 5 orang pasukan Belanda mengalami luka-luka, sedangkan di pihak laskar Mandar 17 orang gugur sebagai kusuma bangsa,

yang secara sembunyi-sembunyi menyetujui pemneyerbuan di Majene pada malam tanggal 6 jalan 7 Juni 1906, pihak peneyang tersebut terutama terdiri dari orang-orang di luar wilayah Kerajaan Majene”, hlm. 666-667; Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 46).

⁹⁰ Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 46; Sagimun M.D., 1961. *Perang Sulawesi Selatan*. Jakarta: Pantia Museum Sejarah Tugu Nasional, hlm. 533; Abduh, Muhammad, dkk., 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm.166.

⁹¹ Muhammad, Abduh, dkk., 1985, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme...*, hlm. 166; Syah, 1998, *Sejarah Mandar Jilid II.*, hlm. 76. Asisten Residen Vermeulen tersebut, masih menjadi tanya bagi penulis apakah ia Asisten Reiden Mandar ketika atau daerah (bagian Pemerintahan) lainnya.

termasuk di antaranya I Kaco Ammana Pattolawali (anak menantu dari pasangan suami istri Mara'dia Banggae atau Majene I Juwara dengan Mara'dia Pamboang I Latta).⁹²

Kekalahan itu memaksa Madar'dia Banggae I Juwara dan Mara'dia Pamboang I Latta bersama sisa laskarnya mengundurkan diri ke Onang, salah satu wilayah bawahan dari Kerajaan Sendana. Sedangkan laskar Mandar lainnya yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang tetap melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, berpindah dari tempat ke tempat lainnya.⁹³ Mereka juga menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di *Pitu Ulanna Salu* (tujuh hulu sungai) dalam menghadapi pasukan Belanda. Sementara itu pasukan Belanda tetap pula melakukan pengejaran untuk menangkap dan menawan I Calo Ammana I Wewang bersama laskarnya, sehingga terjadilah serangkaian pertempuran antara kedua belah pihak, seperti kontak senjata di Parrewuang, Palipi, Salabose, Parribuang, dan Alu.⁹⁴ Dalam laporan Belanda, disebutkan bahwa Alu sebagai pusat gerakan

⁹² Dalam Memori van Overgave Leyds, disebutkan bahwa "Den 22 sten Juni geraekten onze troepen slaags met den goed gewapenden vijand, die teruggedreven en tot den 26 sten in het binnenland vervolgd werd. Wij kregen 5 gewonden, terwijl de vijand 17 dooden liet liggen, onder wie Katjoepoeng, schoonzonn van de Maradia van Bembaoeang..." (Pada tanggal 22 Juni terjadi kontak senjata antara pasukan kita (Belanda) dengan musuh yang bersenjata lengkap, yang dapat dipukul mundur dan sampai tanggal 26 Juni mereka diburu ke pedalaman. Pihak kita (Belanda) yang luka 5 orang, sedangkan pihak lawan yang mati 17 orang yang dibiarkan begitu saja, di antaranya terdapat I Katjupuang, menantu laki-laki Mara'dia Pamboang). Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 47; *Middeelingen Betreffende...*, hlm. 660-669. Sedang menurut sumber lokal bahwa kekuatan Belanda sekitar 500 orang pasukan dan pada peristiwa itu di pihak Belanda 15 orang mati dan 25 orang mengalami luka-luka. Sementara persenjataan pasukan Mandar terdiri dari beberapa pucuk (9) meriam dan kurang lebih 200 pucuk senjata (Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar...*, hlm. 187 dan 229; Syah, 1983, *Biografi I Calo Ammana I Wewang Topole Di Balitung*. Ujung Pandang: Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan, hlm. 97).

⁹³ Kendatipun demikian kedua *mara'dia* itu akhirnya berhasil pula ditangkap oleh musuh pada bulan Juli 1907. Mereka kemudian dipecah dari kedudukannya sebagai *mara'dia* (SK Gubernur No. 21 tanggal 16 Desember 1907) dan diasingkan ke Ujung Pandang (SK Gubernur No. 22 tanggal 5 Desember 1907). Baca, Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 47.

⁹⁴ Abduh, Muhammad, 1985, dkk., *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme...*, hlm. 189-169; Sagimun M.D., 1961, *Perang Sulawesi Selatan...*, hlm. 533.; Syah, 1983, *I Calo Ammana I Wewang...*, hlm. 83-89; Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar...*, hlm. 227.

perlawanan dan Kerajaan Balanipa tidak mampu bertindak terhadap wilayah bawahannya itu.⁹⁵

Gerakan perlawanan itu tidak dapat bertahan lama, selain karena terjadinya perpecahan di antara pemimpin-pemimpin dan para penguasa Mandar, juga karena semakin intensifnya patroli pasukan Belanda.⁹⁶ Pada tanggal 10 Oktober 1906, I Gaang atau Singaang, Mara'dia Alu (ayah dari I Calo Ammana I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali), salah satu unsur pimpinan gerakan perlawanan ditangkap oleh pasukan Belanda.⁹⁷ Sementara laskar Mandar yang mengundurkan diri ke Onang di bawah pimpinan Mara'dia Banggae I Juwara dan Mara'dia Pamboang I Latta akhirnya berhasil pula ditangkap oleh pasukan Belanda pada Juli 1907. Dengan alasan demi keamanan dan keteriban mereka kemudian diangsingkan ke Ujung Pandang (SK. Gubernur No. 22 tertanggal 5 Desember 1907).⁹⁸ Sementara laskar Mandar lainnya di bawah pimpinan antara lain Muhammad Kanna Baso

⁹⁵ Leyds, 1940, *Memori van Overgave.*, hlm. 46.

⁹⁶ Perpecahan itu misalnya, antara kelompok I Calo Ammana I Wewang dengan kelompok pemangku hadat tentang nasib para tawanan perang terutama Schmidthamer dan kawan-kawan. Dalam hal ini kelompok pemangku hadat tidak menghendaki tawanan itu dibunuh, tetapi kelompok I Calo Ammana I Wewang menentangnya dan bahkan membunuhnya karena dikhawatirkan akan melarikan diri. Demikian pula terhadap pembunuhan Mara'dia Onang, I Rukkalumu pada tanggal 14 Juli 1907 oleh pasukan I Calo Ammana I Wewang karena dianggap tidak bekerjasama dengan para pejuang Mandar yang mengundurkan diri ke Onang (Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar...*, hlm 224-228; *Mededeelingeng Betreffende...*, hal. 676).

⁹⁷ Dalam "Memori van Overgave" disebutkan bahwa "De hoofd aamlegger van de onlusten, Singaang, en de Maradia van Aloe en vader van Katjoepoeng en Tjalo, werd den 10 October 1906 gevangeng genomen" (Biang keladi dari pemberontakan ini adalah Singaang, Mara'dia Allu dan ayah dari Kacupuang dan Calo ditangkap pada tanggal 10 Oktober 1906). Baca, Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 47.

⁹⁸ Di antara mereka yang diasingkan itu termasuk juga I Kurade Daeng Mattuttu Puang Tondo Pabicara Adolang. Sebelum itu Mara'dia Banggae I Juwara dan Mara'dia Pamboang I Latta dipecat dari kedudukannya sebagai *mara'dia* (SK. Gubernur No. 21 tertanggal 16 Desember 1907). I Juwara kemudian diagantikan oleh Rammang Patta Lolo, Mara'dia Campalagian, putra Mara'dia Majene Sangkilang (Sukkilang Tomadio di Masigi) sebagai Mara'dia Banggae atau Majene (SK. Gubernur No. 3118 tertanggal 16 Desember 1907). Sedangkan I Latta digantikan oleh Simananggi Pakkarama, putra Mara'dia Balanipa Tokape sebagai Mara'dia Pamboang (*Mededeelingeng Betreffende...*, hlm. 660-669; Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 47

mengundurkan diri ke Mamaju dan bergabung dengan gerakan perlawanan yang dipimpin oleh La'lang Langi Parrimuku, Pattolo Lipu, Mattona Pattana Pitu, Mantaroso Pattana Bone, dan Sirullah Daenna Maccirinnæ. Gerakan perlawanan di Mamuju ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1908.⁹⁹

Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mematahkan gerakan perlawanan I Calo Ammana I Wewang bersama laskarnya, akhirnya membuahkan hasil seiring dengan ditangkapnya musuh utama Belanda itu pada November 1907. Dengan alasan demi keamanan dan ketertiban, I Calo Ammana I Wewang kemudian diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Tanjung Pandang, Pulau Belitung (SK. Gubernemen No. 15 tertanggal 12 Maret 1908).¹⁰⁰ Meskipun demikian tidak berarti bahwa gerakan perlawanan terhadap Belanda telah berakhir, karena sisa-sisa laskar I Calo Ammana I Wewang yang tidak berhasil ditangkap atau tidak sudah menyerah tetap berusaha menjalin kerjasama dengan para pejuang Mandar lainnya, terutama di wilayah *Pitu Ulunna Salu* untuk melanjutkan perlawanan. Pemerintah kolonial Belanda baru dapat memadamkan gerakan perlawanan rakyat Mandar pada 1909, namun tetap disebut-sebut dan dianggap sebagai ancaman bagi patroli pasukan Belanda hingga tahun 1924.¹⁰¹

⁹⁹ Pembahasan lebih lanjut tentang gerakan perlawanan di Mamuju tersebut, baca, Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar...*, hlm. 229 dan 239-272; Syah, 1983, *I Calo Ammana I Wewang...*, hlm. 96-100).

¹⁰⁰ Leyds, 1940, *Memori van Overgave*, hlm. 47; Syah, 1983, *I Calo Ammana I Wewang...*, hlm. 145. Pada masa pendudukan Jepang, I Calo Ammana I Wewang dibebaskan (1944) dan atas usaha keluarganya ia dapat kembali ke Mandar setelah menjalani pahit getirnya sebagai seorang tawanan di tempat pembuangan atau pengasingan selama kurang lebih 36 tahun. Sebagai peringatan atas pengasingan itu, I Calo Ammana I Wewang kemudian digelar Topole di Balitung. Beliau wafat pada tanggal 11 April 1967 dan dimakamkan di pekarangan Masjid Limboro, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar...*, hlm. 237).

¹⁰¹ Hal itu ditandai dengan tertangkapnya Tomakaka Sumarorong pada bulan Juli 1909, dan menyusul Daeng Majannang tertangkap pada bulan Agustus 1909 (Leyds, 1940, *Memori van*

Latar kesejarahan keluarga putra-putra *mara'dia* Alu yang senantiasa menentang kekuasaan kolonial Belanda tersebut, tentu tidak hanya diketahui oleh Hammad Saleh dari kedua orang tuanya dan segenap anggota keluarga terdekatnya, tetapi juga dari kerabat yang berada dalam siklus kehidupannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika latar belakang kehidupan keluarganya turut pula mempengaruhi sikap dan prinsip perjuangan Hammad Saleh ketika melibatkan diri secara langsung dalam pergaulan sosial di masyarakat. Itulah sebabnya dalam perkembangan selanjutnya, Hammad Saleh tidak pernah merasa tenang melihat bangsa dan tanah airnya dijajah atau berada di bawah kekuasaan pendudukan militer Jepang dan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini pula yang menyebabkan Hammad Saleh rela berkorban demi untuk membela martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Keluarga Hammad Saleh merupakan keluarga bangsawan *ana' pattola payung* yang senantiasa menjunjung tinggi kehidupan yang diatur oleh norma-norma sosial sebagaimana lazimnya dalam kehidupan keluarga kaum bangsawan (*todiang lai yana*). Oleh karena itu, kehidupan keluarga Hammad Saleh sangat menjunjung tinggi tradisi leluhurnya dalam hal yang menyangkut tingkah laku yang terpuji dalam pergaulan sosial di masyarakat. Termasuk yang menyangkut kepemimpinan, etika, dan moral manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi mereka, penilaian masyarakat terhadap keluarganya, baik yang menyangkut soal kepemimpinan, etika, dan moral maupun yang menyangkut soal kehidupan religius, merupakan patokan untuk

Overgave", hlm. 55). Sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa gerakan perlawanan terhadap Belanda di wilayah Pitu Ulunna Salu berlangsung hingga tahun 1924 (Sinrang, 1994, *Mengenal Mandar...*, hlm. 274-288; Syah, 1983, *I Calo Ammana I Wewang...*, hlm. 100-108; Abduh, Muhammad, dkk., 1985, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme...*, hlm. 171-177.

memperoleh simpati atau dukungan dari masyarakat secara keseluruhan. Itulah sebabnya Hammad Saleh dalam masa kanak-kanak selalu ditempah dengan pendidikan kepemimpinan, moral dan etika oleh orang tuanya dan *peandonggurunna ana' maradia*.¹⁰² Petuah-petuah yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya, dan segenap anggota kerabat terdekatnya yang berada siklus kehidupannya, menjadikannya sebagai seorang manusia berhati mulia, bertanggung jawab, dan menjadi manusia yang mempunyai solidaritas dalam kehidupan masyarakat.

Sesungguhnya *peandonggurunna* atau *peannanggurunna ana' maradia* bertugas mendidik keturunan *maradia* yang berpredikat *ana' pattola payung* (calon pengganti *maradia*). Lembaga pendidikan ini diasuh oleh para pemangku adat yang mempunyai keterampilan dan kecakapan khusus yang sangat dibutuhkan bagi seorang calon *maradia*, agar memiliki sifat terpuji di mata orang banyak. Meskipun lembaga itu di bawah koordinasi *maradia* yang sedang berkuasa, namun hak dan wewenang penuh berada di tangan pemangku adat atas nama rakyat untuk menilai murid (*ana' guru*) yang diasuh oleh *andongguru* (pengasuh).¹⁰³

Masalah kepemimpinan juga merupakan salah satu dari sasaran pembinaan utama dari orang tua, anggota kerabatnya, dan pemangku adat terhadap Hammad Saleh. Hal ini dapat dipahami kalau ia ditempuh oleh keluarganya sedemikian rupa, agar kelak di masyarakat dapat menjadi seorang pemimpin yang

¹⁰² *Peandonggurunna* atau *peannanggurunna ana' maradia* secara harfiah berarti tempat bergurunya calon *maradia*. Juga biasa disebut dengan *pekaka na ana' maradia* (tempat berkakak atau orang yang dianggap kakak oleh calon *maradia*) dan *tomabubenna ana' maradia* (orang tuanya calon *maradia*). Adapun yang menjadi sasaran penilaian dari sifat yang terpuji dimaksud, antara lain *malabbi pau* atau *pau-pau* (baik dalam bertutur kata), *malabbi gau* (baik dalam bertindak), dan *malabbi kedo* (baik dalam berbuat). Rahman, Darmawan Mas'ud, 1988. *Puang dan Daeng, Kajian Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar*. Ujung Pandang: Disertasi (belum diterbitkan) Pascasarjana Universitas Hasanuddin, hlm. 222.

¹⁰³ *Ibid.*; Amir, 2011, *Konflik Balanipa – Belanda...*, hlm. 96.

berkualitas. Maksudnya dapat menjadi seorang pemimpin yang melekat di hati rakyat, yang dicintai oleh masyarakat, dan menjadi tumpuan dari rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Hammad Saleh sebagai seorang *ana' pattola payung* sudah sewajarnya jika ditempat menjadi seorang pemimpin yang akan mengayomi masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Terlebih lagi bahwa Hammad Saleh adalah merupakan produk langsung dari Kerajaan Alu dan kerajaan-kerajaan lain, terutama dari persekutuan *Pitu Babana Binanga*.

Selain itu, masalah *siri'* dan *lokko* juga yang merupakan konsep budaya bagi orang Mandar, selalu menjadi penekanan dalam pembinaan mental terhadap Hammad Saleh. *Siri'* dan *lokko* jika diartikan secara harfiah bermakna malu dan pedih atau perasaan sedih yang mengandung unsur solidaritas terhadap orang lain. Bukan hanya itu, karena *siri'* dan *lokko* juga mengandung makna kehormatan, harga diri atau martabat, dan kesediaan berkorban atau mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk membantu orang lain, tanpa memikirkan harta benda dan kedudukan, bahkan nyawa sekalipun. Menegakkan *siri'* dan *lokko* adalah merupakan syarat mutlak sebagai seorang manusia dalam kehidupan masyarakat, karena bagi mereka yang tidak menegakkan *siri'* dan *lokko* akan dipandang rendah martabatnya. Itulah sebabnya orang Mandar rela berkurban demi untuk menegakkan *siri'* dan *lokko*.¹⁰⁴

Berdasarkan konsep kepemimpinan dalam masyarakat Mandar seperti yang tercatat dalam tradisi *lontarak*, seorang penguasa atau pemimpin (meskipun bukan penguasa atau pemimpin puncak) mutlak kepemimpinannya harus berorientasi kepada kehidupan demokrasi. Di sini terkandung makna bahwa sang

¹⁰⁴ Rahman, 1988, *Puang dan Daeng...*, hlm. 143

pemimpin harus dapat menerima pandangan atau keinginan dari masyarakat yang dipimpinnya. *Maradia* atau pemimpin tidak menutup diri dalam kehidupan masyarakat dan mereka pun harus dapat memelihara dialog dengan rakyat. Tugas melindungi atau mengayomi kehidupan rakyat atau masyarakat, adalah suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin.¹⁰⁵

Pembinaan mental yang dilakukan oleh orang tua dan anggota kerabatnya, termasuk kelompok pemangku adat, sejak usia muda atau kanak-kanak tertanam dengan baik dalam diri Hammad Saleh. Ia telah ditempah oleh norma-norma sosial dalam kehidupan keluarganya, dan telah dimatangkan oleh kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya. Apa yang dijumpai oleh masyarakat dalam diri Hammad Saleh, baik yang tampak dari atas permukaan maupun yang berada di bawah permukaan dalam pergaulan sosial di masyarakat adalah merupakan produk dari pembinaan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar kehidupannya. Bukan dari hasil pengalaman hidupnya yang terbatas, bukan pula dari hasil kemampuan pengetahuannya yang diperoleh dari dunia pendidikan dan pergaulan dalam lingkungan teman-temannya semata, melainkan semua yang terlihat dalam diri atau kepribadian Hammad Saleh, adalah merupakan produk dari suatu proses yang panjang, baik dari orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya, maupun yang berasal dari pengalaman dunia pendidikan di lembaga *andonggurunna ana' mara'dia* dan pergaulan dalam lingkungan teman-temannya.

Jika disimak dari sifat-sifat Hammad Saleh dalam dunia realitas, seperti kerendahan hatinya dalam pergaulan sosial di masyarakat, suka memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongannya, ketegasan, dan kerelaannya

¹⁰⁵ Rahman, 1988, *Puang dan Daeng...*, hlm. 214.

dipenjarakan dari pada harus bekerja sama dengan Jepang dan Belanda yang ingin menindak dan memeras rakyatnya.¹⁰⁶ Semua itu adalah merupakan hasil tempahan yang diperoleh sejak kecil. Tentu saja berperan pula faktor kepribadian aslinya yang merupakan rahmat dari Tuhan. Sebab, walau bagaimana pun karakter yang asli yang dimiliki seseorang, ikut pula membentuk kepribadiaannya di masyarakat. Itulah sebabnya, tidak secara otomatis seorang anak manusia langsung dapat mewarisi sifat-sifat orang tuanya yang berbudi luhur. Adakalanya terjadi penyimpangan yang bersifat kontradiktif. Akan tetapi bagi Hammad Saleh, di samping memperoleh pembinaan mental yang intensif dari orang tuanya, anggota kerabatnya, dan segenap pemangku adat serta juga sifat-sifat asli yang dimilikinya sejak lahir, telah mendukungnya menjadi seorang pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh masyarakat ketika ia melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, mungkin ada baiknya disimak salah satu sumber yang mengemukakan bahwa sejak kecil Hammad Saleh telah mendapatkan pendidikan *ada' mapparetta* (adat memerintah), adat istiadat, dan budi pekerti yang luhur dari lembaga pendidikan *andonggurunna ana' mara'dia*. Ketegasan dan solidaritas dari kedua orang tuanya juga turut berbekas dalam kalbunya, sehingga setelah dewasa Hammad Saleh dikenal dengan teman-temannya sebagai seorang pemimpin yang tegas, konsekuen, berani, bertanggung jawab dan sangat memperhatikan nasib bawahan atau pengikutnya.¹⁰⁷ Dengan demikian, maka

¹⁰⁶ Rasyid, Darwas, 1996, *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu...*, hlm. 52-53; Syah, 1983, *I Calo Ammana I Wewang...*, hlm.

¹⁰⁷ Sinrang, A. Saiful, 1994, *Mengenal Mandar Sekilas Lintas*. Majene: Pemda Tk. II Majene, hlm. 14; Rasyid, Darwas, 1996, *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu...*, hlm. 53; Rahman, 1988, *Puang dan Daeng...*, hlm. 304.

karakter atau kepribadian yang tampak dalam dunia realitas ketika Hammad Saleh melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan sosial di masyarakat, adalah merupakan hasil tempahan yang diperoleh sejak kecil.

Meskipun Hammad Saleh hidup di dalam tembok feodalisme atau dalam lingkungan kaum bangsawan dan ditempah dalam sistem pendidikan yang diasut oleh *andonggurunna (annang-gurunna/pekakanna) ana' mara'dia* dan sistem pendidikan kolonial Belanda, tetapi tidak menjeratnya sebagai seorang manusia yang bersifat dingin terhadap dunia luar atau kehidupan lingkungan masyarakatnya. Sebab, lembaga pendidikan bagi calon *mara'dia* itu, justru menekankan pada sifat-sifat terpuji dalam pergaulan sosial di masyarakat yang disebut dengan sifat *tomalabbi* (manusia utama), yaitu *malabbi pau* (utama dalam bertutur kata), *malabbi kedo* (utama dalam berbuat), dan *malabbi gau* (utama dalam bertindak). Selain itu, di lembaga pendidikan itu juga ditekankan tentang *ada' mapparetta* (adat memerintah), terutama pantangan besar yang tidak boleh dilakukan adalah *marattas-rattas uake* (memutuskan sendi-sendi adat) dan *marrupu-rupu batu* (menghancurkan aturan dan kebiasaan adat).¹⁰⁸ Itulah sebabnya Hammad Saleh di masa-masa selanjutnya selalu memperlihatkan tingkah laku yang terpuji di masyarakat, reputasi sosialnya yang mengagumkan, dan prinsip perjuangannya dalam melepaskan bangsanya dari cengkeraman penjajahan Jepang dan Belanda serta dalam perjuangan menegakkan, membela, dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Tambahan pula bahwa yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan pada masa kanak-kanak Hammad Saleh, adalah

¹⁰⁸ Rahman, 1988, *Puang dan Daeng...*, hlm. 216.

kehidupannya pada usia sekitar lima sampai sepuluh tahun. Oleh karena dalam periode itu, selain dilakukan pembinaan mental secara intensif dari kedua orang tuanya dan anggota kerabat terdekatnya. Hammad Saleh kemudian dimasukkan pada “Sekolah Dasar” atau Sekolah Melayu yang disebut dengan *Inlandsche School* “Klas III” di Petoosan (Alu) dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1925.¹⁰⁹ Pendidikan sekolah ini penting, karena bukan hanya dimaksudkan untuk sekedar dapat membaca dan menulis huruf Latin, mengenal angka-angka untuk berhitung, dan untuk meningkatkan kecerdasan seseorang, tetapi juga dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam perjuangan guna mencapai kemerdekaan Indonesia serta untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat kelak di kemudian hari.¹¹⁰ Atau dengan perkataan lain bahwa pendidikan sekolah itu dapat digunakan dan amat penting untuk menumbuhkan kader-kader nasional yang kelak dapat berperan dalam mengobarkan semangat nasionalisme di tanah air.

Setelah Hammad Saleh menyelesaikan pendidikannya, ia membatu orang tuanya berkebud di Mombi (Alu) hingga tahun 1931. Namun karena ia terlibat perkelahian dengan menggunakan keris, sehingga ia dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun (1931-1933) di Surabaya.¹¹¹ Perlu dikemukakan bahwa ketika Hammad Saleh dipenjarakan, ia tidak sedikit memperoleh ide-ide baru (perjuangan kemerdekaan) dan informasi tentang perjuangan pergerakan kebangsaan dari tokoh-tokoh pergerakan yang juga sedang menjalani hukuman sebagai tawanan politik di Surabaya.

¹⁰⁹ Arsip NIT, No. 140, *Inlichtingen Rapport* Hammad Saleh pada 30 Juli 1947.

¹¹⁰ Hal ini tampaknya telah disadari oleh orang tua Hammad Saleh, bahwa zaman telah mengalami perubahan dan seseorang tanpa pendidikan sekolah pasti akan banyak menghadapi kendala dalam kehidupannya atau dalam menghadapi masa depannya, apalagi yang namanya seorang pemimpin di masyarakat.

¹¹¹ Arsip NIT, No. 140, *Inlichtingen Rapport* Hammad Saleh pada 30 Juli 1947.

Bukan hanya itu karena pertemuannya dengan sejumlah tokoh-tokoh pergerakan selama dalam tahanan, semakin menyadarkan Hammad Saleh atas pentingnya perjuangan bersama dalam menentang kekuasaan kolonial Belanda.

Hammad Saleh menjalani hukuman penjara selama kurang lebih tiga tahun di Surabaya dan setelah itu ia kembali ke kampung halamannya pada 1933. Selama kurang lebih empat tahun tinggal dan berkebun di Mombi (Alu), ia kembali terlibat perkelahian pada 1937. Perkelahian yang berlatarbelakang *siri'* atau harga diri ini bermula ketika Hammad Saleh merasa tersinggung atas pernyataan terhadap dirinya sebagai seorang mantan nara pidana. Namun perkelahian itu kembali menyeretnya ke dalam tahanan dan dipenjarakan di Polewali selama delapan bulan. Setelah dibebaskan dari penjara, ia kembali ke Mombi dan menjalani kehidupannya sebagai seorang petani hingga masa pendudukan militer Jepang.¹¹²

Selain itu, patut pula dikemukakan bahwa ketika Hammad Saleh memasuki usia dewasa dan dianggap sudah waktunya untuk berkeluarga atau berumah tangga, maka ia dikawinkan atau dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang gadis yang bernama I Cecce. Meskipun perkawinan antara kedua pasangan sejoli itu, atas kehendak orang tua masing-masing sesuai dengan adat kebiasaan pada waktu itu, tetapi tampaknya pasangan suami isteri itu dapat hidup bahagia. Dari hasil perkawinan tersebut, mereka dikaruniai oleh Allah Yang Maha Kuasa lima orang anak, yaitu I Kamar, I Kafei, Sukardi, Nursiah, dan Tawarah. Hammad Saleh kemudian kawin untuk kedua kalinya, yaitu dengan I Tile. Namun dari hasil perkawinan yang kedua tersebut, mereka tidak dikarunia keturunan. Istri kedua inilah yang senantiasa

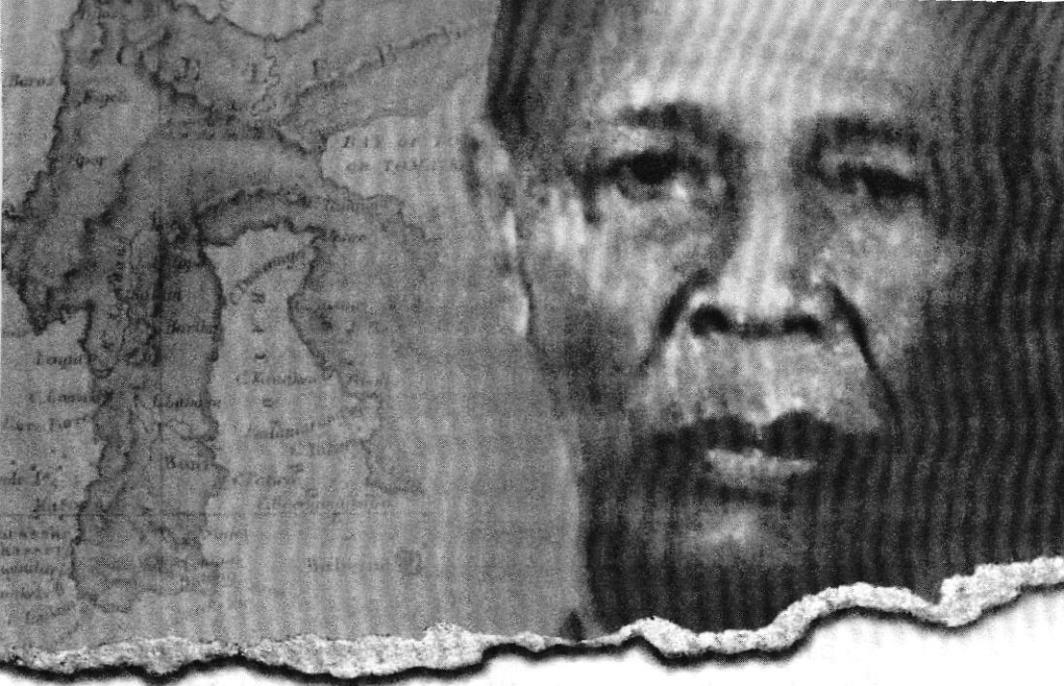
112 Arsip NIT, No. 140, *Inlichtingen Rapport* Hammad Saleh pada 30 Juli 1947.

mendampingi Hammad Saleh, baik dalam memimpin perlawanan terhadap kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda maupun dalam perjuangan membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia di daerah Mandar.¹¹³

Demikianlah secara singkat mengenai romantika kehidupan keluarga dan dunia realitas Hammad Saleh Puangna I Sudding dari masa kanak-kanak hingga memasuki usia dewasa. Perjalanan hidup dan kehidupannya sejak masa kecil telah menempahnya menjadi seorang manusia yang mengenal dan memahami kehidupan lingkungan masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dan berkat pembinaan mental yang dilakukan oleh orang tuanya dan segenap anggota kerabat keluarga yang berada dalam siklus kehidupannya sejak usia muda, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ketika Hammad Saleh melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan masyarakat, ia telah memperlihatkan kepribadian yang terpuji dalam pergaulan sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Hammad Saleh hidup dan ditempa di dalam tembok feodalisme, tetapi tidak menjeratnya menjadi seorang manusia yang bersifat dingin terhadap dunia luar atau kehidupan lingkungan masyarakatnya. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ia telah memperlihatkan tingkah laku yang terpuji dan reputasi sosial yang mengagumkan di masyarakat, seperti rendah hati atau tidak sombong terhadap orang lain, suka memberi bantuan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, memiliki rasa tanggung jawab sosial di masyarakat, berani dan tegas dalam pendirian, serta ramah dan terbuka terhadap siapa saja dalam interaksi sosial di masyarakat. Kesemua ini merupakan kunci yang amat menen-

¹¹³ Rasyid, Darwas, 1996, *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu...*, hlm. 52-53.

tukan bagi Hammad Saleh dalam meniti kehidupan selanjutnya di masyarakat. Sebab penilaian masyarakat terhadap kepribadian dan tingkalku seseorang merupakan pula patokan untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat.



PERJUANGAN MENENTANG JEPANG

Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang berkembang dengan pesat sejak pertengahan abad XIX. Negara ini kemudian bergabung dengan negara-negara fasis-militeris, seperti Jerman dan Italia dalam Perang Dunia II. Kelompok negara fasisme ini berhadapan dengan kelompok negara-negara Sekutu, seperti Inggris, Amerika, Australia, Prancis, dan Belanda. Ketika meletus Perang Dunia II di Eropa pada 1938, Jepang terus mempersiapkan diri guna mewujudkan keinginannya untuk membangun satu imperium Asia Timur Raya yang berada dalam dominasi kekuasaannya.

Langkah strategis yang dicanangkan untuk mewujudkan keinginan itu, adalah pertama-tama melumpuhkan pertahanan terbesar Amerika Serikat di Pasifik. Itulah sebabnya pemerintah Jepang secara tidak terduga memerintahkan tentaranya untuk membombardir pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941. Penyerangan ini dipandang sebagai tanda Jepang menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, sekaligus menjadi pertanda awal mulanya Perang Asia

Timur Raya, atau yang lazim juga disebut dengan istilah Perang Pasifik.

Persoalannya mengapa pihak Jepang giat membangun imperium Asia Timur Raya di bawah dominasinya? Ada beberapa hal yang sering diajukan sebagai jawaban. *Pertama*, adalah keberhasilan Jepang melakukan modernisasi atau Restorasi Meiji pada 1868, seperti pembukaan diri terhadap isolasi Jepang, reorganisasi pemerintahan, pembangunan angkatan perang, pembangunan bidang pendidikan dan pengajaran, pembangunan perekonomian dan perindustrian. Semua itu terakumulasi menjadi alasan Jepang melakukan ekspansi atau pendudukan wilayah baik secara ekonomi maupun secara politik. *Kedua*, adalah faktor kondisi internal Jepang. Negara ini memiliki wilayah yang tidak begitu menguntungkan dalam bidang pertanian karena sempit dan terdiri dari beribu pulau yang bergunung-gunung, sementara penduduknya semakin bertambah padat. Bidang ekonomi pertanian sangat tidak mungkin untuk menopang ekonomi negara yang berpenduduk begitu banyak. Hal itu telah mendorong peningkatan pembangunan pada ekonomi industri dan ternyata berhasil, namun terbentur pada pengadaan bahan baku dan pangsa pasar industri. Kenyataan itulah yang akhirnya mendorong Jepang untuk giat menguasai Indocina, Thailand, Myanmar, Malaya, Philipina, dan Hindia Belanda (Indonesia) sebagai pemasok bahan baku industri sekaligus sebagai pangsa pasar industrinya.

Wilayah Hindia Belanda sebagai salah satu incaran Jepang karena (1) kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara, (2) kaya akan hasil pertanian dan perkebunan seperti karet, beras, jagung, rempah-rempah yang sangat dibutuhkan tentara Jepang dalam peperangan, dan (3) memiliki tenaga manusia yang

banyak jumlahnya dan murah harganya, bahkan tidak dibayar untuk dipergunakan dalam segala keperluan termasuk untuk membantu melancarkan usaha perang. Demikian pula geopolitik Jepang sangat sempit yang tidak berimbang dengan pertambahan penduduknya, maka emigrasi sebagai jalan keluarnya dan militerisme sebagai pemberi jalan.¹¹⁴

Penyerangan yang dilancarkan oleh pihak tentara Jepang terhadap Pearl Harbour, cukup menggetarkan pihak Sekutu sebab Jepang yang dipandang satu negara kecil. Bahkan atas dorongan dan paksaan pihak Amerika Serikat, negara ini baru membuka diri dari keterisolasiannya namun mampu menghancurkan kubu pertahanan angkatan laut terkuat Amerika Serikat. Selain itu, Jepang juga melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di Hongkong dan Malaya. Strategis Jepang itu dipandang sebagai langkah awal yang dapat melapangkan rencananya untuk menduduki dan menguasai wilayah Asia Timur Raya.¹¹⁵

Tindakan Jepang itu mendorong pemerintah Hindia Belanda mengikuti jejak negara-negara Sekutu lainnya untuk mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Meskipun demikian tampak bahwa pihak tentara Jepang tidak pernah gusar. Itulah sebabnya setelah aksi pertama yang dilancarkan itu, tentara Jepang mulai menyerbu masuk ke negara-negara Asia Timur Raya lainnya. Pada permulaan 1942, tentara Jepang mulai bergerak ke arah selatan dan berusaha menduduki wilayah Hindia Belanda. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah berhasil menduduki Tarakan (Kalimantan Timur) dan berhasil memaksakan pihak Belanda untuk menyerahkan kekuasaan pada 13 Januari 1942.

¹¹⁴ Poelinggomag, Edward L. dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 81-82.

¹¹⁵ Ricklefs, M. C. 1994. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 294; Poelinggomag, Edward L. dkk. 2005, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, hlm. 82.

Kemudian tentara Jepang menyerang Balikpapan yang merupakan sumber minyak dan berhasil menguasainya pada 20 Januari 1942. Menyusul Pontianak pada 2 Februari 1942, Martapura dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942.¹¹⁶

Sebelum Jepang menduduki Hindia Belanda (Indonesia), sesungguhnya telah mengirim utusan kepada pemerintah Hindia Belanda pada awal 1941. Dalam nota yang dibawa oleh utusan Jepang Kabayashi, pemerintah Jepang memohon kepada pemerintah Hindia Belanda agar dapat memberikan fasilitas-fasilitas kepada pihak Jepang antara lain; (1) mengizinkan imigran Jepang ke Kalimantan, Sumatera, dan Kepulauan Nusatenggara, (2) memberikan izin kepada pihak Jepang konsesi untuk membuka jalan-jalan kereta api, pelabuhan-pelabuhan yang penting, serta mendirikan perusahaan-perusahaan. Meskipun permohonan pemerintah Jepang itu ditolak, pihak pemerintah Jepang masih tetap berusaha dengan mengutus sekali lagi delegasi Jepang di bawah pimpinan Yoshizawa untuk memohon kesediaan memenuhi permintaan seperti yang dicantumkan pada nota terdahulu. Permintaan itu juga mendapat reaksi penolakan. Hal itu pada satu sisi dipandang sebagai alasan pihak Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda. Pada sisi lain utusan itu sesungguhnya adalah mata-mata yang dikirim untuk mempelajari kedudukan kekuatan militer pemerintah Hindia Belanda. Itulah sebabnya dalam penyerbuan itu, dengan mudah pihak militer Jepang berhasil memaksa pemerintah Hindia Belanda bertekuk lutut.¹¹⁷

Untuk menduduki Pulau Sulawesi, tentara Jepang mulai menyusup dari utara dan bergerak ke arah selatan. Kota Manado yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi diduduki pada 11

¹¹⁶ Kartodirdjo, Sartono, dkk., 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia, hlm. 127.

¹¹⁷ Poelinggomang, Edward L., dkk., 2005, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, hlm. 83.

Januari 1942. Kemudian tentara Jepang bergerak ke arah selatan dan berhasil merebut lapangan udara di Kendari pada 24 Januari 1942, dan memaksa pihak pemerintah Hindia Belanda untuk menyerahkan kekuasaan. Dengan penguasaan Kendari, maka terbukalah kesempatan untuk menduduki Kota Makassar sebagai sasaran utama di Indonesia bagian Timur untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*). Pasukan Angkatan Laut Jepang yang mendapat perintah untuk menduduki dan menguasai Kalimantan dan Indonesia bagian Timur.¹¹⁸

Setelah menduduki Kendari, tentara Jepang melanjutkan penyerbuan ke Makassar dengan terlebih dahulu menduduki dan menguasai Sinjai. Sehari setelah menduduki Sinjai, Angkatan Laut Jepang berhasil melakukan pendaratan dekat Barombong, satu kampung yang terletak di sebelah utara Galesong atau sekitar 10 km sebelah selatan Kota Makassar pada 9 Februari 1942. Dari Barombong tentara menyerbu masuk ke Kota Makassar dan berhasil mendesak pihak pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaannya dan menyerang pusat-pusat pertahanan Belanda yang berada di daerah-daerah. Meskipun pasukan Belanda berusaha mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya, namun usaha perlawanan yang dilancarkan oleh pihak Belanda tidak mendapat manfaat. Bahkan mereka semakin terdesak hingga pada pertahanan terakhir di Camba dan Enrekang. Oleh karena itu, pihak Belanda terpaksa menyerah kalah dan seluruh Sulawesi akhirnya berhasil diduduki dan dikuasai oleh pihak Angkatan Laut Jepang.¹¹⁹

¹¹⁸ Ricklefs, M. C. 1994, *Sejarah Indonesia Modern.*, hlm. 187; Poelinggomang, dkk., 2005, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, hlm. 83.

¹¹⁹ Kadir, Harun, dkk., 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unhas, hlm.69-70.

Keberhasilan Angkatan Laut Jepang tersebut, tidak hanya di jazirah selatan Sulawesi, tetapi juga di Kalimantan dan bagian wilayah Indonesia Timur lainnya. Bahkan tentara Jepang yang mendapat tugas menduduki dan menguasai Sumatera dan Jawa, juga berhasil dengan baik mengembangkan tugas itu. Tentara Angkatan XXV Jepang yang beroperasi di Sumatera, akhirnya dapat menduduki dan menguasai Sumatera. Demikian pula dengan Tentara Angkatan XVI yang mendapat tugas untuk menduduki daerah Jawa dan Madura berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Keberhasilan yang dicapai oleh pihak Jepang itu, merupakan keberhasilan yang luar biasa karena dilakukan dengan begitu singkat.¹²⁰ Kenyataan itu akhirnya berhasil memaksa pihak pemerintah Hindia Belanda yang berada di bawah pimpinan Letnan Jenderal H. Poorten, selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda untuk menandatangani piagam penyerahan tanpa syarat kepada pihak Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Berdasarkan piagam itu, seluruh wilayah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan pasukan pendudukan Jepang.¹²¹

Ketika pecah Perang Pasifik, pihak pemerintah Jepang sesungguhnya telah berusaha menyebarkan pengaruh dengan propaganda misi suci yang diembangkannya dengan motto “persatuan Asia” serta membakar semangat rakyat melakukan perlawanan dengan menanamkan anti Barat. Melalui berita radio disiarkan bahwa “Jepang pembela Asia”, merasa berkewajiban memerdekakan Asia dari penindasan dan penjajahan bangsa-bangsa kulit putih

¹²⁰ Hal itu menimbulkan pertanyaan besar, tetapi tidak mudah menjawabnya lantaran tidak ada dokumen resmi untuk itu. Namun, kita bisa menduga bahwa tindakan Jepang mengirim utusan kepada pemerintah yang ingin didudukinya terutama di Indonesia bukanlah kejadian biasa.

¹²¹ Poelinggomang, dkk. 2005, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, hlm.83-84; Kadir, dkk. 1984, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan ...*, hlm. 70.

yakni Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda.¹²² Di samping itu, kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh tentara Jepang senantiasa pula disiarkan, sehingga berpengaruh terhadap para pendengar berbagai bangsa Asia, termasuk penduduk jazirah selatan Sulawesi. Meskipun pihak pemerintah Hindia Belanda berusaha membatasi gerak gelombang pesawat radio dan bahkan menyita pesawat radio rakyat agar tidak terpengaruh oleh berita propaganda Jepang, tetapi usaha Belanda tersebut sia-sia karena rakyat menginginkan perubahan.¹²³

Sejak Indonesia resmi di bawah kekuasaan Jepang pada awal 1942, situasi di jazirah selatan Sulawesi dapat dikatakan vakum atau pasif tidak melakukan kegiatan apa-apa. Terutama pada kerajaan-kerajaan yang sebelumnya mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk politik pecah belah atau *divide et impera*. Meskipun demikian kevakuman itu tidak berlangsung lama karena telah banyak berita tersiar bahwa Jepang datang untuk membebaskan bangsa Indonesia dan memerdekakannya dari penindasan Belanda. Orang di jazirah selatan Sulawesi pun menyambutnya dengan penuh harapan baru akan datangnya masa pencerahan, merdeka dan lepas dari belenggu penjajahan Belanda. Para raja dan rakyat pada umumnya menyambut kedatangan Jepang dengan penuh

¹²² Tentara Jepang yang maha kuat dan tidak terkalahkan oleh siapapun, dan telah memaklumkan perang kepada Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Bahkan tidak lama lagi seluruh Asia akan dibebaskan dari penindasan dan penjajahan karena tentara Jepang yang gagah berani pasti akan menang (Poelinggomang, dkk. 2005, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, hlm. 84).

¹²³ Sikap Belanda itu nampaknya tidak dapat menggugah keyakinan penduduk bahwa memang pihak Jepang menginginkan terusirnya pemerintahan kolonialis Belanda. Berdasarkan catatan, jumlah tawanan Jepang sebanyak 170.000 orang yang terdiri dari 65.000 tentara Belanda, 25.000 pasukan Sekutu, dan 80.000 warga sipil Belanda (termasuk 60.000 orang wanita dan anak-anak) diterlantarkan dalam kamp-kamp tawanan. Hal ini menyebabkan banyak di antara tawanan yang meninggal. Menurut catatan pula bahwa 20 persen dari jumlah tawanan tentara Belanda, 13 persen dari jumlah tawanan sipil wanita, dan 10 persen dari jumlah tawanan sipil anak-anak mengalami kematian dalam kamp tawanan. Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 87; Ricklefs, M.C. 1994. *Sejarah Indonesia Modern*, hlm. 187-188.

kegembiraan di daerahnya masing-masing, termasuk di daerah Mandar. Itulah sebabnya ketika tentara Jepang memasuki daerah Mandar pada akhir Februari 1942 dan aparat pemerintahan sipilnya yang menyusul kemudian memanfaatkan kenyataan itu dengan mengukuhkan kekuasaan raja-raja (para *mara'dia*) di bawah struktur penguasa militer Jepang.¹²⁴

Sambutan itu tidak terlepas dari keberhasilan tentara Jepang mematahkan pertahanan pasukan Belanda dan menguasai seluruh Hindia Belanda dalam waktu yang singkat. Hal ini memberikan gambaran bahwa betapa berani dan hebatnya tentara Jepang. Kedatangan tentara Jepang juga diterima dengan baik oleh penduduk karena Jepang memanfaatkan keadaan seperti ramalan Jayabaya yang mengissukan akan datang juru selamat yang berkulit kuning. Kemenangan Jepang dalam perang dan pelayanan orang-orang Jepang (tuan toko) yang memberikan pelayanan kepada penduduk yang begitu baik membuat penduduk pun sangat simpati kepadanya. Di samping itu, sikap Jepang yang berusaha menjalin kerjasama dengan golongan pergerakan nasional dan bermurah hati memberikan kedudukan atau jabatan pada pemerintahan sipil tentara pendudukan Jepang, meyakinkan penduduk bahwa benar Jepang Pembela Asia dan berkewajiban memerdekakan Asia. Ini jelas dinyatakan dalam Undang-undang No. 1 yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan Jepang setelah Batavia (Jakarta), pusat pemerintah Hindia Belanda dikuasainya pada 7 Maret 1942.¹²⁵

¹²⁴ Sementara pihak pemerintah Hindia Belanda mendapat serangan yang begitu dahsyat dari pihak tentara Jepang sampai di daerah pertahanan Belanda di Camba (Maros) dan Enrekang. Namun pasukan Belanda tidak mampu mempertahankan kedua benteng pertahanan tersebut dan memilih menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang (Kadir, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan ...*, hlm. 106-107); Rukka, Muh. Yusuf. 1989. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Daerah Balanipa Mandar*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Unhas, hlm. 42.

¹²⁵ Undang-undang tersebut antara lain memuat: *Pasal 1*, bahwa balatentara Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seturunan dengan bangsa

Berdasarkan keterangan Ahmad Daeng Siala, seorang tokoh pergerakan nasional dan mantan Ketua Parindra Cabang Makassar, bahwa mereka (Jepang) langsung mencari golongan pergerakan nasional guna menjalin kerjasama menegakkan kekuasaan tentara pendudukan Jepang. Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berhasil dihubungi atau dipengaruhi oleh pihak Jepang diberikan kedudukan yang baik pada struktur pemerintahan sipil tentara pendudukan Jepang seperti Ahmad Daeng Siala (mantan Ketua Parindra Cabang Makassar), Yusuf Samad (dari PSII Cabang Makassar), dan Nadjamoeddin Daeng Malewa (dari Persatuan Selebes Selatan). Demikian pula kaum bangsawan disertai wewenang untuk melaksanakan kembali pemerintahan kerajaannya dengan pengawasan pembesar Jepang.¹²⁶

Sikap yang ditunjukkan dan kebijakan yang dilakukan pihak Jepang tersebut, memperlihatkan bahwa golongan nasionalis dan

Nippon dan juga hendak mendirikan ketentraman yang teguh untuk hidup dan makmur bersama-sama dengan rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Raya bersama, maka dari balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer bagi sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempatinya, agar mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera. *Pasal 2*, bahwa pembesar balatentara Nippon memegang kekuasaan pemerintah militer yang tertinggi sebagaimana juga kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal. *Pasal 3*, bahwa semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah bagi pemerintah militer. *Pasal 4*, *Ayat 1*: bahwa sekalian pegawai dan penduduk biasa diwajibkan menurut perintah balatentara Nippon dan pembesar pemerintah Nippon. *Ayat 2*, bahwa balatentara Nippon akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Nippon, begitu juga harta benda yang sah dan agama sekalian rakyat yang tidak berdosa. *Ayat 3*, bahwa sekalian pegawai dan rakyat umumnya hendaklah mempercayai balatentara Nippon dan dengan segera lakukan kewajiban masing-masing seperti sediakala. *Ayat 4*, bahwa akan tetapi barang siapa yang melanggar perintah balatentara dan pembesar-pembesar Nippon, atau melakukan ancaman terhadap keamanan umum, menghalang-halangi pekerjaan militer, mengganggu atau menganiaya penduduk bangsa Nippon, dengan sembunyi-sembunyi berhubungan dengan musuh, megacaukan keuangan dan perekonomian, menyembunyikan harta benda dan bahan makanan, ataupun merusak sumber kekayaan tanah, pabrik-pabrik dan sebagainya akan dihukum menurut Undang-undang Hukum Militer. *Pasal 5*, bahwa uang Nippon dan uang militer yang tercetak sebagai rupiah dipergunakan sebagai uang yang sah di seluruh daerah yang telah ditempati oleh balatentara Nippon. *Pasal 6*, bahwa Undang-undang ini mulai berlaku semenjak diumumkan. Poelinggomang, dkk., 2005, *Sejarah Sukawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 84-86.

¹²⁶ Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia ...*, hlm. 72.

para bangsawan di Indonesia, termasuk di jazirah selatan Sulawesi pada khususnya masih mendapat tempat atau diposisikan sebagai golongan berpengaruh, memegang kekuasaan dan kebijakan yang masih dihormati serta dipatuhi. Para pemimpin tentara Jepang benar-benar mengerti bahwa tanpa bantuan para pemimpin bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, apa yang diharapkan tentara Jepang tidak akan berhasil. Oleh karena itu, tentara Jepang berusaha menarik simpatik dan memikat hati rakyat Indonesia, terutama para pemimpin pergerakan kebangsaan dan bangsawan. Kebijaksanaan itu juga karena mereka kekurangan tenaga pegawai. Sesungguhnya pihak pemerintah Jepang telah mengirimkan tenaga pegawai, namun sebagian kapal tumpangan mereka dalam perjalanan menuju Indonesia berhasil dibinasakan oleh pasukan Sekutu.¹²⁷

Namun simpatik dan harapan masa depan yang lebih baik dari rakyat Indonesia dengan kehadiran Jepang itu, nampaknya bagaikan mimpi belaka. Slogan “Nippon-Indonesia sama-sama” dengan segera digantikan dengan “Nippon saudara tua”. Undang-undang No. 2 yang dikeluarkan pada 8 Maret 1942, tampak jelas bahwa pihak pemerintah pendudukan Jepang mulai membatasi ruang gerak penduduk Indonesia.¹²⁸ Sikap pemerintah Jepang yang

¹²⁷ Selain itu, sikap pemerintah pendudukan Jepang yang membolehkan dikibarkannya Sang Saka Merah Putih berdampingan dengan bendera Jepang *Kokki*, dan melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengundang simpatik dan dukungan penduduk terhadap pihak Jepang. Oleh karena itu, propaganda Jepang yang dilakukan oleh pegawai-pegawai sipil dengan mendirikan organisasi pergerakan Tiga A, yang terkenal dengan sombonyan, “Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia” mendapat tempat dalam sanubari penduduk Indonesia. Itulah sebabnya kehadiran tentara Jepang diterima dan dieluelukan di mana-mana. Bahkan Nippon-Indonesia sama-sama, merupakan ungkapan kata yang senantiasa terdengar di kalangan masyarakat. Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 87.

¹²⁸ Dalam Undang-undang itu antara lain dinyatakan bahwa untuk sementara dilarang berserikat, berkumpul, berpropaganda bagi musuh dan menempelkan plakat, menyiarkan kabar angin dan omong kosong, menyeberang ke pulau lain tanpa surat izin, mendengar siaran radio musuh dan merusak atau membawa lari barang-barang yang disegel oleh balatentara Jepang. Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 88.

lebih tegas lagi membatasi gerak rakyat Indonesia, jelas dinyatakan dalam Undang-undang No. 3 dan No. 4 yang dikeluarkan pada 20 Maret 1942. Dalam Undang-undang No. 3 antara lain dinyatakan larangan untuk sementara perbincangan, pergerakan, penganjuran dan propaganda mengenai peraturan dan susunan negara. Undang-undang ini menunjukkan adanya larangan berpolitik dalam bentuk pergerakan nasional dan kebangsaan. Selanjutnya Undang-undang No. 4 lebih mempertegas keinginan Jepang menampakkan pengaruh dan kekuasaannya.¹²⁹ Bahkan ketika bantuan tenaga pegawai berhasil didatangkan dari Jepang pada Agustus 1942, pelaksanaan hubungan kerjasama yang dilakukan pada awal kedatangan tentara pendudukan Jepang semakin diperketat dengan mengakhiri masa pemerintahan sementara. Sejak itu pejabat pemerintah bumi putra ditempatkan secara langsung berada di bawah pengawasan seorang pejabat Jepang.

Penataan pemerintahan Jepang di Indonesia pada umumnya dan di jazirah selatan Sulawesi pada khususnya, mempergunakan sistem tradisional atau sistem pemerintahan lokal yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini sistem kerajaan yang dilaksanakan selama ini dianggap akan lebih mempermudah menarik simpatik rakyat. Hal yang demikian ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu dengan menghidupkan kembali sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. Pada intinya pemerintah Jepang mencoba untuk merangkul kelompok bangsawan yang memiliki pengaruh

¹²⁹ Undang-undang ini mewajibkan hanya bendera kebangsaan Jepang (*Kokki*) yang boleh dikibarkan dan melagukan lagu kebangsaan Jepang yaitu lagu *Kimigayo*. Hal ini berarti bendera banhwa Merah Putih dan lagu Indonesia Raya dilarang dikibarkan dan dikumandangkan. Kemudian pada tanggal 1 April 1942, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan penggunaan waktu sesuai dengan waktu Jepang, penggunaan tarikh (tanggal) *Sumera* (tarikh Jepang) dan merayakan hari raya *Tencosetsu* setiap tahun, yaitu upacara peringatan hari lahirnya *Hirohito*. Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 88.

besar dalam masyarakat. Hal ini makin dipermudah karena golongan bangsawan yang ada juga adalah kelompok nasionalis. Mereka inilah yang dianggap dapat membantu pihak Jepang dalam menjalankan roda pemerintahannya.¹³⁰

Meskipun demikian kerjasama antara pihak pemerintah Jepang dengan golongan nasionalis, raja dan bangsawan lainnya, dalam penerapannya seringkali terjadi kesalah pahaman. Sebab, pihak Jepang terlalu berharap banyak dari bangsa Indonesia untuk mencapai "Persatuan Asia" di bawah pimpinan Jepang. Sementara pihak Indonesia, kerjasama itu dimanfaatkan untuk mengantarkan Indonesia merdeka, sehingga kerjasama dalam pelaksanaannya tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya adalah saling curiga di antara kedua belah pihak. Apa yang mereka lakukan, secara administrasi kelihatan ada kerjasama, tetapi sebenarnya mereka jalan sendiri-sendiri. Jepang bertindak untuk kepentingan Jepang, demikian juga Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan dengan mempergunakan wadah atau lembaga yang diakui pemerintah Jepang, sebab jalan itulah yang mudah dilakukan.¹³¹

Penataan pemerintahan militer pendudukan Jepang di bekas wilayah Hindia Belanda selanjutnya, disesuaikan dengan pasukan yang diterjunkan untuk menduduki dan menguasai wilayah

¹³⁰ Oleh karena tanpa bantuan para penguasa local (raja-raja) dan kaum nasionalis, cita-cita Jepang tidak akan tercapai terutama dukungan dalam bentuk tenaga (pasukan), bahan industri, bahan keperluan perang, dan logistik termasuk keperluan maskapai penerbangan.

¹³¹ Namun, kita juga tidak dapat pungkiri bahwa adanya orang Indonesia yang betul-betul bekerja untuk Jepang karena merasa diuntungkan oleh Jepang. Apa yang dilakukan orang Indonesia untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, kadang tercium oleh pihak Jepang sehingga lembaga-lembaga yang dipergunakan tidak jarang dibubarkan karena Jepang merasa dirugikan. Itulah sebabnya dalam perkembangan kemudian, Jepang selalu mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang sangat merugikan dan mempersempit ruang gerak rakyat Indonesia. Jepang pun tidak tanggung-tanggung mempergunakan kekerasan ketika peraturan itu dilanggar sehingga terjadilah kekejaman di mana-mana.

itu.¹³² Pemerintah Angkatan Laut (*Kaigun*) Jepang dikenal dengan sebutan *minseifu* yang dikepalai oleh seorang *minseifu-cokan*. Wilayah *minsifu* terdiri atas tiga daerah bagian yang disebut *minseibu* yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram (Maluku), dan masing-masing dikepalai oleh seorang pejabat Jepang yang disebut *minseibucokan*. Daerah *minseibu* terbagi pula menjadi beberapa daerah bagian yang disebut *shu*, *ken*, *bunken*, *gun*, *son*, dan *ku*. Daerah *shu* setingkat dengan keresidenan, daerah *ken* setingkat dengan afdeling, daerah *bunken* setingkat dengan onderafdeling, daerah *gun* setingkat dengan distrik, daerah *son* setingkat dengan onderdistrik, dan daerah *ku* setingkat dengan desa atau kelurahan pada masa kekuasaan Hindia Belanda.¹³³

Demikian pula segala bentuk jabatan dan kekuasaan yang dulu dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda, diambil alih oleh para pejabat militer Jepang. Misalnya, jabatan residen Belanda diganti oleh pejabat militer Jepang yang disebut *shukokan*, jabatan asisten residen Belanda diganti oleh pejabat militer Jepang yang disebut dengan *ken kanrikan*, dan jabatan kontrolir Belanda diganti oleh pejabat militer Jepang yang disebut dengan *bunken kanrikan*. Sedangkan jabatan yang masih tetap dipegang oleh bumiputra adalah kepala distrik yang disebut *guncho*, kepala onderdistrik yang disebut *soncho*, dan kepala desa atau kelurahan yang disebut *kucho*.¹³⁴

¹³² Wilayah Sumatera diserahkan kepada tentara Angkatan XXV dari tentara Jepang yang kemudian tampil sebagai pelaksana kekuasaan di wilayah itu dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. Tentara Angkatan XVI dari tentara Jepang menduduki Jawa dan Madura yang memilih Batavia (Jakarta) sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian Timur berada di bawah Angkatan Laut Jepang dengan menempatkan markas besarnya di Makassar.

¹³³ Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir. 1993. *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim*. Ujung Pandang: Depdikbd, hlm. 145; Jong, L.D. 1987. *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Kesait Blanc.

¹³⁴ Sagimun, M.D. 1985. *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*. Jakarta: Yayasan Idayu, hlm. 32; Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir 1993. *Biografi Pahlawan Haji*

Pada mulanya *minseibu* di Sulawesi yang menangani pemerintahan militer Jepang, tampak masih mengalami kesulitan untuk menata pemerintahan karena kekurangan tenaga pegawai. Oleh karena itu, untuk keresidenan Sulawesi Selatan hanya ditempatkan tiga orang pejabat Jepang untuk urusan sipil.¹³⁵ Namun ketika pemerintah Jepang telah mengirimkan tenaga pegawai untuk membantu pelaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda pada Agustus 1942, maka terjadilah perubahan penataan pemerintahan Jepang di Sulawesi Selatan. Dalam penataan itu keresidenan Sulawesi Selatan dibagi ke dalam enam daerah *ken* (setingkat afdeling). Setiap daerah *ken* dibagi lagi atas beberapa bagian pemerintahan yang disebut *bungen* (setingkat ondefdeling), dan pada masing-masing wilayah itu ditempatkan seorang pejabat pemerintah Jepang yang berkedudukan sebagai *ken kanrikan* dan *bunken kanrikan*.¹³⁶

Untuk memperkuat kedudukan kekuasaan pemerintah militer Jepang, raja-raja atau penguasa lokal pada wilayah tingkat swapraja (*zelfbestuur*) pada masa kekuasaan Hindia Belanda tetap diperkenankan memerintah dan mendampingi *bunken kanrikan* dalam mengatur roda pemerintahan. Para penguasa lokal atau

Andi Mappanyukki...hlm.145.

¹³⁵ Ketiga pejabat Jepang itu adalah seorang untuk bekas Afdeling Makassar yang berpusat di Makassar, seorang di Parepare yang mengawasi pemerintahan sipil untuk bekas wilayah Afdeling Parepare, Afdeling Mandar, dan Afdeling Luwu, dan seorang ditempatkan di Watampone untuk mengawasi pemerintahan sipil untuk wilayah bekas Afdeling Bone dan Afdeling Bonthain.

¹³⁶ Keenam daerah *ken* (afdeling) dalam wilayah keresidenan (*shu*) Sulawesi Selatan itu ialah; Makassar *Ken*, Parepare *Ken*, Luwu *Ken*, Bone *Ken*, Bonthain *Ken*, dan Mandar *Ken*. Makassar *Ken* dengan pusat pemerintahan di Kota Makassar, wilayahnya meliputi Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan, Takalar, dan Jenepono. Parepare *Ken* dengan pusat pemerintahan di Parepare, wilayahnya meliputi Barru, Sidenreng, Rappang, Pinrang, dan Enrekang. Luwu *Ken* dengan pusat pemerintahan di Palopo, wilayahnya meliputi Palopo, Masamba, Malili, Makale, dan Rantepao. Bone *Ken* dengan pusat pemerintahan di Watampone, wilayahnya meliputi Bone, Soppeng, dan Wajo. Bonthain *Ken Kanrikan* dengan pusat pemerintahan di Bonthain, wilayahnya meliputi Bonthain, Bulukumba, dan Sinjai. Mandar *Ken* dengan pusat pemerintahannya di Majene, wilayahnya meliputi Majene, Polewali, Mamasa dan Mamaju. Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 90-91.

raja-raja itu diberi pangkat yang disebut *syucho*. Untuk tingkat distrik, onderdistrik, dan kampung sebutan jabatannya masing-masing secara berurutan dikenal dengan *guncho*, *sancho* dan *kucho*.¹³⁷ Jika diperhatikan secara seksama, maka tampak bahwa pembagian wilayah pada masa pemerintahan Jepang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perubahannya hanya istilah yang digunakan untuk menyebutnya, yaitu dengan menggunakan istilah bahasa Jepang. Dengan struktur pemerintahan ini, pihak pemerintah militer Jepang mengharapkan dapat memanfaatkan semua potensi yang ada dan dengan mudah melaksanakan pengawasan terhadap segala tindakan dan gerakan yang dilakukan oleh rakyat dan pemerintahan bumiputra.¹³⁸

Selain itu, Jepang berusaha pula untuk menyusun kekuatan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri setelah menguasai Asia Tenggara. Penataan di bidang ekonomi itu disebut "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Alat-alat produksi yang telah dihancurkan, kemudian dibangun dan diproduktifkan kembali oleh Jepang dengan mengeluarkan peraturan yang dianggap perlu, seperti pengawasan barang dan pengendalian harga diperketat. Perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, perusahaan transportasi dan telekomunikasi, dan

¹³⁷ Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, 1993. *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki...* hlm.146.

¹³⁸ Hal ini memberikan petunjuk bahwa kehadiran Jepang bukan untuk membela dan memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, tetapi menggantikan kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Semua jabatan dahulu yang dijabat oleh pegawai berkebangsaan Belanda sekarang merupakan tempat bagi pejabat berkebangsaan Jepang. Dengan demikian sistem pengawasan kolonial yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda juga berlaku pada periode pemerintahan Jepang. Namun demikian, untuk menetralsir dirinya agar tidak dianggap sebagai penjajah, pihak Jepang melancarkan teori "Saudara Tua" dan "Saudara Muda", dengan maksud agar dapat menarik simpatik rakyat, karena akan merasakan bahwa mereka satu keluarga dengan Jepang. Bangsa Jepang sebagai saudara tua berkewajiban memimpin rakyat Indonesia yang merupakan saudara muda ke arah kemajuan, karena itu dibutuhkan kerja sama.

lain-lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh pemerintah Jepang. Walaupun demikian, tampak bahwa perubahan slogan dari “Nippon-Indonesia sama-sama” menjadi “Nippon saudara tua” telah menimbulkan kecurigaan rakyat terhadap maksud baik yang selalu didengung-dengungkan oleh pihak Jepang.¹³⁹

Pihak Jepang sesungguhnya berkeinginan keras untuk dapat memenangkan Perang Pasifik yang sedang berkecamuk. Itulah sebabnya mereka berusaha melaksanakan pemerintahan dengan tangan besi. Rakyat dipaksa untuk mengerjakan lahan-lahan pertanian pemerintah, perkebunan kapas, dan membuat benteng-benteng pertahanan seperti di Bira, Enrekang, Rantepao, Palopo dan lainnya. Di samping paksaan untuk menjadi *romusha*, dan keadaan ekonomi yang semakin memburuk akibat terhentinya impor barang-barang kebutuhan, pihak pemerintah Jepang melaksanakan pula tindak kekerasan untuk mengambil produksi penduduk, tanpa mempertimbangkan apakah tersedia makanan bagi penduduk atau tidak. Tindakan-tindakan itu mengakibatkan terjadinya penderitaan yang buruk di kalangan penduduk dan memudahkan rasa simpati dan hormat terhadap pemerintah militer Jepang.¹⁴⁰

Kenyataan itu mendorong pihak pemerintah Jepang untuk mengimbangi segi-segi negatif yang terjadi akibat tindakannya pemerintah tangan besi, dengan berusaha menggugah penduduk bersimpatik kepadanya mereka. Itulah sebabnya pemerintah

¹³⁹ Kecurigaan itu tidak terlepas dari beberapa tindakan pihak Jepang, seperti melarang mengibarkan bendera Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengadakan pertemuan, mengadakan kegiatan politik, dan menerapkan sistem pengawasan pemerintahan ala kolonial Belanda. Di pihak lain, rakyat diwajibkan hanya mengibarkan bendera Jepang, melagukan lagu kebangsaan Jepang, memberikan penghormatan setiap hari kepada *Tenno Heika* di Tokyo dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit, dan bekerja keras untuk kepentingan Jepang. Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 91.

¹⁴⁰ Kadit, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia...*, hlm. 77.

Jepang mendatangkan tokoh-tokoh ulama berkebangsaan Jepang yang menganut ajaran agama yang sama dengan penduduk. Untuk itu maka didatangkanlah H. Umar Faisal untuk memikat golongan penduduk di jazirah selatan Sulawesi yang beragama Islam. Untuk golongan Protestan didatangkan pendeta Miahira, dan untuk golongan Katolik disinggahkan imam Katolik yang dalam perjalanan ke Flores yaitu Aloysius Ogihara SJ dan Paulus Yamaguchi Uskup Nagasaki. Selain itu, pemerintah Jepang juga kembali berusaha membuka sekolah-sekolah yang telah ditutup pada awal pendudukan, baik di tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah maupun sekolah-sekolah kejuruan. Hal ini dilakukan dengan harapan melalui lembaga pendidikan itu, mereka dapat mempengaruhi penduduk untuk memandang bahwa pihak Jepang berkeinginan untuk memajukan penduduk, di samping dapat menanamkan pengaruh Jepang kepada murid sekolah dengan memberikan pelajaran tambahan bahasa Jepang dan senam pagi (*taiso*) ala Jepang sebelum masuk ke kelas.¹⁴¹

Meskipun demikian usaha-usaha itu dan dominasi politik pemerintah militer Jepang telah menciptakan perubahan sosial dengan cepat yang memungkinkan lahirnya pergolakan sosial.

¹⁴¹ Itulah sebabnya pemerintah Jepang memerintahkan para pelajar mengikuti upacara penaikan bendera Jepang diiringi dengan lagu kebangsaan "Kimigayo" dan memberi hormat kepada *Teruo Heika*. Demikian pula di sekolah-sekolah selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di samping bahasa Jepang. Hal ini memberikan petunjuk bahwa seseorang yang banyak mengetahui kebudayaan Jepang termasuk kelancaran berbahasa Jepang dapat memperoleh kedudukan tinggi. Adapun jenis-jenis sekolah yang ada di daerah ini pada masa itu terdiri atas *Futsu Kogakko* (sekolah dasar tiga tahun), *Futsu Jokyū Kogakko* (sekolah dasar enam tahun), *Jokyū Kogakko* (sekolah dasar sambungan tiga tahun), *Sihon Gakko* (sekolah guru menengah), dan *Tokubetsu Cugakko* (sekolah menengah istimewa yang hanya menerima anak-anak bangsawan). Selain itu, pemerintah *Kaigun* di Makassar mendirikan *Sen In Kunrensyō*, yaitu Sekolah Latihan Pelayaran untuk mendidik pemuda-pemuda Indonesia yang kelak dapat membantu *Kaigun*. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pada zaman kemerdekaan banyak di antara mereka masuk pada militer inti Angkatan Laut Republik Indonesia. Pemerintah Jepang juga membuka Perguruan Islam yang dinamakan *Kokyo Gakuin*, yaitu Madrasah Jamiatul Islamiyah di bawah pimpinan Haji Umar Faizal (orang Jepang) dibantu oleh tenaga ulama Islam K.H. Muh. Akib dan K.H. Darwis Zakaria. Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan*, hlm. 92-93.

Oleh karena pemerintah militer Jepang, bukan hanya menguasai sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga mengakibatkan terdesaknya lembaga politik tradisional yang sangat dihormati rakyat. Hal ini yang antara lain menimbulkan terjadinya ketegangan dan pertentangan atau konflik, baik sifatnya tertutup maupun yang terbuka dengan penguasa Jepang. Bahkan tidak jarang pula pemerintah militer Jepang mengobrok-abrik tatanan kehidupan masyarakat. Demikian juga kebudayaan rakyat telah banyak ditiadakan oleh pemerintah Jepang, bahkan dilarang sehingga terkadang kesabaran rakyat tidak mampu terbendung lagi dalam bentuk protes atau gerakan perlawanan.

Kedatangan pemerintah militer Jepang di Mandar dan di Alu pada khususnya, telah merubah tatanan dan pranata tradisional masyarakat setempat yang selama ini telah berlaku dan dihormati. Pada mulanya semua dapat berjalan dengan baik, namun lambat laun mulai tergeser dan diganti dengan beberapa kebijakan pemerintah militer Jepang yang sangat merugikan rakyat dan tentu menguntungkan pihak Jepang. Mereka telah megobrok-abrik kehidupan sosial rakyat pedesaan terutama dalam bidang kebudayaan dan pertanian, seperti adanya paksaan-paksaan untuk menarik pajak dan hasil pertanian rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa pertanian dan perkebunan merupakan urat nadi kehidupan mereka di pedesaan sehingga rakyat melakukan tindakan spontanitas, baik itu sifatnya protes maupun tindakan fisik. Sementara tindakan itu tidak direspon baik oleh pemerintahan militer Jepang. Bahkan dalam banyak hal, pemerintah setempat terkadang memihak kepada pemerintah Jepang karena mereka merasa diuntungkan, sedangkan di pihak lain mendapat tekanan langsung dari Jepang.¹⁴²

¹⁴² Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan...*, hlm. 96.

Tindakan Jepang yang memaksa rakyat untuk membayar pajak, menyeter hasil pertanian dan perkebunan mereka, meluangkan waktunya untuk kerja *romusha*, termasuk kewajiban hormat kepada Kaisar Jepang, dan kewajiban-kewajiban lainnya, dianggap sangat memberatkan oleh rakyat. Simpati masyarakat terhadap Jepang mulai berkurang. Masyarakat Mandar sudah mulai tidak senang, utamanya ketika polisi Jepang memasuki Alu dan mengambil hasil panen dengan paksa pada tiap-tiap rumah penduduk, termasuk rumah salah seorang tokoh masyarakat Hammad Saleh Puangna I Sudding. Kejadian tersebut memicu terjadinya konflik atau rakyat melampiaskan kemarahannya dengan melakukan perlawanan yang selanjutnya menjadi penyebab langsung dari pemberontakan rakyat Alu.

Gerakan perlawanan rakyat Alu di bawah pimpinan Hammad Saleh, berawal ketika ada warga Alu yang disiksa oleh aparat pemerintah militer Jepang. Penyiksaan itu dilakukan karena ia tidak menyerahkan hasil pertanian dan perkebunannya sehingga dianggap menolak untuk membayar pajak. Tindakan keras yang dilakukan oleh aparat pemerintah Jepang pada akhir Maret 1945 itu, tidak menyurutkan ketidaksenangan dan sikap pembangkangan rakyat Alu, bahkan mereka semakin marah. Hal inilah yang mendorong pemuda-pemuda Balanipa, termasuk rakyat Alu mengorganisasikan diri untuk membangun kekuatan menentang aparat pemerintah Jepang. Mereka bersepakat untuk tidak membayar pajak secara kolektif, termasuk tidak mau melakukan setoran-setoran hasil bumi mereka dan menghindari "kerja paksa" yang diperintahkan. Bukan hanya itu karena sebagian rakyat menyembunyikan hasil pertanian mereka di hutan agar tidak diketahui oleh aparat pemerintah Jepang.¹⁴³

¹⁴³ Arsip NIT, No. 140, *Inlictingen Rapport* Hammad Saleh pada 30 Juli 1947, hlm.1; Junaeda,

Sikap pembangkangan rakyat Alu tersebut, bukan hanya semakin meningkatkan kemarahan aparat-aparat pemerintah Jepang, tetapi juga semakin merisaukan Mara'dia Balanipa Andi Baso Pabiseang. Itulah sebabnya Hammad Saleh bersama rakyat Alu meninggalkan perkampungan dan bersembunyi di hutan atau pegunungan ketika mengetahui bahwa aparat-aparat Jepang akan datang menagih pajak. Ketika aparat Jepang datang dan melihat perkampungan dalam keadaan kosong karena ditinggalkan penduduk, membuat mereka semakin jengkel dan marah. Oleh karena itu, mereka kemudian mengobrak-abrik sejumlah rumah yang kosong ditinggal penghuninya, termasuk rumah Hammad Saleh pada awal April 1945. Meskipun demikian tidak membuat rakyat Alu tunduk dan patuh, bahkan Hammad Saleh dan para pendukungnya semakin menunjukkan sikap perlawanannya terhadap pemerintah militer Jepang.¹⁴⁴

Setelah mengetahui pembangkangan rakyat Alu tersebut, Mara'dia Balanipa Andi Baso Pabiseang langsung turun tangan dan berangkat ke Alu pada April 1945, untuk mencegah semakin meluasnya gerakan perlawanan itu. Mara'dia Balanipa bersama pengawalnya yang juga disertai sekitar lima puluh orang *jumpo* (polisi Jepang) tidak hanya membujuk rakyat Alu agar loyal pada pemerintah, tetapi juga mengajak Hammad Saleh bersama pengikutnya agar mau bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Dalam pertemuan itu, antara lain dikisahkan bahwa

ST. 2001. *Pemberontakan Petani Allu ...*, hlm. 101-102.

¹⁴⁴ Berdasarkan keterangan Hammad Saleh yang dikutip dari hasil wawancara dengan Darwas Rasyid di Alu pada tanggal 27 Juni 1990, antara lain disebutkan bahwa "Ketika malam telah tiba, selepas Maqrib menjelang shalat Isya, kami beberapa puluh orang-orang Allu kembali memasuki Kampung Timbu yang terletak di pinggir Sungai Mandar, dari persembunyian di hutan karena kami memang sudah bertekad tidak mau patuh, tunduk dan siap melawan kepada orang-orang Jepang beserta aparat-aparatnya, walaupun sebenarnya ia orang-orang Mandar sendiri. Di Kampung Timbu kami mendapati rumah-rumah penduduk sudah tidak karuan lagi isi dan bentuknya. Bahkan ada satu- dua rumah terbongkar atapnya dan tangganya pun lepas dari rumah induknya" (Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu ...*, hlm. 47).

Hammad Saleh hanya dapat bekerjasama dan bersedia membujuk rakyat apabila ada jaminan bahwa aparat-aparat pemerintah Jepang tidak akan bertindak semena-mena mengambil harta milik rakyat lagi. Namun karena tidak jaminan baik dari Mara'dia Balanipa maupun aparat-aparat pemerintah militer Jepang, sehingga Hammad Saleh bersama rakyat Alu tetap menunjukkan sikap resistensinya.¹⁴⁵

Sikap tegas Hammad Saleh bersama rakyat Alu itu, membuat aparat-aparat Jepang sangat kecewa termasuk Mara'dia Balanipa. Itulah sebabnya Hammad Saleh bersama beberapa orang pengikutnya ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Tinambung dan ditahan di pusat pemerintahan Kerajaan Balanipa tersebut. Oleh karena Hammad Saleh memperoleh informasi bahwa mereka akan dikirim ke luar Sulawesi untuk dipekerjakan sebagai *romusha*, sehingga bersama pengikutnya berusaha meloloskan diri dari tahanan. Berkat usaha itu, Hammad Saleh bersama 17 orang pengikutnya berhasil meloloskan diri dari tahanan dan kembali ke Alu pada dini hari 7 April 1945. Atas kejadian itu, Hammad Saleh bersama pengikutnya bukan hanya dinyatakan sebagai buronan, tetapi mereka juga dianggap sebagai pembangkang, pengacau, perusuh, dan perampok oleh pemerintah militer Jepang. Rakyat dihasut untuk turut serta memusuhinya, namun justru semakin menarik simpati rakyat terhadap gerakan perlawanan Hammad Saleh bersama pengikutnya.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Alu tersebut, Andi Baso Pabiseang yang bertindak selaku Mara'dia Balanipa atau *Sincho* atas pengangkatan penguasa militer Jepang, meminta kepada Hammad Saleh untuk membujuk rakyat Alu tidak lagi melakukan pembangkangan, mencegah kekacauan, menjaga ketertiban dan keamanan di Balanipa. Namun bujukan Mara'dia Balanipa itu ditolak oleh Hammad Saleh, bahwa "Bagaimana saya mau menerima bujukan itu kalau ia (Mara'dia Andi Baso) tidak mau menjamin pula bahwa orang-orang Jepang tidak akan lagi bertindak semena-mena mengambil harta rakyat" (Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Alu ...*, hlm. 47). Arsip NIT, No. 140, *Inlichtingen Rapport* Hammad Saleh pada 30 Juli 1947, hlm.1-2.

¹⁴⁶ Arsip NIT, No. 140, *Inlichtingen Rapport* Hammad Saleh pada 30 Juli 1947, hlm.2; Junaeda,

Taktik dan strategi pemerintah militer Jepang untuk menangkap dan menghancurkan gerakan perlawanan itu belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena Hammad Saleh bersama para pengikutnya bukan hanya memperoleh simpati dari sejumlah tokoh masyarakat, tetapi mereka juga mendapat dukungan secara aktif dari rakyat yang ditandai dengan kesediaan mereka untuk bergabung dan siap berkorban, baik harta benda maupun jiwa dalam perjuangan menentang aparat pemerintah militer Jepang. Rakyat mengenal betul siapa Hammad Saleh dan tujuan perjuangannya dalam menentang kesewenang-wenangan aparat pemerintah Jepang terhadap rakyat, yang senantiasa melakukan pemungutan hasil-hasil bumi dan produksi lainnya secara paksa dengan alasan pembayaran pajak. Itulah sebabnya Atjo Potjer dan para pengikutnya ikut serta bergabung dengan gerakan perlawanan Hammad Saleh, sehingga para aparat pemerintah militer Jepang semakin marah dan berusaha untuk menangkap atau menumpas gerakan perlawanan tersebut.¹⁴⁷

Usaha-usaha penangkapan yang dilakukan oleh aparat pemerintah militer Jepang tersebut, menyebabkan suasana semakin tegang dan mencekam. Mereka senantiasa mengintai gerakan Hammad Saleh bersama pengikutnya dan setiap saat siap melakukan pengungkapan. Namun karena kelihaihan dan penguasaan atau pengenalan medan serta dukungan penuh dari rakyat Alu, sehingga mereka tetap dapat meloloskan diri dari sergapan aparat Jepang. Bahkan aparat Jepang terkadang atau sering

ST. 2001. *Pemberontakan Petani Allu ...*, hlm. 104; Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu ...*, hlm. 48.

¹⁴⁷ Arsip NIT, No. 140, *Inlictingen Rapport* Atjo Potjer pada tanggal 4 dan 6 Agustus 1947. Sedangkan menurut Hammad Saleh yang disampaikan kepada Darwas Rasyid bahwa ikut bergabungnya Atjo Potjer bersama anak buahnya dalam gerakan itu membawa konsekuensi, yaitu dicap sebagai perampok oleh penguasa militer Jepang. Oleh karena saya melindungi anak buah Haji Dewa yang bernama Atjo Potjer yang sering pergi merampok (Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu ...*, hlm. 48-49).

memperoleh informasi yang salah dari rakyat tentang tempat persembunyian Hammad Saleh bersama pengikutnya. Rakyat Alu yang dimintai keterangan tentang tempat persembunyian Hammad Saleh, pada umumnya hanya menjawab “tidak tahu” atau menunjukkan arah yang sebaliknya mengenai keberadaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Alu memberi dukungan terhadap gerakan itu dan tidak memperdulikan lagi konsekuensi dari sikapnya menentang kekuasaan militer Jepang.¹⁴⁸

Suasana tegang dan mencekam senantiasa mewarnai kehidupan rakyat Alu, sebab bentrokan fisik antara aparat pemerintah Jepang dengan Hammad Saleh bersama pengikutnya tampaknya sudah tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena aparat-aparat Jepang yang melakukan pengintaian berhasil mengetahui keberadaan Hammad Saleh bersama pengikutnya sedang berkumpul dalam sebuah rumah di Kampung Timbu (Alu). Pada pertemuan dalam rangka membicarakan rencana selanjutnya yang dihadiri 12 orang, antara lain Hammad Saleh, Pano (saudara Hammad Saleh), Repas, Coing, Lamua, Masser, Kaco Pada, Puangna Sondeng, La Mappe (asal Bugis-Bone), Sokong, Juhani, dan Angga. Sementara pertemuan berlangsung, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar “Jangan ada yang bergerak, menyerah dan semua keluar”. Mendengar teriakan itu secara spontanitas mereka langsung mengambil senjata lalu menyerang aparat (polisi) Jepang yang datang mendobrak pintu depan. Bentrokan pun tidak dapat terhindarkan yang mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Arsip NIT, No. 140, *Inlictingen Rapport* Angga, No. 25/SPN. dd. 30 Juli 1947.

¹⁴⁹ Arsip NIT, No. 140, *Inlictingen Rapport* Hammad Saleh, No. 22/SPN. dd. 30 Juli 1947. Pada peristiwa tercatat seorang anggota polisi Jepang yang bernama Yasir tewas ditempat dan dua anggota polisi Jepang lainnya mengalami luka berat, yaitu Sakka da Sulai. Namun keduanya akhirnya juga meninggal dalam perawatan rumah sakit Jepang di Majene. Sementara anggota Hammad Saleh hanya mengalami luka ringan (Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat*

Untuk menghindari bentrokan yang lebih parah, Hammad Saleh bersama para pengikutnya melarikan diri masuk ke hutan. Sementara itu pihak Jepang semakin memperketat penjagaan dan pencarian terhadap Hammad Saleh yang dianggap sebagai otak dari peristiwa tersebut. Pihak Jepang menganggap mereka sebagai perampok, perusuh, dan pengacau. Hal itu sangat bertentangan dengan masyarakat Mandar khususnya Alu yang menganggap Hammad Saleh sebagai pahlawan. Peristiwa itu mendorong Mara'dia Andi Baso Pabiseang kembali mendatangi Alu bersama sekitar 100 orang aparat Jepang. Kedatangan mereka bukan hanya untuk menangkap Hammad Saleh bersama pengikutnya, tetapi juga untuk menumpas gerakan perlawanan itu. Namun yang dicari tidak ditemukan, sehingga Andi Baso Pabiseang meninggalkan Alu dan kembali ke Tinambung dengan meninggalkan beberapa orang polisi Jepang untuk tetap berjaga-jaga di Alu. Mereka pun mengancam dan memaksa rakyat untuk membantu mencari Hammad Saleh bersama pengikutnya demi menjaga ketertiban dan keamanan.¹⁵⁰

Gerakan perlawanan Hammad Saleh bersama rakyat Alu terhadap penguasa militer Jepang di Mandar, merupakan kenyataan yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah militer Jepang. Pihak Jepang menyusun kekuatan untuk menangkap Hammad Saleh dan pengikut-pengikutnya yang bersembunyi di hutan, namun tetap tidak berhasil hingga mereka angkat kaki dari Mandar. Dalam upaya menumpas gerakan perlawanan itu, pihak Jepang menderita kerugian dengan tewasnya tiga orang polisi Jepang. Peristiwa itu ternyata membakar semangat pengikut-pengikut Hammad Saleh, sehingga mereka tidak segan-segan

Allu ..., hlm. 50).

¹⁵⁰ Arsip NIT, No. 140, *Inlictingen Rapport* Noehoeng, No. 21/SPN. dd. 30 Juli 1947; Junaeda, ST. 2001. *Pemberontakan Petani Allu ...*, hlm. 105..

melakukan penyerangan terhadap pos-pos polisi Jepang. Hal itu memaksa pihak Jepang mengumumkan bahwa Hammad Saleh bersama para pengikutnya adalah pemberontak dan pengacau dengan harapan penduduk dapat memberikan bantuan untuk menangkapnya. Namun demikian, hingga akhir masa pendudukan militer pemerintahan Jepang di Indonesia, Hammad Saleh Puangna I Sudding dan pengikut-pengikutnya masih tetap bebas.¹⁵¹

Hammad Saleh bersama para pengikutnya berada dan bertahan di hutan selama beberapa bulan, karena mereka sama sekali tidak mau menyerah apalagi tunduk kepada pemerintah militer Jepang. Setelah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat pada pihak Sekutu pada pertengahan Agustus 1945, barulah mereka kembali ke Alu. Hammad Saleh Puangna I Sudding setelah kembali dari hutan dan atas perintah Ibu Andi Depu, ia dan beberapa orang pengikutnya kemudian bergabung dengan organisasi perjuangan KRIS Muda Mandar (Kebaktian Islam Muda – Mandar) yang dibentuk di Balanipa pada tanggal 21 Agustus 1945. Organisasi perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Andi Depu ini, bukan hanya bertujuan menegakkan, membela, dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Mandar, tetapi juga dimaksudkan untuk menentang kehadiran dan usaha NICA (Belanda) yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di daerah Mandar pada khususnya.¹⁵²

¹⁵¹ Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan...*, hlm. 98; Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu ...*, hlm. 50).

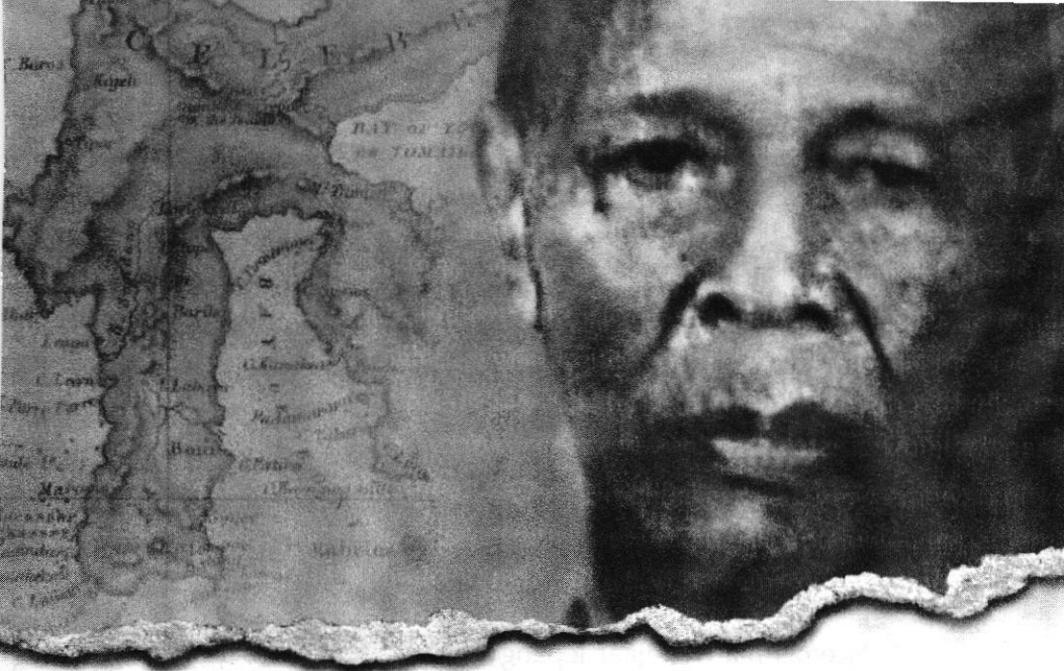
¹⁵² Menurut Darwas Rasyid, bahwa Muhammad Saleh Puangna I Sudding kembali dari hutan dan bergabung dengan KRIS Muda Mandar atas permintaan atau bujukan Mara'dia Ibu Andi Depu. Sebab, Mara'dia Balanipa, Andi Baso Pabiseang (mantan suami Ibu Andi Depu) pada waktu kejadian berseberangan. Bahkan karena dialah sehingga Puangna I Sudding ditangkap

Gambaran tentang gerakan perlawanan Hammad Saleh Pungna I Sudding tersebut, bukan hanya merupakan suatu bukti perlawanan rakyat Mandar (Alu) dalam menentang kekuasaan pemerintah militer Jepang, tetapi juga menunjukkan dinamika semangat perjuangan rakyat di jazirah selatan Sulawesi yang senantiasa berkobar dalam menentang penjajahan. Meskipun gerakan perlawanan itu masih dalam skope lokal – Alu dan tidak sehebat dengan gerakan pemberontakan rakyat di sejumlah daerah di Indonesia, tetapi semangat dan nilai perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Alu di bawah pimpinan Hammad Saleh patut mendapat perhatian. Sebab tidak semua rakyat yang diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat Jepang di wilayah ini dapat atau mampu melakukan perlawanan terhadap penguasa militer Jepang. Padahal kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang, khususnya di wilayah yang berada di bawah kontrol atau kekuasaan angkatan laut Jepang adalah sama dan telah mengakibatkan berbagai bentuk penderitaan bagi masyarakat di kawasan ini. Sampai saat ini hanya rakyat di dua daerah yang tercatat melakukan perlawanan terhadap pemerintah militer Jepang di jazirah selatan Sulawesi, yaitu pemberontakan rakyat Unra di Bone dan pemberontakan rakyat Alu di Mandar. Demikian pula peran Hammad Saleh tidak dapat diabaikan, sebab ia merupakan salah seorang dari segentir tokoh yang berani tampil ke depan untuk memimpin perlawanan menentang kekuasaan pemerintah militer Jepang.¹⁵³

dan dipenjarakan selama sehari (Darwas Rasyid MS., 1986. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu Pada Masa Pendudukan Militer Jepang di Daerah Mandar Tahun 1945*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian, Depdikbud, BKSNT. Kajian lebih lanjut tentang peristiwa ini telah dilakukan oleh ST. Junaeda, 2001. *Pemberontakan Petani Allu 1945: Studi Tentang Gerakan Sosial*. Makassar: Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

¹⁵³ Meskipun demikian, tidak dinafikan bahwa ada tokoh atau pemimpin lain yang juga telah berjuang dan tampil ke depan memimpin rakyat melakukan perlawanan terhadap pemerintah militer Jepang, namun karena keterbatasan data sehingga belum terpublikasikan. Demikian pula

The text is extremely faint and illegible, appearing to be a series of lines of text, possibly a list or a document page. The content is not discernible due to the low contrast and blurriness of the scan.



PERJUANGAN MENENTANG BELANDA

Pemerintah Kerajaan Jepang di Tokyo mengirim berita pernyataan menyerah terhadap Sekutu pada 10 Agustus 1945, setelah dua bom atom secara berturut-turut dijatuhkan di Kota Hiroshima (6 Agustus) dan Nagasaki (8 Agustus). Komandan Tertinggi Sekutu Kawasan Asia Pasifik kemudian mengirim berita balasan kepada Pemerintah Jepang pada 11 Agustus 1945, dan meminta agar pihak Jepang mematuhi keputusan Sekutu. Sebagai bukti kepatuhan Jepang, Mikada atas nama Pemerintah Kerajaan Jepang mengumumkan berita lewat radio pada hari itu, agar bala tentara Jepang segera menghentikan perang melawan Sekutu. Oleh karena Kaisar Jepang bersedia menandatangani piagam perjanjian dengan pihak Sekutu. Penandatanganan piagam perjanjian antara Jepang dan Sekutu, sebagai akibat dari kekalahan itu dilaksanakan pada 15 Agustus 1945.¹⁵⁴

dengan rakyat di daerah-daerah lainnya dalam wilayah jazirah selatan Sulawesi bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka juga melakukan gerakan perlawanan atau memberontakan, tetapi karena belum diperoleh data-datanya sehingga tidak dikenal atau belum dipublikasikan.

¹⁵⁴ Poelinggomang, Edward L. dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Makassar: Kerjasama Masyarakat Sejarawan (MSI) Cabang Sulawesi Selatan dan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 110.

Berita menyerahnya Jepang pada Sekutu itu, membangkitkan semangat nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan dari pemuda-pemudi Indonesia yang menghendaki segera mengumumkan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Atas usul dan desakan dari pemuda, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta di depan wakil-wakil dari seluruh daerah Indonesia di Lapangan Ikada pada pukul 10.00 pagi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut dihadiri pula para utusan dari Sulawesi yang telah menghadiri rapat PPKI di Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kemudian diberitakan ke seluruh pelosok tanah air lewat siaran radio di Kantor Berita Domei hanya selama dua menit, sehingga tidak diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia.¹⁵⁵

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI segera mengadakan sidang untuk mengambil keputusan tentang pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD, dan mengangkat Soekarno dan Hatta, masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.¹⁵⁶ Sidang PPKI selanjutnya diselenggarakan pada 19 Agustus 1945, dan menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu; pembentukan kementerian nasional yang terdiri atas 12 kementerian, pembagian 8 daerah provinsi di Indonesia, dan pengangkatan gubernur di setiap provinsi. Hasil sidang PPKI itu

¹⁵⁵ Oleh karena berdasarkan perjanjian antara Jepang dan Sekutu pada 15 Agustus 1945, bahwa semua urusan sipil di Indonesia pada masa peralihan dari tangan Jepang kepada Sekutu tetap berada dalam kendali pemerintah pendudukan Jepang sampai menunggu kedatangan Sekutu mengambil alih tugas sipil di Indonesia. Itulah sebabnya berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tidak segera diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia.

¹⁵⁶ Patut dikemukakan bahwa Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang disahkan saat itu adalah naskah "Mukaddimah dan Rancangan UUD". Keduanya telah disetujui pada Sidang II BPUPKI, tetapi dengan beberapa perubahan yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan yang dimaksud terutama menyangkut pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta atau Mukaddimah, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

memutuskan bahwa yang diangkat sebagai Gubernur Sulawesi adalah Dr. G.S.S.J Ratulangi. PPKI menyelenggarakan sidang selanjutnya pada 22 Agustus 1945. Para peserta sidang tersebut berhasil mensahkan berdirinya Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.¹⁵⁷

Utusan Sulawesi yang menghadiri sidang PPKI kembali ke Makassar pada 24 Agustus 1945. Mereka disambut antara lain Nadjamoeddin Daeng Malewa, Lanto Daeng Pasewang, Tadjuddin Noer, dan Manai Sophian.¹⁵⁸ Para utusan Sulawesi ini, bukan hanya membawa berita resmi tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga berita tentang pengangkatan Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi. Namun berita itu tidak segera tersebar luas di masyarakat karena pemerintah militer Jepang merintanginya, sebagai konsekuensi dari perjanjian dengan pihak Sekutu sebelumnya. Kekuatan militer masih dikuasai oleh tentara Jepang. Organisasi *Heiho* dan organisasi-organisasi pemuda lain yang dibentuk semasa pemerintah militer Jepang berkuasa tidak pernah dipersenjatai. Hal inilah yang menghambat penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kepada masyarakat umum, sehingga berita itu tidak diketahui secara luas di jazirah selatan Sulawesi.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, baca, Slamet Soetrisno, *Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah: Polemik Piagam Jakarta, Kudeta Nasution 17 Oktober 1952, Dalam Gerakan 30 September 1965, Pencipta Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2006; baca, Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1950; baca, Yamin, *Naskah ... op., cit.*, hlm. 400-402; baca, A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pembuatan UUD RI Tahun 1945*, dalam J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, Disertasi Doktor, 1984.

¹⁵⁸ Barbara S. Harvey, *op. cit.*, hlm. 132. Menurut laporan yang membahas tentang rapat PPKI bahwa rapat baru ditutup pada tanggal 23 Agustus 1945, setelah rapat terakhir pada tanggal 22 Agustus 1945 yang membicarakan pembentukan PNI, Komite Nasional, dan Badan Keselamatan Rakyat. Baca: S.R. van der Wall, *Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesie betrekking, 1945-1950*, Jilid. I ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1971), hlm. 544.

¹⁵⁹ Dalam surat Zainal Abidin (PKRS) pada 16 Agustus 1946 yang disampaikan kepada

Gubernur Ratulangi mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di Makassar pada akhir Agustus 1945. Rapat itu dihadiri antara lain: Nadjamoeddin Daeng Malewa, Lanto Daeng Pasewang, dan H.A.S. Daeng Muntu. Setelah melalui perdebatan yang alot antara semua peserta rapat, yang beberapa di antara mereka mengeritik Gubernur Ratulangi atas kebijakan beliau dan kelambanannya menyatakan diri sebagai Gubernur Sulawesi yang kurang berdaulat penuh menjalankan pemerintahannya mengingat pemerintahan Republik Indonesia telah sah berdiri, akhirnya para peserta rapat itu berhasil menyusun susunan pemerintahan Sulawesi sebagai berikut:

Gubernur	: Dr. G.S.S. Ratulangi
Sekretaris	: Mr. A. Zainal Abidin
Wakil Sekretaris	: F. Tobing
Biro Umum	: Lanto Daeng Pasewang
Biro Ekonomi	: Mr. Tadjuddin Noer
Biro Pemuda	: Siaranamual dan Saelan
Biro Penerangan	: Manai Sophian
Pembantu-Pembantu	: A.N. Hadjarati, G.R. Pantouw, Sam, Supardi, Pondaag, Dr. Sjafri, M. Saleh Lahade. ¹⁶⁰

Terbentuknya susunan pemerintahan tersebut, melapangkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengangkatan Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi diketahui oleh masyarakat luas di Sulawesi. Jabatan pemerintahan yang sebelumnya dijabat

Komisariat Daerah Sulawesi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, memberitakan bahwa sepulang menghadiri rapat PPKI di Jakarta, Gubernur Ratulangi sulit melaksanakan perintah Presiden Soekarno yang seharusnya mengambil alih jalannya pemerintahan RI secara berdaulat yang dari tangan *Minseibu*. Dalam surat itu juga dilaporkan bahwa para elit bumiputra diberikan kedudukan yang pernah dijabat staf pemerintah pendudukan Jepang, namun pihak Jepang tetap duduk sebagai penasehat. Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang masih memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Sulawesi. Sumber Arsip: ARA (*Algemeen Rijksarchief*), "*Verslag betreffende Politieke achtergrond der versetsactie in Zuid Celebes*".

¹⁶⁰ Kadir, Harun dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan...*, hlm 149.

oleh staf pemerintah militer Jepang seperti *Ken Kanrikan* dan *Bunken Kanrikan* di berbagai daerah beralih ke tangan pejabat bumiputra, dan mereka segera menjalankan pemerintahan tanpa mengindahkan lagi petunjuk dari pihak Jepang, sekaligus siap menerima perintah dari Gubernur Ratulangi. Pelaksanaan pemerintahan Gubernur Sulawesi dan berbagai daerah di bawah wewenangnya dinyatakan resmi berlaku mulai pada 1 September 1945. Untuk membangun tatanan pemerintahan republik yang lebih baik antara para staf gubernur dan bawahannya di Sulawesi, maka dibentuklah sebuah Dewan Penasehat (*Konen*) dan mengangkat Raja Bone Andi Mappanyukki sebagai Ketua, Dr. Ratulangi sebagai Wakil Ketua, dan beberapa anggota yang terdiri dari para bangsawan dari daerah Gowa, Luwu, Wajo, Soppeng, Sidenreng, Malusetasi, dan Balanipa (Mandar).¹⁶¹

Meskipun demikian sikap Sekutu yang tampil sebagai pemenang dalam Perang Dunia II, tampaknya tidak mengakui sepenuhnya proklamasi kemerdekaan dan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapat dukungan dari Jepang dan proklamasi kemerdekaan serta penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia merupakan tokoh-tokoh yang terlibat kerjasama dengan pihak Jepang. Selain itu, juga karena perumusan pembentukan negara yang dilaksanakan oleh PPKI merupakan wadah ciptaan Jepang. Itulah sebabnya pihak Inggris dan Australia yang mewakili Sekutu untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, tampaknya membenarkan keinginan *NICA* (*Nederland Indische Civil Administratie*) yang hendak memulihkan kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial

¹⁶¹ Sumber Arsip: ARA (Algemeen Rijksarchief), "*Verslag betreffende Politieke Achtergrond der verzetsactie in Zuid Celebes*".

Belanda di Indonesia. Atas kebijakan Sekutu yang menempatkan *NICA* sebagai bagian yang integral dari pasukan Sekutu dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia, lambat laun aparat-aparat *NICA* berhasil memperkuat kedudukannya di Indonesia, termasuk di daerah Mandar.¹⁶²

Patut dikemukakan bahwa Sekutu tiba di Indonesia pada September 1945, dan pasukan yang pertama mendarat di Makassar berasal dari Brigade XXI Australia pada 21 September 1945. Di antara pasukan Australia itu, terdapat pula aparat-aparat *NICA* di bawah pimpinan Mayor J.G. Wegner. Bahkan sebagian besar pasukan yang mendarat itu adalah aparat-aparat *NICA*. Mereka merupakan pemerintahan persiapan yang dibentuk oleh Belanda di Australia yang berencana memerintah kembali Indonesia ketika Sekutu sudah di ambang kemenangan perang melawan Jepang dengan cara meleburkan diri dengan pasukan Sekutu yang datang ke Indonesia. Tindakan politik *NICA* itu disebabkan adanya kekhawatiran Belanda yang tidak dapat lagi memerintah Indonesia, sebab berdasarkan perjanjian *Atlantic Charter*, bahwa negeri-negeri yang merupakan jajahan negara-negara fasis (Jerman, Italia, dan menyusul Jepang) yang kalah perang berhak membentuk pemerintahan sendiri.¹⁶³ Itulah sebabnya H.J. van Mook tatkala mengetahui Sekutu sudah pasti menang perang melawan Jepang, ia membentuk *NICA* di Australia. *NICA* mengu-

¹⁶² Kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang tertuang dalam *Civil Affaire Agreement*, pada intinya menerima dan menempatkan *NICA* sebagai bagian yang integral dari pasukan Sekutu dalam melaksanakan tugas di Hindia Belanda (Indonesia). Sesungguhnya pembicaraan ini telah dilakukan antara Van Mook dengan Mac Athuur sejak Desember 1944. Namun kesepakatan ini baru disahkan pada tanggal 24 Agustus 1945 (Poelinggomang, Edward L. 2000. "Militer dan Budaya Politik Indonesia", dalam *Dunia Militer di Indonesia, Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*, dalam Yogyakarta: Gadjag Mada University Press, hlm. 44; Ijzereef, Willem. 1984. *De Zuid Celebes Affaire, Kapitein Westerling en de Standrechtelijke Executie*. Deren: De Battafsche Leeuw, 1984, hlm. 17).

¹⁶³ Agung, Ide Anak Agung Gde. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 4-5.

sulkan agar pemerintah Belanda mengadakan perjanjian dengan Inggris. Hal itu menjadi kenyataan ketika Belanda dan Inggris mengadakan perjanjian *Civil Affairs Agreement* di Chequers, London, pada 24 Agustus 1945. Perjanjian itu mengakui hak *NICA* mengambil alih tugas dan urusan sipil di Indonesia, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak manapun sebagai alat politik Belanda menjajah kembali Indonesia.¹⁶⁴

Gabungan pasukan Sekutu dan *NICA* yang mendarat tersebut, diprotes rakyat karena sebelum mereka tiba, Indonesia sudah terlebih dahulu membentuk pemerintahan sendiri dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kota Makassar misalnya, protes dilakukan dalam wujud demonstrasi dan pengibaran bendera Merah Putih pada 27 September 1945. Perlawanan rakyat setempat menentang kehadiran *NICA* makin menyala-usai pertemuan antara St. Moh. Yusuf dengan beberapa pejuang kemerdekaan di Kampung Layang. St. Moh. Yusuf yang pulang dari Jawa melaporkan bahwa perjuangan rakyat di sana dalam mempertahankan pemerintahan Republik Indonesia yang sudah sah berdiri. Hal tersebut makin membangkitkan gelora api perlawanan rakyat setempat, khususnya pemuda setempat yang melakukan aksi protes dengan memasang tulisan "R.I." di berbagai gedung sebagai tanda bahwa gedung-gedung tersebut adalah hak milik Republik Indonesia.¹⁶⁵

Aksi protes para pejuang pendukung pemerintahan Republik Indonesia tersebut, mendorong Gubernur Ratulangi mendirikan

¹⁶⁴ Nasution. A.H. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid II*. Bandung: Angkasa, hlm. 6; Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan...*, hlm. 54. Patut dikemukakan bahwa ketika tentara Jepang mulai mendarat di Indonesia, H.J. van Mook sudah terlebih dahulu menyingkir dan membentuk pemerintahan Hindia Belanda dalam pelarian Australia.

¹⁶⁵ Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan...*, hlm. 54; Harvey, Barbara S. 1974. *Tradition, Islam and Rebellion in South Sulawesi 1959-1965*. Michigan: Cornell Unibversity, hlm. 136.

organisasi perjuangan yang dikenal Badan Pusat Keselamatan Rakyat (BPKR).¹⁶⁶ Organisasi ini sebagai wadah perjuangan melalui diplomasi dalam mempertahankan pemerintahan Republik Indonesia yang telah sah berdiri. Berbeda halnya dengan sebagian pemuda pejuang yang menghendaki perlawanan fisik atau menempuh cara militer dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, tujuan BPKR adalah menghimpun tokoh-tokoh pejuang dan pendukung republik setempat dalam mempertahankan tetap berdirinya pemerintahan republik sekaligus alat diplomasi politik terhadap pihak Sekutu dan *NICA*.¹⁶⁷ Berbagai aksi protes dan perlawanan yang dilancarkan oleh para pemuda dan pendukung pemerintahan republik terhadap *NICA*, dinilai oleh komandan Sekutu sebagai suatu tindakan yang harus segera ditanggulangi. Untuk mengatasi perlawanan dari pemuda pejuang, maka pasukan Sekutu menahan mereka khususnya yang memakai lencana merah putih. Alasan

¹⁶⁶ Menurut laporan A.Z. Abidin, usaha awal BPKR adalah mendirikan sekolah menengah pertama yang mengganti sekolah-sekolah berkurikulum Jepang menjadi sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi bumiputra. Sekolah kedua yang didirikan adalah Sekolah Rakyat (SR) bulan Januari 1946. Kedua jenis sekolah ini merupakan sekolah resmi bagi rakyat republik. Selain mendirikan sekolah, BPKR juga melakukan tugas diplomasi ke luar, yaitu: (1) berunding dengan *NICA* menyangkut pemerintahan sementara; (2) mengajukan keluhan kesah rakyat perihal tindakan *NICA* kepada Sekutu; (3) melaporkan kepada Sekutu mengenai kondisi di daerah-daerah yang mendukung pemerintah RI (petisi ditandatangani kurang lebih 540 bangsawan, politikus, dan pemuka masyarakat); (4) menjalin hubungan dengan daerah-daerah di luar Sulawesi. Kegiatan-kegiatan BPKR untuk kepentingan internal organisasi meliputi: (1) pembangunan sarana pendidikan, seperti sekolah; (2) penerangan kepada masyarakat mengenai cita-cita republik; (3) pendirian organisasi Pemuda Nasional Indonesia (beralih nama menjadi Pandu Nasional Indonesia); (4) menganjurkan pergerakan nasional; (5) pembangunan dapur umum bagi mantan romusha; (6) pendirian organisasi buruh; (7) menentralkan rakyat; dan (8) berupaya mencari dana bantuan dari rakyat (Poelinggomang, dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan...*, hlm. 120-121).

¹⁶⁷ Di Parepare misalnya berdiri cabang BPKR dan organisasi Penunjang Republik Indonesia (PRI). Ketuanya adalah Andi Makkasau dan wakilnya adalah Abdullah Bau Masepe, yang terdiri dari beberapa pengurus, antara lain: Muh. Said Daeng Masessa, Muh. Amin, Abdul Hamid, Usman Isa, A.J. Binol, Mustafa, Ambo Dohang, Abd. Gafur, dan La Halide. Selain itu, juga didirikan organisasi Pandu Nasional Indonesia (PNI) cabang Parepare yang dikhususkan bagi kaum pemuda pemudi. Mulanya PNI bernama Pemuda Nasional Indonesia, namun atas anjuran Dr. Ratulangi, PNI beralih nama menjadi Pandu Nasional Indonesia (PNI).

penahanan mereka karena diduga melakukan aksi kekerasan terhadap tentara *KNIL* pada 3-5 Oktober 1945.¹⁶⁸

Komandan Sekutu Brigjen Iwan Dougherty kemudian mengusulkan berunding dengan Gubernur Ratulangi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Hasil perundingan tersebut memutuskan bahwa kedua pihak harus menjaga keamanan yang ada di bawah wewenang mereka masing-masing. Dougherty memerintahkan agar orang Belanda, Indo-Belanda, dan Ambon yang dipersenjatai *NICA* tidak keluar dari barak-barak militer mereka. Di lain pihak, Gubernur Ratulangi selaku ketua BPKR melarang pemuda nasionalis melakukan tindakan kekerasan (perlawanan fisik).¹⁶⁹ Namun sebagian besar pemuda menghendaki perlawanan dengan cara fisik, sehingga mereka mendirikan organisasi Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI). Ketua umum organisasi perjuangan ini adalah Manai Sophian dan J. D. Siaranamual sebagai penasehat. Meskipun demikian mereka tidak mampu berbuat banyak, sebab ada dua staf gubernur sebagai pengurus utamanya yang mendukung kebijakan Gubernur Ratulangi yang lebih mengedepankan dialog atau melalui diplomasi daripada melakukan aksi militer dalam menghadapi Sekutu dan *NICA*.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Sesungguhnya serangan yang dilakukan oleh para pemuda pejuang tersebut, merupakan serangan balasan terhadap tentara *KNIL* dan Indo-Belanda yang menembaki kerumunan rakyat di Jalan Pattunang, Ranggong, dan Pisang. Harvey, Barbara S. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar...*, hlm. 114.

¹⁶⁹ Namun hasil perundingan tersebut tidak menyurutkan semangat para pemuda pejuang yang tetap menghendaki berdirinya pemerintahan republik dengan perlawanan fisik (radikal), bahkan semangat juang mereka makin berapi-api. Mereka lalu melakukan strategi perjuangan dengan membentuk kelompok-kelompok pejuang di berbagai lokasi pemukiman penduduk yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.

¹⁷⁰ Beberapa pengurus utamanya antara lain: S. Sunari, M.A. Massiara, Ali Malaka, Aminuddin Muchlis, Bonto Daeng Ngirate, Moon Maricar, Mamang, Maula Daeng Manaba, Sanusi Sitorus, Edy Hidayat, dan Daeng Sipato. Ada sekitar 25 kelompok pemuda pejuang republik yang tersebar di berbagai lokasi Kota Makassar masuk dalam organisasi PPNI. Kadir, Harun. dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan...*, hlm. 156.

Sementara itu berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebar dan diketahui oleh rakyat di jazirah selatan Sulawesi, sehingga rakyat pun menyambut gembira berita itu, baik yang menetap di kota-kota maupun yang menetap di daerah pedalaman, termasuk di daerah Mandar. Sambutan kegembiraan atas berita itu, kemudian disusul dengan dukungan penuh dari rakyat di daerah Mandar terhadap proklamasi kemerdekaan. Dukungan rakyat itu tentu tidak terlepas dari peranan Ibu Andi Depu dan tokoh-tokoh pejuang lainnya dalam kegiatan menyebarluaskan berita proklamasi, dan memberikan pengertian atau penerangan tentang arti kemerdekaan kepada rakyat. Itulah sebabnya proklamasi kemerdekaan mendapat sambutan baik dari rakyat Mandar. Bahkan mereka siap untuk berkorban dalam perjuangan menegakkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan.

Dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan di daerah Mandar diekspresikan dalam berbagai bentuk, misalnya penggunaan pekik “merdeka”, penyematan lambang “merah putih” di dada sebagai pertanda dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan serta menyatakan diri sebagai “pemuda merah putih”. Selain itu, juga pembentukan organisasi perjuangan sebagai wadah para pemuda pejuang dalam mengekspresikan semangat dan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan. Salah satu di antaranya adalah pembentukan organisasi perjuangan pada awal Oktober 1945. Pembentukan wadah ini bermula ketika sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Riri Amin Daud, A. Rahman Tamma, dan Abd. Rauf serta tiga mantan komandan barisan *Heiho*, yaitu Mahmud Saal, Mahmudi Syarif, dan Amin Badawie mendesak kepada Ibu Andi Depu dan H.A. Malik untuk membentuk Barisan Pemuda Merah Putih. Wadah perjuangan

yang dipimpin oleh Ibu Andi Depu bersama saudaranya H.A. Malik ini, sesungguhnya merupakan organisasi resmi kedua setelah API (Angkatan Pemuda Islam).¹⁷¹ Namun jangkauan atau ruang lingkup keanggotaan organisasi yang kedua ini lebih luas. Untuk mendampingi Ibu Andi Depu dan H.A. Malik, diangkat Abd. Rauf dan Sitti Ruaidah. Sebagai pembantu utama dalam tugas-tugas organisasi dipercayakan kepada M. Riri Amin Daud, dan A. Rahman Tamma.¹⁷²

Organisasi perjuangan tersebut berperan penting dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 1945.¹⁷³ Upacara yang dilaksanakan sekitar jam 09.00 pagi di pinggir pasar Tinambung atau di depan rumah kediaman Ibu Andi Depu yang dijadikan sebagai markas komando perjuangan rakyat Mandar, dipercayakan kepada Andi Parenrengi, putra satu-satunya Ibu Andi Depu sebagai penggerek bendera. Oleh karena pada hari itu bertepatan dengan hari Jum'at, maka H. A. Malik menyampaikan pidato di masjid. Adapun isi pidatonya, yaitu ajakan kepada seluruh rakyat Mandar untuk bangkit berjuang bersama-sama mempertahankan

¹⁷¹ Organisasi Angkatan Pemuda Islam didirikan pada bulan April 1945. Penanggung jawab organisasi ini antara lain: Ibu Andi Depu bersama Riri Amin Daud, H. Mas'ud Rahman, Mahmudy Syarif, Lappas Bali, Ahmad Amin Badawy, dan Musdalifah. Organisasi yang didirikan di Campalagian ini, bertujuan mencapai kemerdekaan yang berazaskan Islam.

¹⁷² Arsip Negara Indonesia Timur (NIT), No. 139. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan.

¹⁷³ Pengibaran bendera Merah Putih di Tinambung tersebut, didahului kedatangan utusan para pejuang dari Parepare. Pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 1945 sekitar pukul 20.00 tiba La Nakka, M. Amin Daeng Situru, Manongko, dan Abd. Samad Hanafi. Mereka diterima oleh Ibu Andi Depu, yang didampingi H.A. Malik, Abd. Rauf, dan Sitti Ruaidah. Utusan dari Parepare menyampaikan salam hangat, disertai "Salam Perjuangan" rakyat Parepare kepada rakyat Mandar. Ucapan salam perjuangan itu disertakan pula dengan selembar bendera Merah Putih untuk dikibarkan di Tinambung, kalau memang belum ada bendera Republik Indonesia yang berkibar. Ucapan salam perjuangan dan kiriman bendera dihargai dengan penuh kesungguhan oleh Ibu Andi Depu dan peserta pertemuan lainnya. (Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar – Sulawesi Barat; Kajian Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan*. Makassar: Dian Istana, hlm.137).

kemerdekaan. Ditegaskan pula bahwa Ibu Andi Depu merupakan pucuk pimpinan perjuangan. Nama organisasi perjuangan yang diumumkan, yaitu laskar KRIS Muda (Kebangkitan Rahasia Islam Muda) Mandar yang merupakan kelanjutan dari organisasi perjuangan yang dibentuk sebelumnya (21 Agustus 1945). Adapun susunan struktur kepengurusan organisasi kelaskaran KRIS Muda Mandar pada saat pembentukannya tanggal 19 Oktober 1945, adalah sebagai berikut:

Panglima	: Ibu A. Depu
Wakil Panglima	: H.A. Malik
Kepala Staf	: A. Rahman Tamma
Anggota Staf	: Lappas Bali, Abd. Razak
Pembantu Utama Panglima/	
Strategi	: M. Riri Amin Daud
Pendamping Panglima	: Abd. Rauf, dan Sitti Ruaidah
Komandan Pasukan	: Andi Parenrengi
Komandan Pertempuran	: Hammad Saleh Puangnga I Sudding
Komandan Pasukan I	: Mahmud Saal
Komandan Pasukan II	: Mahmudi Syarif
Komandan Pasukan III	: Amin Badawie. ¹⁷⁴

Pembentukan wadah perjuangan laskar KRIS Muda di Mandar tersebut, bukan hanya semakin melapangkan gerakan perjuangan sehingga terorganisir dan terarah, tetapi juga menunjukkan peran

¹⁷⁴ Dalam sumber lain disebutkan bahwa, Kebangkitan Rahasia Islam Muda (KRIS Muda) didirikan di Balanipa, Mandar pada tanggal 21 Agustus 1945. Organisasi ini merupakan kelanjutan perjuangan organisasi Islam Muda yang dipimpin langsung oleh Ibu Depu sebagai panglima tertinggi. Adapun Susunan organisasi KRIS Muda Mandar adalah: Panglima (Ibu Andi Depu), Wakil Panglima (Abdul Malik), Kepala Staf (M. Amin Badawy), Anggota Staf (M. Amin Badawy, Abd. Razak, Lappas Bali, A. Kating, A. Rauf), Ajudan Panglima Wakil Berkuasa penuh (R. A. Daud), Ajudan Khusus A. Depu (St. Ruwaidah), Ajudan wakil panglima adalah A. Rauf (Pabittei, Aminah. 1991. *Hajjah Adi Depu, Maraddia Balanipa*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm.51; Poelinggomang, Edward L. dkk. 2005, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm.165).

yang dibebankan kepada Hammad Saleh sebagai komandan pertempuran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berbagai aksi pemuda pejuang berikutnya adalah pengibaran bendera Merah Putih yang dipimpin oleh Mahmud Saal di Pamboang pada 20 Oktober 1945. Sebelum pengibaran bendera, terlebih dahulu diadakan perundingan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1945 dilakukan pula pengibaran bendera Merah Putih di Campalagian yang dipimpin oleh A. Majo dengan disaksikan oleh wakil panglima KRIS Muda, H. A. Malik. Selanjutnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih di beberapa kota kecil di daerah Mandar. Nama KRIS Muda berlahan-lahan dikenal rakyat sebagai wadah perjuangan yang mendapat dukungan dari kerajaan, berhubung tampilnya Ibu Andi Depu *Mara'dia Tobaine* Balanipa selaku pemegang pucuk pimpinan.¹⁷⁵

Berbagai aksi tentang perjuangan di Mandar tersebut, kemudian segera disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Ratulangi. Dalam rangka itu maka diutuslah Wakil Pimpinan KRIS Muda Mandar, H.A. Malik ke Makassar Untuk menyampaikan laporan kepada gubernur dan ia berada di Ibokota Propinsi selama dua minggu. Gubernur Ratulagi setelah menerima laporan lalu menginstruksikan untuk segera mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Jepang dan mengingatkan pula agar barisan keamanan dimanfaatkan yang berintikan laskar KRIS Muda Mandar. Selain petunjuk dari Gubernur Ratulangi, diterima pula pesan dari Mr. Tadjuddin Noer tentang penyaluran perjuangan politik melalui wadah PNI (Partai Nasional Indonesia). Oleh karena organisasi perjuangan yang berpusat di Makassar itu, telah dibentuk pula cabang PNI Polewali pada bulan Oktober 1945 di

¹⁷⁵ Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar...*, hlm.138.

bawah pimpinan Andi Hasan Mangga. Kegiatan utama organisasi perjuangan ini adalah mendaftar dan membagi-bagikan kartu anggota PNI kepada para pejuang yang pada waktu itu dikenal dengan “kartu merah putih” sebab kartu tersebut memang berwarna merah dan putih.¹⁷⁶

Instruksi Gubernur Ratulangi tersebut, sesungguhnya tidak terlepas dari kebijakannya yang berupaya agar pemuda pejuang tidak melakukan perlawanan militer terhadap Sekutu dan *NICA*. Namun *NICA* tampaknya memanfaatkan kondisi itu dengan melancarkan aksi militer di berbagai daerah. Tanggal 10 Oktober 1945, tercatat 40 tentara *KNIL* yang dikomandoi oleh Mr. Pool, salah seorang opsir *NICA* ke Sungguminasa. Pasukan ini mendapat perlawanan dari para pemuda di bawah pimpinan Tumailalang Towa. Demikian pula dengan Stutherheim, seorang opsir *NICA* memimpin 25 tentara *NICA* melakukan aksi militer di Maros. Tindakan militer *NICA* tersebut juga mendapat perlawanan dari pihak pemuda yang didukung oleh para *karaeng* (bangsawan) dari Tunikale, Marusu, Lau, Cenrana, dan Aru Camba. Beberapa daerah lainnya termasuk Mandar juga tidak terlepas dari sasaran pendudukan dan aksi militer yang dilakukan oleh aparat *NICA* pada Oktober 1945. Oleh karena itu, Ratulangi membatalkan perundingan dan mengajukan protes kepada pihak Sekutu. Protes itu dijawab secara diplomatis oleh Sekutu bahwa *NICA* termasuk badan resmi yang tak terpisahkan dengan Sekutu yang bertugas menyelesaikan persoalan urusan administrasi pemerintahan Hindia Belanda.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Organisasi perjuangan yang dipimpin Mr. Tadjuddin Noer dan berpusat di Makassar telah dibentuk pula cabang PNI Polewali pada tanggal 10 Oktober 1945 di bawah pimpinan Andi Hasan Mangga. Pada tanggal 15 Agustus 1946 Ketua Cabang PNI Polewali mendapat undangan dari Makassar untuk menghadiri ulang tahun proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1946 yang pertama.

¹⁷⁷ Untuk mengimbangi tindakan *NICA* tersebut, Dr. Ratulangi mengadakan pertemuan

Tindakan aparat-aparat *NICA* tersebut, mendapat reaksi dari para pemuda di Kota Makassar dan daerah sekitarnya. Para pemuda pejuang melakukan berbagai aksi balasan dan penyerangan terhadap aparat *NICA*, sehingga keadaan Kota Makassar makin mencekam. Dalam suasana yang demikian itu, berlangsung serah terima jabatan komandan pasukan Sekutu (Australia) dari Brigejn Iwan Dougherty kepada Brigjen F.D. Chilton pada 19 Oktober 1945. Demikian pula pimpinan aparat *NICA* dari Mayor Wegner diserahkan kepada Dr. Lion Cachet.¹⁷⁸ Dua hari setelah pergantian pimpinan itu, Chilton mengeluarkan pengumuman bahwa *NICA* adalah bagian yang tak terpisahkan (manunggal) dari Sekutu pada 21 Oktober 1945. Sejak itu pasukan Sekutu semakin mendukung aparat-aparat *NICA* dalam melakukan pendudukan terhadap sejumlah daerah, seperti pendudukan terhadap daerah Bone dan Bantaeng pada 25 Oktober 1945.¹⁷⁹ Itulah sebabnya terjadi serangkaian tindak

dengan para pemuda pembela republik di Sengkang pada 10-13 Oktober 1945. Gubernur Ratulangi menganjurkan supaya para pejuang republik setempat mendirikan organisasi politik sebagai alat diplomasi daripada menempuh tindakan kekerasan. Dr. Ratulangi menyatakan secara terbuka dalam pertemuan itu bahwa dirinya sulit menjalankan pemerintahannya, sehingga ia memutuskan menempuh cara diplomasi dengan mendirikan Badan Pusat Keselamatan Rakyat (BPKR). Anjuran Dr. Ratulangi dalam pertemuan di Sengkang itu ditindaklanjuti dengan berdirinya organisasi perjuangan. Di Parepare misalnya, didirikan organisasi Penunjang Republik Indonesia (PRI) yang diketuai oleh Andi Makkasau dan Andi Abdullah Bau Massepe sebagai wakil ketua, serta dibantu beberapa pemuda pendukung republik (Kadir, Harun. dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemer-dekaan...*, hlm. 159).

¹⁷⁸ Pengalihan tugas komandan Sekutu itu turut mempengaruhi kondisi perkembangan perjuangan mempertahankan pemerintahan Republik Indonesia di Sulawesi. Pengalihan tugas tersebut kelak melahirkan *De Resident van Zuid Celebes*. Harvey, Barbara S. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar...*, hlm. 114-115; Djarwadi, Radik, dkk. 1972. *Sejarah Corps Hasanuddin, Prajurit Tempur dan Pembangunan*. Makassar: Corhas, hlm. 7.

¹⁷⁹ Kedatangan tentara Sekutu dan *NICA* tersebut disambut perlawanan dari para pemuda dan organisasi Pengawal Tana Bone (PTB) yang berdiri pada tanggal 19 Oktober 1945. Namun perlawanan itu dapat diredakan, karena persenjataan tentara *NICA* jauh lebih kuat. Itulah sebabnya mereka memutuskan mengadakan perlawanan melalui gerakan bawah tanah dengan mendirikan beberapa organisasi, seperti organisasi Sarang Laba-Laba yang didirikan oleh P.S. Pohan pada 23 Oktober 1945 dan organisasi Tangan Beracun pada 6 Desember 1945. Perlawanan para pemuda pembela republik juga terjadi di Kolaka dan Palopo, yang menyerang tangsi-tangsi *NICA*, dan berhasil merebut senjata serta menyatakan daerah Luwu sebagai bagian dari wilayah

perlawanan yang dilakukan oleh pemuda pejuang, termasuk penyerangan terhadap kedudukan *NICA* di Kota Makassar pada 29 Oktober 1945.¹⁸⁰

Serangan para pemuda pejuang republik terhadap kedudukan *NICA* dan beberapa tempat strategis di Makassar itu amat menggusarkan pihak Sekutu. Agar peristiwa itu tidak terulang kembali, komandan pasukan Sekutu mengeluarkan maklumat militer yang ditandatangani oleh Brigjen Chilton pada 29 Oktober 1945.¹⁸¹ Hal ini bukan hanya merupakan hambatan bagi para pemuda pejuang dalam menegakkan proklamasi kemerdekaan pada satu sisi, tetapi juga memberi keuntungan

RI. (Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, 1993. *Biografi Pahlawan Andi Mappanyukki...* hlm. 174)

¹⁸⁰ Pada peristiwa itu, pemuda pejuang yang dikomandoi oleh organisasi PPNI berhasil merebut dua stasiun radio, Stasiun Radio Maradekaya dan Stasiun Radio Mattoanging. Mereka juga berhasil menurunkan bendera Belanda di depan kantor pemerintahan *NICA* dan menggantinya dengan bendera Republik Indonesia, Merah Putih. Selain itu, mereka juga menyerang barak polisi dan hotel tempat para pejabat *NICA* tinggal. *NICA* tidak mampu mengatasinya sendiri, dan meminta bantuan pasukan Australia, sehingga keadaan itu dapat diatasi. Beberapa pemuda berhasil ditawan dan beberapa di antara mereka ditawan dan ada pula yang sempat meloloskan diri. Namun usaha pemuda pembela republik mengibarkan bendera Merah Putih gagal. Pasukan Sekutu (Australia) segera dapat mengatasi keadaan. Pukul 11.00 siang, tentara Sekutu menyerbu markas besar perlawanan rakyat di Jongaya, Makassar. Para pemuda yang melakukan perlawanan dengan perlengkapan senjata yang ada akhirnya tak mampu bertahan. Banyak yang gugur dan luka, serta kurang lebih 50 orang pemuda ditangkap dan ditawan oleh tentara Australia (Harvey, Barbara S. 1989, *op., cit.*, hlm. 116)..

¹⁸¹ Isi maklumat militer yang dikeluarkan oleh Sekutu itu adalah: "(a) Memakai atau mempunyai senjata apapun, termasuk segala rupa senjata api, granat tangan, senjata-senjata peledak, pedang, keris, badik, dan tombak. Barang siapa memakai senjata-senjata tersebut dapat ditembak mati; (b) Mengadakan pawai pertunjukan dalam bentuk apapun; (c) Paksaan dengan kejam atau ancaman dalam bentuk apapun; (d) Menolong atau menyokong siapa yang telah membuat barang kejahatan; (e) Tidak mau menjual makanan, pakaian atau keperluan sehari-hari atas alasan perbedaan bangsa atau derajat; (f) Menghalangi pemakaian jalan dengan luluasa; (g) Merusak, membinasakan, menghalangi segala urusan atau pembangunan Sekutu, termasuk juga pem-bangunan saluran air minum, perusahaan listrik dan gas, telepon, telegraf, dan stasiun radio. Barang siapa yang melakukan kesalahan itu akan ditembak mati di tempat; (h) Pencurian dan membongkar rumah orang; (i) Memakai pakaian militer atau uniform (seragam) lain apabila bukan *pasukan Sekutu* atau polisi; (j) Turut latihan secara militer dalam bentuk apapun. Segala aturan tersebut di atas, pasti akan dilaksanakan oleh semua serdadu di bawah perintah saya". Maklumat ini dikeluarkan di Makassar pada tanggal 29 Oktober 1945 oleh Brigadir Panglima Tentara Australia di Makassar, F.O. Chilton (Arsip Negara Indonesia Timur (NIT) No. 162 (Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan).

politik bagi *NICA* pada sisi yang lain. Meskipun demikian, tidak melemahkan semangat juang para pemuda dalam menentang kehadiran dan melawan usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini. Jiwa dan semangat mereka bahkan makin kokoh dalam perjuangan menentang kehadiran dan usaha *NICA* melalui organisasi kelaskaran KRIS Muda Mandar.

Sejak itu kegiatan pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan Republik Indonesia beralih ke luar Kota Makassar atau daerah pedalaman. Perjuangan bersenjata tersebut berhasil diorganisir berkat dorongan jiwa dan semangat revolusioner para pemuda pejuang kemerdekaan, sehingga dapat menarik sebagian tokoh-tokoh masyarakat setempat berpihak pada Republik Indonesia, serta dukungan pengaruh dan kewibawaan serta sikap beberapa bangsawan tinggi di daerah Mandar yang sejak awal bertekad memperjuangkan terwujudnya negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap perlawanan bersenjata di daerah Mandar dalam perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa Indonesia dan negara. Itulah sebabnya ketika aparat-aparat *NICA* berupaya memperkuat kedudukannya di daerah Mandar, Ibu Andi Depu mengirim utusan kepada seluruh pengurus kelas-karan KRIS Muda Mandar untuk berkumpul di Balanipa dan melakukan konsolidasi dalam perjuangan menentang kehadiran dan usaha *NICA*. Dalam rangka itulah Ibu Andi Depu mengutus anaknya (Andi Parenrengi) untuk menemui secara langsung dan menyampaikan undangan pertemuan kepada Hammad Saleh di Alu pada November 1945.¹⁸²

¹⁸² Pengakuan Hammad Saleh kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene. NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 22/SPN ddo. 30 Juli 1947. Arsip NIT, No. 140, Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hammad Saleh setelah menerima undangan itu segera berangkat ke Balanipa. Pada pertemuan yang dihadiri oleh para *mara'dia* (raja) dari *Pitu Babana Binanga* dan ribuan rakyat Mandar, Hammad Saleh menyatakan kepada Ibu Andi Depu, bahwa "Saya sejak dari sekarang beserta seluruh keluarga dan pengikut saya menyatakan akan setia mengikuti arah perjuangan Puangngu Mara'dia dan siap menunggu petunjuk perintah. Dan insya Allah akan *batuwa* laksanakan betapapun resiko yang akan terjadi".¹⁸³ Pernyataan Hammad Saleh sebagai salah seorang komandan pertempuran kelaskaran KRIS Muda Mandar tersebut, bukan hanya menunjukkan semangat dan kebulatan tekadnya dalam perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga semakin memantapkan prinsip-prinsip perlawanan Hammad Saleh dalam menentang kehadiran dan usaha *NICA*. Oleh karena pengaruh Ibu Andi Depu yang luas di daerah Mandar dan prinsip perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah mewarnai segala perjuangan rakyat Mandar, sehingga semakin menyakinkan Hammad Saleh dan para pejuang lainnya di daerah Mandar bahwa bangsanya tidak mungkin dijajah lagi. Setelah pertemuan itu, Hammad Saleh kembali ke Alu membentuk laskar "barisan berani mati" KRIS Muda Mandar dan semakin mengabdikan dirinya dalam perjuangan, baik dalam perjuangan menegakkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maupun dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak

¹⁸³ Sesungguhnya pernyataan Hammad Saleh tersebut dalam bahasa Mandar yang diterjemahkan secara bebas, bahwa "*Ia dhuapaitia napepasanna Puangngu Maradia nauporoi uporannui, damoitia alabena Puangngu Maradia pole mappesitai batuwa*". Catatan Harian Letkol (Purnawirawan) Abdul Rauf, tentang Muhammad Saleh Puanna I Sudding, dalam Rasyid, Darwas. 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu...*, hlm. 64. Namun tempat pertemuan antara Ibu Andi Depu dan Hammad Saleh itu berbeda antara satu dengan yang lainnya (catatan harian Abdul Rauf dengan sumber arsip).

memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di daerah Mandar pada khususnya.¹⁸⁴

Selain melakukan konsolidasi tersebut, juga digalakkan pembentukan cabang KRIS Muda Mandar di berbagai daerah, termasuk di daerah Polewali. Pembentukan cabang organisasi perjuangan KRIS Muda di Polewali dan daerah sekitarnya di bawah pimpinan Andi Hasan Mangga. Selain sebagai pimpinan KRIS Muda Mandar di Polewali, Andi Hasan Mangga juga sebagai ketua cabang organisasi perjuangan BPRI (Badan Penunjang Republik Indonesia) di Polewali di bawah pimpinan Andi Abdullah Bau Massepe dan Andi Selle yang berpusat di Suppa.¹⁸⁵ Jalinan kerjasama antara kedua organisasi perjuangan itu, dianggap telah mantap dan siap untuk membela tanah air Indonesia. Jumlahnya anggotanya sekitar 800 orang tersebar di seluruh wilayah Polewali dan sekitarnya yang meliputi kurang lebih 10 daerah, yaitu antara lain: Polewali, Tonyaman, Takatidung, Anreapi atau Kelapadua, Darma, Madatte, Binuang, Kanan, Paku, Patampau, Matangnga, dan Massawa yang mencakup daerah pegunungan Lembang. Untuk itu, maka disusunlah formasi tugas masing-masing kelompok atau kompi KRIS Muda dan BPRI sebagai berikut:

- a. Wilayah Kota Polewali disebut sebagai kelompok atau kompi satu di bawah pimpinan H. Umri sebagai komandannya yang meliputi tiga daerah yaitu: Polewali, Tonyaman, dan

¹⁸⁴ Keterangan Hammad Saleh kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene. NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 22/SPN ddo. 30 Juli 1947. Demikian pula keterangan Angga kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene. NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 25/SPN ddo. 30 Juli 1947. Arsip NIT, No. 140, Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

¹⁸⁵ Oleh karena itu, selain sebagai ketua cabang KRIS Muda Mandar di daerah Polewali, Andi Hasan Mangga juga sebagai ketua cabang BPRI di Polewali dan daerah sekitarnya. Di Samping itu, Andi Hasan Mangga juga sebagai pimpinan organisasi perjuangan PNI untuk daerah Mandar dan sekitarnya.

Takatidung dengan kekuatan sekitar 145 orang pemuda dan markasnya dalam kota yang dirahasiakan.

- b. Wilayah pegunungan disebut sebagai kelompok atau kompi dua di bawah pimpinan Tarrua sebagai komandan yang meliputi tiga daerah yaitu: Anreapi, Darma, dan Madatte dengan kekuatan sekitar 150 orang pemuda dan markasnya berkedudukan di Kalapadua.
- c. Wilayah timur disebut sebagai kelompok atau kompi tiga di bawah pimpinan Pangiu sebagai komandannya yang meliputi tiga daerah yaitu: Binuang, Kanan, dan Paku dengan kekuatan sekitar 150 orang pemuda dan markasnya berkedudukan di Silolo, Paku.
- d. Kelompok bantuan disebut sebagai kelompok atau kompi empat yang tugasnya meliputi daerah Patampanua, Matangga, dan Massawa yang mencakup daerah pegunungan Lembang. Markasnya tidak menentu sebab selalu berpindah-pindah, karena ditugaskan untuk mengacau, sabotase, dan kalau perlu menyerang pasukan tentara atau polisi *NICA*. Kelompok ini dipimpin oleh Ambo Damma yang terdiri dari dua kelaskaran, yaitu KRIS-Muda dan BPRI dengan kekuatan sekitar 350 orang pemuda.¹⁸⁶

KRIS Muda Mandar bukan hanya menjalin kerjasama dengan organisasi perjuangan BPRI Suppa, tetapi juga dengan organisasi perjuangan GAPRI 5.3.1 (Gabungan Pemberontak Rakyat Indonesia dengan kode 5.3.1) dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha *NICA*. GAPRI 5.3.1 dibentuk atau didirikan

¹⁸⁶ Perlu dikemukakan bahwa kelompok atau kompi tiga yang dipimpin oleh Pangiu (KRIS Muda Mandar dan BPRI) bekerjasama atau bahu-membahu dengan BPRI dari Pajalele daerah Lembang yang dipimpin oleh Nyompah sebagai komandannya dengan kekuatan sekitar 200 orang pemuda dalam perjuangan melawan aparat pemerintah kolonial Belanda (Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar ...*, hlm.141-142).

pada tanggal 2 November 1945 dan dipimpin oleh H. Muh. Djud Pantje dan H. Maimuna. Organisasi perjuangan yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan ini, bukan hanya dimaksudkan untuk menentang kehadiran dan usaha *NICA*, tetapi juga dibentuk dalam rangka perjuangan menegakkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁸⁷

Pada mulanya GAPRI 5.3.1 merupakan suatu organisasi sosial yang bernama PRAMA (Persatuan Rakyat Mandar) yang berdiri pada tahun 1935 atas prakarsa H. M. Syarif, salah seorang tokoh masyarakat di daerah Baruga. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PRAMA berubah menjadi Perjuangan Masyarakat Indonesia (PERMAI) pada 24 Agustus 1945. Perubahan nama tersebut lebih banyak diselaraskan dengan ide perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu. Organisasi perjuangan ini dalam gerak langkahnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu; (1) berfungsi sosial yang diketuai oleh H. M. Syarif, dan (2) berfungsi sebagai wadah perjuangan yang bergerak di bawah tanah guna untuk menegakkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh H. Muh. Djud Pantje dan H. Maimuna. Dalam perkembangannya seiring dengan timbulnya aksi-aksi perlawanan terhadap *NICA*, maka organisasi perjuangan PERMAI berubah menjadi organisasi kelaskaran GAPRI 5.3.1.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Berdasarkan penjelasan pembentukan organisasi GAPRI 5.3.1, bahwa angka 5 berarti perjuangan tidak melalaikan sembahyang lima waktu, dan angka 3 berarti bersedia memberi tiga macam pengabdian, yaitu pikiran, tenaga dan harta termasuk jiwa raga jika diperlukan, serta angka 1 berarti tujuan perjuangan Indonesia merdeka yang berdaulat penuh dengan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa (Djud Pantje, Haji Maemuna. 1982. Sejarah Kelaskaran GAPRI 5.3.1. (Gabungan Pemberontak Rakyat Indonesia, Kode 5.3.1). Makalah pada Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing, yang diselenggarakan di Makassar.

¹⁸⁸ Pada mulanya Abdul Gani Ahmad yang ditunjuk sebagai ketua umum organisasi PERMAI dengan ketentuan harus turut masuk ke hutan, tetapi karena ia memilih tempat untuk menetap di Kota Mejene dengan alasan bahwa pengurusan dalam kota tak kalah pentingnya.

Perubahan menjadi organisasi kelaskaran tersebut, tidak terlepas dari pembentukan organisasi-organisasi perjuangan dalam bentuk kelaskaran dalam sejumlah daerah di jazirah selatan Sulawesi. Dari berbagai organisasi perjuangan yang dibentuk di daerah Mandar, hanya organisasi kelaskaran KRIS-Muda dan GAPRI 5.3.1 yang secara terbuka mengadakan perlawanan fisik terhadap NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda khususnya di daerah Mandar. Organisasi kelaskaran KRIS-Muda dalam menjalankan operasinya lebih banyak bergerak pada daerah Balanipa, Polewali dan daerah sekitarnya. Sedangkan organisasi kelaskaran GAPRI 5.3.1 lebih banyak beroperasi sepanjang jalan poros Majene-Balanipa dan Majene-Mamuju. Walaupun demikian kedua organisasi kelaskaran itu beroperasi pada satu wilayah yang sama, yaitu Afdeling Mandar.

Jika dicermati susunan pengurus dan anggota kelaskaran KRIS Muda Mandar dan GAPRI 5.3.1, maka tampak bahwa tidak sedikit orang atau banyak di antara pemuda pejuang yang menjadi pengurus atau anggota pada kedua organisasi perjuangan tersebut. Salah satu di antaranya adalah Hammad Saleh Puangna I Sudding, sebab selain menjadi komandan pertempuran pada kelaskaran KRIS Muda Mandar, ia juga sebagai komandan tempur pada kelaskaran GAPRI 5.3.1.¹⁸⁹ Berdasarkan sejumlah

Oleh karena, maka H. Maimuna yang memang sudah menetap di Kampung Baruga yang dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai kepala sekolah rakyat Ba'babulo, Pamboang Majene ditunjuk sebagai ketua umum PERMAI (Djud Pantje, Haji Maemuna. 1982. *Sejarah Kelaskaran GAPRI 5.3.1...*, hlm.5). Junaeda, ST., dkk. 2013. *Nasionalisme Masyarakat Mandar; Sejarah Kelaskaran GAPRI 5.3.1 di Mandar Tahun 1945-1949*. Makassar: de la macca, hlm.62-63.

¹⁸⁹ Adapun susunan kepengurusan organisasi kelaskaran GAPRI 5.3.1 adalah sebagai berikut: **Pelindung:** Para Kepala Distrik di Majene; Muh. Yusuf (Pa'bicara Baru), Ato Benya (Pa'bicara Pangali-ali), dan Tambacu (Pa'bicara BangsaE), serta Kepala-kepala Kampung (Sulaiman, Da'aming, Baharuddin, dan Basir). **Penasihat:** Para Kadi, Imam, Para Ulama (Kiyai Abd Jalil, Kiyai H. Ma'ruf, Kiyai H. Nuhung, H. Sanusi, H. Jumadara, dan H. Yahya). **Pimpinan/ Pembina:** H. Maemuna, H. M. Djud Pantje, H.M Syarif, H. Abd. Gani Ahmad, H. M. Tahir, H. Fatani,

keterangan yang disampaikan kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier* Majene, bahwa organisasi kelaskaran GAPRI 5.3.1 berpusat Baruga, Majene dan pengurusnya antara lain terdiri atas Muh. Saleh Banjar, Raden Ishak, Muh. Saleh (guru), Kandjoeha, dan Moestafa.¹⁹⁰ Kemudian datang dan bergabung Hammad Saleh bersama Pano, Repas, Angga, Atjo Potjer, Bali, Langgar, Poea Sande, Djoehania, Boeddoe, Jarasa, dan Sollei. Bahkan Hammad Saleh kemudian angkat menjadi salah seorang unsur pimpinan pasukan GAPRI 5.3.1.¹⁹¹

Sultani Mansyur, Abu Pua' Rugaya, Hamzah, Muhammad Pua' Budaer, Aco R., Ismail Riso, M. Tahir R, H. Bahra, St. Rabiah Syarif, H. Habiba, St. Fatimah, Hiaya, Basir, Kuni, dan lain-lain). **Sekretariat:** Ketua Sapar Rahim, Wakil Ketua Adam, dan Muis. **Bendahara/ Keuangan:** H. Habiba. **Komandan Tempur:** Komandan Besar (Muh. Saleh Banjar), Wakil (Raden Ishak), Pengawal (Atjo Bulla, Sumardi, dan Amin Syarif), Komandan-komandan (Basong, Tanre, Kanjuha, Labora, Yole, Koye', Muh. Saleh Soso (Puangna I Sudding), Harun, Maryono, Sukirno, Sulemana Kume, Dose', Habo', Jalaluddin, dan Hammasa). Komandan Pelatih: H. Zainuddin, Akhmad Syarif, Mustafa Kamal, dan Hanna). Penggerak Massa: Abd. Wahab Anas, Abd. Haliem AE, dan Sultani Mansur). Penggerak Pemuda Pelajar: Hafid Imran, Usman Syarif, dan Nurhadi Syarif). **Persenjataan:** Muh. Jafar Pua' Dalling, dan Kumu' (perwakilan Balikpapan). **Perbekalan:** Sitti Fatimah. **Dapur umum:** Jaisah, Sitti, dan Asiah Arifuddin. **Dapur Khusus:** Hadara, Sitti Maryam, Hafsa Usman, Saliha, Pisa, Hana, dan Rukiah. **P.H.B. Umum:** Muhammad Pua' Abi, Muin, Daaming R, dan Pua' Marawiah. **P.H.B. Khusus:** Bakhirah, St. Aman, dan St. Pasanrae. **Kepala Kantor:** Sapar Rahim, Adam, dan Muis. (Djud Pance, Haji Maemuna. 1982. Sejarah Kelaskaran GAPRI 5.3.1. (Gabungan Pemberontak Rakyat Indonesia, Kode 5.3.1.). Makalah pada Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing). Sedangkan uraian tentang susunan pengurus organisasi kelaskaran KRIS Muda Mandar tersebut, telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya dan catatan kaki nomor 174.

¹⁹⁰ Misalnya keterangan Noehoeng kepada C. Pastor (*NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 21/SPN ddo. 30 Juli 1947), keterangan Hammad Saleh kepada C. Pastor (*NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 22/SPN ddo. 30 Juli 1947), pengakuan Angga kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene*. *NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 25/SPN ddo. 30 Juli 1947. Arsip NIT, No. 140, Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Terlepas dari perbedaan informasi yang diberikan oleh para pejuang tersebut, tampak bahwa para pejuang yang berhasil tertangkap oleh aparat Belanda tidak memberikan informasi yang sebenarnya, sehingga membingungkan pihak Belanda. Hal ini merupakan salah satu ciri atau karakteristik dari organisasi yang dijalankan secara rahasia cenderung membuat pengaburan informasi ketika mereka dalam posisi ditangkap oleh pihak musuh.

¹⁹¹ Keterangan Atjo Potjer kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene*. *NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 28/SPN ddo. 4 Agustus 1947. Demikian pula keterangan Hammad Saleh kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene*. *NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 22/SPN ddo. 30 Juli 1947. Arsip NIT, No. 140, Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembentukan GAPRI 5.3.1 tersebut, bukan hanya semakin memicu semangat perlawanan para pemuda pejuang, tetapi juga semakin meningkat dan terorganisirnya aksi-aksi perlawanan terhadap aparat *NICA*. Dalam rangka itu maka organisasi kelas-karan ini mempunyai enam markas ditambah satu markas inti. Markas inti berfungsi untuk mengelola dan memusyawarahkan segala kegiatan dan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Sementara keenam markas lainnya berfungsi sebagai penampung komandan-komandan tempur. Markas-markas tersebut sewaktu-waktu dapat dipindahkan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Selain mengadakan latihan-latihan militer, para pejuang juga mengusahakan berbagai cara untuk mendapatkan peralatan persenjataan. Cara yang ditempuh antara lain dengan mengirimkan anggotanya ke Kalimantan, mendapatkan persenjataan dari simpatisan, pembelian dengan barter, dan melakukan perampasan terhadap aparat *NICA* dan tentara *KNIL* atau pasukan Sekutu.¹⁹² Oleh karena itu, maka terjadilah serangkaian aksi perlawanan terhadap aparat Belanda, baik dalam perjuangan menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda, maupun dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah Mandar.

Sementara itu, kegiatan para pemuda pejuang yang tergabung kelaskaran KRIS Muda Mandar, terutama di Polewali dan daerah sekitarnya semakin tampak ketika aparat *NICA* berusaha menaikkan bendera Belanda (Merah Putih Biru) di Tanro Polewali. Namun usaha itu mendapat reaksi secara serentak dari pemuda pejuang, sehingga aparat *NICA* tidak berhasil mengibarkan

¹⁹² Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar...*, hlm. 154.

bendera Belanda di tempat itu. Oleh karena itu, para pemuda pejuang di bawah pimpinan H. Ummarang dan Daeng Patompo, bukan hanya berhasil menggagalkan usaha aparat *NICA* itu, tetapi mereka juga berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di Polewali. Meskipun demikian tidak menyurutkan usaha aparat *NICA* untuk memperkuat kedudukannya di daerah Mandar. Berkat dukungan dan bantuan dari pasukan Sekutu, aparat *NICA* kemudian berhasil mengibarkan bendera Belanda di dalam tangsi *KNIL* Majene pada 13 Januari 1946. Bahkan mereka berusaha menurunkan bendera Merah Putih yang sedang berkibar di semua tempat dalam wilayah Majene pada 14 Januari 1946.¹⁹³

Keesokan harinya (15 Januari 1946) aparat-aparat *NICA* datang ke Tinambung, pusat KRIS Muda Mandar untuk menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar di depan markas komando perjuangan, yang juga sebagai rumah kediaman Ibu Andi Depu. Sebelum bendera Merah Putih itu diturunkan oleh aparat *NICA*, pucuk pimpinan KRIS Muda itu segera menuju tiang bendera itu dan memeluknya rapat-rapat. Mereka yang datang hendak menurunkan bendera itu, diperingatkan dengan suara lantang oleh Ibu Andi Depu dengan berkata sambil berteriak kepada aparat *NICA* bahwa "Tuan-tuan jangan coba-coba menurunkan bendera ini, dan kalau mau dipaksakan juga, tembaklah saya, baru bisa diturunkan".¹⁹⁴ Rakyat yang mengetahui adanya

¹⁹³ Poelinggomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 200; Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar ...*, hlm.142)

¹⁹⁴ Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar...*, hlm. 143. Dalam sumber lain disebutkan bahwa ketika mereka hendak menurunkan Bendera Merah Putih di depan rumah kediaman Ibu Depu, yang juga adalah markas komando perjuangan Kris Muda di Tinambung, semangat heroik Ibu Depu bangkit, dan segera menuju tiang bendera itu dan memeluknya. Ibu Depu lalu menyerukan kepada rakyat untuk mempertahankan bendera Merah Putih dan memperingatkan dengan lantang pasukan *NICA* yang hendak menurunkan bendera itu, bahwa "Tuan-tuan jangan coba-coba menurunkan bendera ini, dan kalau mau paksakan juga, tembaklah saya, baru bisa turunkan". Seruan Ibu Depu itu, disambut secara spontan oleh rakyat dengan semangat patriotisme dan segera berdatangan ke tempat kejadian. Dalam keadaan demikian, pasukan

insiden bendera itu segera berdatangan ke tempat kejadian. Rasa takut berhadapan dengan massa rakyat, memaksa aparat *NICA* segera meninggalkan tempat itu. Bendera Merah Putih berhasil dipertahankan berkibar dengan megahnya. Gagal di Tinambung, aparat *NICA* meneruskan perjalanan ke Pambussuang dan Campalagian. Di kedua tempat itu, mereka berhasil menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar.

Para pemuda pejuang segera menyusun rencana untuk membalas tindakan aparat *NICA* tersebut, yaitu memasang rintangan untuk menghambat mobilitas musuh pada jembatan Sungai Tinambung. Kedua pinggir jembatan diikat dengan rantai sauh perahu dan dihubungkan sehingga merupakan barikade penghalang. Tujuannya adalah untuk menghambat atau menghalangi kendaraan aparat *NICA* yang hendak melewati jembatan. Keesokan harinya (16 Januari 1946), Baso Daeng Malewa yang ditunjuk menjabat Asisten Residen Mandar hendak melewati jembatan itu dengan tujuan Kota Makassar. Para pemuda yang menjaga tidak bersedia membuka rantai sehingga timbul insiden kecil dan Baso Daeng Malewa diperingatkan, agar jangan lagi kembali ke Majene selaku Asisten Residen Mandar.¹⁹⁵

Selain itu, terjadilah pula serangkaian peristiwa baik berupa aksi-aksi sabotase, penghadangan, dan penyergapan yang dilakukan oleh para pejuang, maupun kontak senjata atau pertempuran antara aparat *NICA* dengan para pejuang (KRIS Muda Mandar dan GAPRI 5.3.1) di daerah Mandar. Sejumlah aksi perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang antara lain, insiden bendera

NICA tersebut terpaksa harus mengurungkan niatnya. Kiranya mereka menghindari berhadapan langsung dengan rakyat, sehingga bendera Merah Putih dapat dipertahankan berkibar dengan megahnya (Poelingomang, dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2...*, hlm. 201).

¹⁹⁵ Arsip Negara Indonesia Timur (NIT), No. 140. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan; Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar...*, hlm. 143.

di atas kapal BO. Belanda yang sedang berlabuh di Pelabuhan Majene dan insiden bendera di Prapatan Saleppa, penghadangan mobil patroli *KNIL* di Jembatan Puppole, Campalagian (Januari 1946), dan penyergapan patroli *KNIL*/Polisi *NICA* di Pambusuang dan Soreang (Januari 1946). Berikutnya kontak senjata yang melibatkan laskar yang dipimpin oleh Hammad Saleh dan para pimpinan lainnya dengan aparat *NICA* di Segeri (Baruga) dan Pangale (Majene), dan Pamboang (April 1946), serangan ke tangsi *KNIL* di Kota Majene (April 1946). Kontak senjata selanjutnya terjadi di Abaga dan Tarring Baruga serta Simullu (Mei 1946), penghadangan patroli *KNIL* di Pamboang dan Asing-asing (Juni 1946), penahanan mata-mata republik di Rusung (Juli 1946), kontak senjata di Silopo dan Segeri (Agustus 1946), dan pembunuhan terhadap *Controliur* Polewali di Tonyaman pada bulan Agustus 1946.¹⁹⁶

Berdasarkan data arsip tentang kronologi peristiwa gerakan perjuangan laskar KRIS Muda Mandar selama Perang Kemerdekaan dan laporan C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene*, bahwa tidak sedikit peristiwa atau aksi perlawanan laskar (barisan berani mati) yang dipimpin oleh Hammad Saleh dalam menentang aparat *NICA*. Rangkaian dari sejumlah peristiwa itu antara lain pertempuran melawan patroli aparat *NICA* di Mombi (Alu) pada 20 September 1946, serangan terhadap pos pertahanan *NICA* di Lembang-lembang (23 September), dan pertempuran melawan serangan musuh di Buttu Ludu (30 September 1946). Peristiwa-peristiwa berikutnya adalah pembunuhan terhadap mata-mata

¹⁹⁶ Arsip NIT, No. 140. *NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport No. 22/SPN ddo. 30 Juli 1947*. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan; Arsip NIT, No. 166. Laporan Asisten Residen Mandar, L.L.A. Maurenbrecher (22 Agustus 1946) Tentang Pembunuhan Controleur Polewali G Monsees. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

NICA di Paropo (8 Oktober 1946), penyerangan terhadap patroli *NICA* di Sajoang (14 Oktober 1946), pertempuran melawan serangan pasukan *NICA* di Saragian, Alu (November 1946), pertempuran melawan serangan musuh di Lais, Alu (6 Desember 1946) dan sejumlah peristiwa lainnya (penghadangan terhadap patrol *NICA* di Buttu Pondanga, pertempuran di Lako – Alu, penyerangan terhadap patrol *NICA* di Kaida, dan penyerangan terhadap pos pertahanan *NICA* di Sallari pada bulan Desember 1946.¹⁹⁷

Jika dicermati kedua laporan tentang serangkaian aksi perlawanan tersebut, maka tampak bahwa bukan hanya betapa gigihnya perlawanan para pejuang di daerah Mandar, tetapi juga begitu besar dan pentingnya peranan Hammad Saleh dalam perjuangan menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak menghancurkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, aksi-aksi perlawanan terhadap *NICA* tersebut juga menunjukkan bahwa tidak sedikit korban jiwa manusia di kedua belah pihak. Perlawanan rakyat secara menyeluruh termasuk di daerah Mandar itulah yang mendasari pemerintah kolonial Belanda mengumumkan *staat van orloog en beleg* (negara dalam keadaan darurat dan perang, disingkat *SOB*) pada 11 Desember 1946. Pernyataan *SOB* yang meliputi wilayah Afdeling Makassar, Parepare, Bantaeng, dan Mandar itu, kemudian disusul pula dengan “perintah harian” (*dag order*) dari Letjen S. Spoor kepada seluruh jajaran militer Belanda untuk melaksanakan aksi militer di daerah-daerah tersebut. Aksi militer yang dilakukan itu mengakibatkan terjadinya peristiwa penting di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang kemudian

¹⁹⁷ Arsip H.M. Amin Daud, No. 15. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan; Arsip NIT, No. 140. *NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingen-rapport* No. 21, 22, dan 25/SPN ddo. 30 Juli 1947. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

dikenal dengan “korban empat puluh ribu jiwa”¹⁹⁸

Salah satu aksi militer pasukan Westerling di daerah Mandar yang tetap dikenang sekarang adalah peristiwa Galung Lombok. Peristiwa ini bermula ketika pasukan Westerling di bawah pimpinan Stufkens dan Vermuelen mengepung daerah Baruga, Simulu, Sugeru, Lembang, Tende dan daerah-daerah sekitarnya pada 1 Februari 1947. Untuk menakut-nakuti rakyat, pasukan Belanda tersebut membakar beberapa rumah rakyat. Selain itu, pasukan Belanda tersebut juga memaksa rakyat yang berada di daerah-daerah tersebut untuk berkumpul. Barang siapa yang melawan atau melarikan diri dan membawa senjata tajam ditembak mati di tempat. Setelah seluruh rakyat berkumpul, mereka kemudian digiring ke daerah Galung Lombok. Di tempat ini kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari kaum laki-laki. Seluruh rakyat yang berada di sekitar daerah Galung Lombok dikerahkan untuk datang menyaksikan pengadilan massal yang dilakukan oleh pasukan Westerling tersebut. Penggerakan massal untuk berkumpul tersebut, adalah sebagai upaya untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak membantu para pihak pejuang.¹⁹⁹

Setelah semuanya berkumpul di Galung Lombok, maka diadakanlah “pengadilan singkat” untuk mengetahui siapa di antara

¹⁹⁸ Pernyataan SOB itu diundangkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) No. 139. Patut kemukakan bahwa beberapa hari sebelum pernyataan SOB dan perintah harian itu dikeluarkan, telah didatangkan bantuan tentara dari Devisi 7 Desember langsung dari Negeri Belanda yang tiba di Makassar pada 1 Desember 1946, dan *Detaschemen Speciale Troepen* (DST), yang kemudian disebut *Depot Speciale Troepen* yang terdiri atas 123 orang tentara berbarat merah di bawah pimpinan Letnan I Rijmond P. P. Westerling (kemudian dinaikkan pangkatnya dan lebih dikenal dengan Kapten Westerling) yang tiba di Makassar pada 5 Desember 1946. Pasukan militer Belanda inilah yang kemudian mengemban tugas pelaksanaan aksi militer yang tertuang dalam perintah harian Letjen S. Spoor. Poelinggomang, Edward L. 2002, *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 7; Kadir, Harun, dkk., 1984, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, hlm. 200.

¹⁹⁹ Syam, Dartiah. 1993. *Lintasan Sejarah Perjuangan Desa Galung Lombok*. Tinambung: Depdikbud Kecamatan Tinambung; Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar...*, hlm. 193.

mereka yang termasuk pejuang yang di mata pihak Belanda dicap sebagai golongan ekstrimis. Untuk mengetahui secara pasti siapa di antara yang menjadi anggota dari laskar GAPRI 5.3.1. dan KRIS-Muda, maka Stufkens dan Vermuelen mendatangkan 32 orang tawanan anggota pejuang dari penjara Majene. Di Galung Lombok, ke-32 orang tawanan itu dipaksa untuk menunjukkan siapa di antara pada hadirin yang ada di tempat itu yang tergolong sebagai pejuang, atau simpatisan dari organisasi perjuangan. Namun usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat Belanda itu, tidak mendatangkan hasil. Sebab para tawanan itu mengadakan aksi tutup mulut dan enggan untuk memberitahukan rekan-rekan seperjuangan mereka. Akhirnya ke-32 orang tawanan tersebut dijejerkan satu persatu lalu di tembak mati. Setelah para tawanan itu meninggal, maka aksi berikutnya ditunjukkan kepada pemuka-pemuka masyarakat yang diperkirakan banyak membantu para pejuang. Kepala Distrik Baruga, pemuka-pemuka masyarakat Baruga, Tende, Simulu, dan lain-lain satu persatu menemui ajalnya di tempat itu.²⁰⁰

Sementara penembakan massal berlangsung di Galung Lombok, pasukan GAPRI 5.3.1. di bawah pimpinan Basong yang tetap berada di markas Pumbuke, kemudian mengambil keputusan untuk segera menyusul rekannya ke Segeri. Keputusan ini diambil karena setelah lama menunggu pasukan Westerling tidak juga muncul. Dalam perjalanan ke Segeri, mereka melihat seorang pasukan Belanda menyeret seorang wanita yang bernama Subaedah untuk diperkosa. Melihat situasi yang demikian itu, dua orang anak buah Basong, yaitu Harun dan Habi mencoba untuk menghalanginya dan membunuh pasukan Belanda tersebut. Namun sebelum meninggal, ia masih sempat membunyikan

²⁰⁰ Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar...*, hlm. 194.

fluitnya untuk memanggil rekannya yang lain. Pada saat itulah pasukan Belanda lainnya datang untuk membantu rekannya. Terjadilah tembak menembak antara pasukan Belanda dengan kelaskaran GAPRI 5.3.1. Pada pertempuran di Talolo tersebut, dua orang anggota pasukan GAPRI 5.3.1. gugur, yaitu Sukirno dan Yonggang. Sementara di pihak Belanda tewas sebanyak tiga orang, yaitu Dickson, Van Eeuw dan seorang lagi tidak diketahui namanya.²⁰¹

Sesudah pertempuran tersebut, datanglah Tanne bersama pasukannya yang bermaksud untuk memberikan bantuan. Tiba-tiba muncul sebuah mobil pasukan Westerling. Mobil tersebut kemudian dilempari granat oleh pasukan Tanne, sehingga terbalik dan jatuh ke dalam jurang. Namun pasukan Belanda yang selamat berhasil melarikan diri ke Galung Lombok untuk memperoleh bantuan. Pengadilan massal yang sedang berlangsung di Galung Lombok, berubah menjadi pembantaian massal. Stufkens dan Vermuelen yang diberitahukan mengenai matinya tiga orang anak buahnya dan terbaliknya mobil pasukan ke dalam jurang menjadi naik darah. Untuk melampiaskan kemarahannya itu, pasukan Belanda tersebut melepaskan tembakan-tembakan secara membabi buta terhadap massa rakyat yang sedang berkerumun. Selain itu, juga banyak rakyat yang tidak berdosa disuruh berbaris lalu ditembak mati.²⁰²

Pada hari naas itu tercatat sekitar 700 orang rakyat Mandar yang gugur di Galung Lombok. Mereka bukan hanya terdiri atas

²⁰¹ Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar...*, hlm. 195; Junaeda, ST., dkk. 2013. *Nasionalisme Masyarakat Mandar, Sejarah Kelaskaran GAPRI 5.3.1 di Mandar Tahun 1945-1949*. Makassar: de la macca, hlm.111-112.

²⁰² Penembakan yang dilakukan oleh pasukan Westerling terhadap rakyat dan para pejuang tersebut, dilakukan mulai dari jam 07.00 pagi dan berakhir pada sore hari sekitar jam 17.00. Pada malam hari diadakan penguburan oleh kerabat mereka yang masih hidup atau rakyat yang paksa oleh pasukan Belanda (Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar...*, hlm. 196).

rakyat biasa yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu, tetapi juga anggota pejuang baik dari organisasi kelaskaran KRIS-Muda dan GAPRI 5.3.1 maupun dari pasukan ekspedisi TRIPS dan ALRI serta pasukan pejuang dari Kalimantan. Pada hari-hari berikutnya, pasukan Belanda melakukan penangkapan dan pembunuhan-pembunuhan terhadap anggota para pejuang dan sebagainya. Pimpinan dan anggota para pejuang yang tidak terbunuh ditangkap dan dipenjarakan di berbagai tempat, seperti penjara Majene, Parepare, dan Makassar.

Setelah peristiwa penembakan massal yang dilakukan oleh pasukan Westerling di Galung Lombok, para pejuang yang dipimpin oleh Hammad Saleh terus melakukan perlawanan di daerah pedalaman Balanipa. Ia memecah laskar barisan berani mati dalam beberapa kelompok yang masing-masing terdiri atas sekitar 20 orang pejuang dengan kekuatan lima hingga enam pucuk senjata. Mereka terus melakukan serangan secara sporadis terhadap kedudukan *NICA/KNIL*. Sebagai contoh misalnya, mereka melakukan serangan kilat terhadap kedudukan *NICA/KNIL* di beberapa tempat pada bulan Maret 1947, yaitu antara lain di Simulluk dan Tu'bi (13 Maret) di Landi (21 Maret), di Passokkorang (22 Maret), dan Buttu Sumbajo, Batubatu, Puqawang, dan Labora (24 Maret 1947). Namun dalam penyerangan terhadap kedudukan *NICA/KNIL* di Panggala pada 18 Juni 1947, pasukan yang dipimpin oleh Hammad Saleh mengalami kerugian yang cukup besar, karena tiga anggota pasukannya gugur dan dua pucuk senjata *Karaben* jatuh ke tangan pihak musuh. Sejak itu, tentara *KNIL* dan Polisi *NICA* yang dibantu *pasosok* (polisi kampung) semakin meningkatkan operasi-operasi penangkapan terhadap Hammad Saleh dan para pejuang lainnya. Dari operasi-operasi yang dilakukan oleh aparat Belanda itu, mereka akhirnya berhasil

menangkap Hammad Saleh setelah mengalami kekalahan pada pertempuran sengit di Buttu Kaiyang pada 24 Juli 1947.²⁰³

²⁰³ Arsip H.M. Amin Daud, No. 15. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan; Mandra, A. Muis, dkk., 2002. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Mandar*. Majene: Pemda Tk. II Majene, hlm. 155. Penangkapan terhadap Hammad Saleh tersebut, tidak berarti bahwa perlawanan terhadap NICA telah berakhir. Sebab sisa-sisa pasukan Hammad Saleh dan para pemuda pejuang lainnya tetap meneruskan perlawanan terhadap NICA dan kaki tangannya. Bahkan setiap gerakan perlawanan dari pemuda pejuang, dianggap masih berhubungan dengan Hammad Saleh yang sedang ditawan dalam penjara Majene. Oleh Karena itu, Hammad Saleh kemudian dipindahkan dari penjara Majene ke penjara Hogepad Makassar. Hal ini dimaksudkan oleh NICA agar para pejuang yang sedang melakukan gerakan perlawanan tidak dapat berhubungan dengan Hammad Saleh untuk kepentingan gerakan bawah tanah atau agar tidak dapat dibebaskan dari penjara oleh teman sepejuangnya. Sebelum dipindahkan ke penjara Hogepad Makassar, ia terlebih dahulu dipindahkan ke penjara Parepare untuk diadili yang kemudian memutuskan hukuman mati terhadap dirinya. Sambil pelaksanaan hukuman mati, Hammad Saleh dipindahkan ke penjara Hogepad Makassar. Karena keterlibatannya dalam berbagai aksi pembebasan para tawanan di penjara Hogepad Makassar, maka dibuang ke Jawa dan ditempatkan dalam penjara Cipinan. Namun sebelum pelaksanaan hukuman mati terhadap Hammad Saleh, terjadilah penyerahan kedaulatan sehingga ia dan tawanan lainnya dibebaskan dan kembali menetap di Desa Alu.



KESIMPULAN

Hammad Saleh merupakan salah seorang tokoh pemimpin dan pejuang yang bukan hanya berperan penting dalam perlawanan menentang pemerintah militer Jepang, tetapi juga dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan cucu dari *mara'dia* Alu yang dilahirkan di Alu, Balanipa pada 1915. Ibunya bernama Balisa, seorang putri bangsawan (*todiang laiyana*) dari Kerajaan Balanipa. Sementara ayahnya bernama Palindungi, putra *mara'dia* Alu. Kedua orang tuanya merupakan bangsawan *todiang laiyana* yang berstatus atau berkedudukan sebagai pewaris tahta (*ana' pattola payung*). Bahkan ayahnya yang berkedudukan sebagai *ana' pattola payung* Alu, bukan hanya merupakan pewaris atas tahta Kerajaan Alu, tetapi juga dapat diangkat menjadi *mara'dia* di Kerajaan Balanipa dan kerajaan-kerajaan lainnya di daerah Mandar. Oleh karena dalam tradisi suksesi kepemimpinan di Kerajaan Balanipa, bahwa "*Naiya anak pattola payungna Alu, malai diala menri maradia di*

Balanipa" (putra mahkota Kerajaan Alu dapat diangkat sebagai *mara'dia* atau raja di Kerajaan Baranipa). Itulah sebabnya *ana' pattola payung* Alu dapat menduduki jabatan *maradia* pada seluruh kerajaan anggota persekutuan *Pitu Babanna Binanga* (tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir pantai). Ketuju kerajaan itu adalah Kerajaan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang.

Latar belakang keluarga Hammad Saleh sebagai keturunan dari *maradia* Alu penting diketahui. Sebab, selain turut berperan dalam membentuk karakter dan sikap Hammad Saleh, sejumlah keturunan dari *maradia* Alu juga telah tercatat dalam sejarah sebagai penentang yang gigih terhadap pemerintah kolonial Belanda. Salah satu di antaranya adalah I Calo Ammana I Wewang. Putra *Mara'dia* Alu I Gaang ini, yang dalam perkembangannya bukan hanya diangkat menjadi *mara'dia* Alu – menggantikan ayahnya (I Gaang), tetapi ia juga kemudian diangkat menjadi *mara'dia malolo* (panglima perang) Kerajaan Balanipa. Itulah sebabnya ia diangkat menjadi salah seorang pimpinan pasukan Mandar dalam perlawanan terhadap pendudukan militer Belanda pada 1905-1907. Namun pada penghujung perlawanan itu, I Calo Ammana I Wewang berhasil ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Tanjung Pandang, Pulau Belitung pada 1908. Selain itu, putra *Mara'dia* Alu I Gaang lainnya yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa menentang kekuasaan kolonial Belanda adalah Kaco' Puang Ammana I Pattolawali. Ia merupakan *mara'dia malolo* (panglima perang) Kerajaan Alu yang juga merangkap sebagai *mara'dia malolo* Kerajaan Banggae dan Pamboang. Dalam perjuangannya menentang pemerintah kolonial Belanda, ia gugur bersama 17 orang laskar Mandar dalam pertempuran mati-matian di Benteng Galung Adolang pada 26

Juni 1906. Oleh karena itu, kedua tokoh pejuang yang memegang peranan penting dalam perjuangan menentang penjajahan ini, tidak dapat diabaikan di dalam memahami dinamika sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam perlawanan menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di wilayah Mandar pada awal abad ke-20, dan dalam memahami perjuangan Hammad Saleh menentang Jepang dan Belanda.

Demikian pula kedudukan Alu dalam konteks ini, tidak dapat diabaikan karena mempunyai peran yang amat penting dalam percaturan politik Kerajaan Balanipa. Bahkan Kerajaan Alu dikisahkan sebagai suatu kerajaan yang lebih tua atau lebih dahulu terbentuk daripada Balanipa, sebagaimana yang disebutkan dalam *Iontarak* bahwa "*Kaka tuoi Alu, kaka oroi Balanipa*" (Alu lebih tua dalam kekerabatan, sedangkan Balanipa lebih tua dalam kedudukan atau jabatan). Namun dalam perkembangannya, kerajaan itu kemudian bergabung secara sukarela atau menjadi bagian dari Kerajaan Balanipa pada masa kekuasaan *Mara'dia* Balanipa Tomepayun. Wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa pada umumnya dapat dibedakan atas daerah inti kerajaan dan wilayah di luar daerah inti kerajaan. Daerah inti kerajaan terdiri atas *Appe Banua Kaiyang* (empat negeri besar) yang meliputi Nepo, Samasundu, Mosso, dan Todatodang; *Annang Banua Manassa* (enam negeri otonom) terdiri atas Limboro, Biring Lembang, Lambe, Lakka, Luyo, dan Tenggeleng; serta daerah khusus atau pusat kerajaan. Sementara wilayah di luar daerah inti terdiri atas tiga negeri atau kerajaan otonom (*Tallu Bocco*) yang meliputi Kerajaan Alu, Taramanu, dan Tu'bi; *Tallumbanua* (tiga daerah otonom) terdiri atas Campalagiang (Tomadio), Mapili, dan Tapango; serta delapan daerah taklukan (*Palili Arruwa*) yang meliputi Sabura, Daala, Lenggo, Batu, Rea, Bungin, Belua (Paku),

dan Tabone. Dalam konteks inilah kedudukan Alu sebagai salah satu kerajaan otonom di Balanipa tidak dapat diabaikan dalam memahami perjuangan Hammad Saleh menentang penjajahan, sebab daerah ini bukan hanya menjadi pusat perlawanan terhadap kekuasaan Jepang, tetapi juga menjadi salah satu basis perlawanan terhadap *NICA* di wilayah Mandar.

Alu sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat perlawanan terhadap kekuasaan Jepang di daerah Mandar, menunjukkan bahwa rakyat di daerah ini senantiasa bergolak atau selalu mengambil peran dalam perjuangan menentang penjajahan (Jepang dan Belanda). Pada masa kekuasaan militer Jepang di jazirah selatan Sulawesi, hanya rakyat di dua daerah (Alu dan Unra) yang tercatat berani melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan aparat pemerintah militer Jepang. Padahal kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah militer Jepang di wilayah ini adalah sama, yaitu melakukan tindakan represif terhadap rakyat dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terutama di dalam pengumpulan bahan makanan, sehingga terjadi kekurangan pangan yang mengakibatkan berbagai bentuk penderitaan bagi rakyat. Namun pada umumnya mereka hanya pasrah pada keadaan. Berbeda halnya dengan rakyat di daerah Alu dan Unra yang justru melakukan pembangkangan (resistensi) dan bahkan tindakan perlawanan terhadap aparat Jepang. Tampilnya rakyat Alu tersebut, tentu tidak terlepas dari peran Hammad Saleh sebagai seorang pemimpin yang sekaligus menjadi motor penggerak perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat Jepang. Sebab tidak banyak pemimpin ketika itu yang berani menyatakan secara terbuka sikap perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah militer Jepang. Itulah sebabnya perlawanan rakyat Alu di bawah pimpinan Hammad Saleh patut

mendapat perhatian, oleh karena bukan hanya merupakan suatu bukti perlawanan terhadap kekuasaan Jepang, tetapi juga menunjukkan dinamika semangat perjuangan rakyat di daerah ini yang senantiasa berkobar dalam menentang penjajahan. Oleh karena itu, perjuangan Hammad Saleh dalam memimpin rakyat Alu menentang kekuasaan militer Jepang tidak dapat diabaikan, baik di dalam memahami sejarah perjuangan menentang penjajahan maupun dalam memahami dinamika semangat dan nilai perjuangan rakyat di daerah ini dalam melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Selain itu, yang tidak kalah menariknya untuk dikemukakan pula adalah sikap tegas Hammad Saleh yang tidak mau patuh dan menolak kerjasama dengan kekuasaan militer Jepang. Sebab hal ini bukan hanya mengancam kedudukannya sebagai *ana' pattola payung* Alu, tetapi sikap tegas itu juga mempunyai konsekuensi terhadap kebebasan dan keselamatan jiwanya. Hammad Saleh tampaknya tidak memikirkan besar kecilnya resiko dari suatu perjuangan menentangan kekuasaan militer Jepang. Bukan hanya kedudukan dan harta benda yang bersedia dikorbankan, tetapi juga kebebasan dan keselamatan jiwanya yang paling berharga di dunia ini bersedia untuk dikorbankan. Fakta tentang sikap tegasnya itu adalah Hammad Saleh rela masuk hutan, naik turun gunung, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang tak terkirakan beratnya dalam mengobarkan perlawanan dari pada hidup senang dan bekerjasama dengan kekuasaan Jepang yang senantiasa menindak rakyatnya. Padahal jika saja ia mau berpaling dari sikap tegasnya melawan Jepang atau bersedia bekerjasama dengan penguasa Jepang, tentulah ia tidak akan dikejar-kejar yang senantiasa mengancam keselamatan jiwanya dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan diangkat menjadi

guncho (kepala distrik) Alu atau komandan *jumpro* (polisi Jepang). Inilah keunikan Hammad Saleh jika dibandingkan dengan para pemimpin lainnya, karena kedudukan dan kekuasaan serta kebebasan dan keselamatan jiwa bagi orang lain mungkin sukar untuk dikorbankan dalam menjatuhkan pilihan menentang kekuasaan Jepang. Namun bagi Hammad Saleh, jabatan, kedudukan, kekuasaan, kebebasan, dan keselamatan jiwanya bukanlah kendala baginya untuk tetap konsekuen pada sikap dan prinsip perjuangannya hingga akhir kekuasaan militer Jepang.

Sikap dan prinsip satu kata dengan perbuatan serta peranan aktifnya dalam perjuangan menentang kekuasaan militer Jepang, yang mendorong Ibu Andi Depu memilih dan mengangkat Hammad Saleh menjadi komandan pertempuran laskar KRIS Muda Mandar. Demikian pula ketika GAPRI 5.3.1 (Gabungan Pemberontak Rakyat Indonesia dengan kode 5.3.1) dibentuk, Hammad Saleh juga diangkat menjadi salah seorang komandan tempur pada organisasi kelaskaran tersebut. Kedua organisasi kelaskaran ini, bukan hanya bertujuan menegakkan, membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga dimaksudkan menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah Mandar pada khususnya. Itulah sebabnya Hammad Saleh kembali tampil ke depan dan menyatakan sikap serta kebulatan tekadnya mendukung setiap langkah organisasi kelaskaran KRIS Muda Mandar dan GAPRI. Pernyataan sikap dan kebulatan tekad itu, bukan hanya telah memotivasi rakyat Mandar mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga telah meningkatkan peran serta rakyat yang ditandai dengan kesediaan mereka untuk berkorban dan secara sukarela menjadi anggota dari organisasi

kelaskaran yang dibentuk di Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa Hammad Saleh mempunyai peran yang tidak kecil artinya, baik dalam perjuangan menegakkan, membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maupun dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha *NICA*.

Namun dukungan penuh rakyat dan perlawanan yang ditampilkan melalui organisasi kelaskaran, tampaknya tidak memudarkan keinginan *NICA* sehingga Afdeling Mandar menjadi salah satu basis perlawanan yang gigih terhadap *NICA* di jazirah selatan Sulawesi.²⁰⁴ Itulah sebabnya berbagai peristiwa, baik berupa aksi-aksi sabotase, penghadangan, dan penyergapan maupun kontak senjata atau pertempuran antara para pejuang yang dipimpin oleh Hammad Saleh atau pemimpin lainnya dengan aparat *NICA* senantiasa terjadi di daerah ini. Bahkan jika dicermati lebih jauh serangkaian aksi perlawanan itu, maka dapat dikatakan bahwa betapa besar dan pentingnya peran yang dilakukan Hammad Saleh serta gigihnya perlawanan para pejuang di daerah Mandar. Kenyataan inilah yang mendasari pemerintah kolonial Belanda mengumumkan daerah ini sebagai salah satu afdeling yang dinyatakan dalam keadaan darurat dan perang (*staat van oorlog en beleg*, disingkat *SOB*) pada 11 Desember 1946. Pernyataan *SOB* yang meliputi wilayah Afdeling Makassar, Parepare, Bantaeng, dan Mandar itu, kemudian disusul pula dengan "perintah harian" (*dag order*) dari Letjen S. Spoor kepada seluruh jajaran militer Belanda untuk melaksanakan aksi militer di daerah-daerah tersebut. Aksi militer yang dilakukan itu mengakibatkan terjadinya peristiwa penting di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang kemudian dikenal dengan "korban empat puluh ribu jiwa".

²⁰⁴ Basis perlawanan terhadap *NICA* lainnya adalah Afdeling Makassar yang berpusat di Polombangkeng, Afdeling Parepare yang berpusat di Suppa, Afdeling Bantaeng, dan Afdeling Luwu.

Meskipun demikian, para pejuang di bawah pimpinan Hammad Saleh tetap meneruskan perlawanan terhadap *NICA* di daerah Mandar. Ia tidak hanya memecah laskarnya dalam beberapa kelompok untuk mengalihkan konsentrasi musuh, tetapi ia juga terus melakukan serangan secara sporadis terhadap kedudukan *NICA*. Namun karena semakin meningkatnya operasi-operasi militer yang dilakukan oleh aparat *NICA* (tentara *KNIL* dan polisi *NICA*) yang dibantu para *pasosok* (polisi kampung), Hammad Saleh bersama para pejuang lainnya satu demi satu berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh musuh. Oleh karena itu, perjuangan Hammad Saleh dalam menentang *NICA* tidak dapat diabaikan di dalam memahami dinamika perlawanan rakyat Indonesia secara menyeluruh, sebab merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam menentang penjajahan. Perjuangan rakyat Indonesia secara menyeluruh, termasuk rakyat di daerah Mandar di bawah pimpinan Hammad Saleh menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia, bukan hanya merupakan keinginan dan peran dari para pemimpin bangsa di pusat kekuasaan, melainkan juga keinginan dan peran dari seluruh rakyat Indonesia termasuk di daerah Mandar. Sebab, jika rakyat Indonesia tidak bangkit berjuang dengan jiwa kesatria dan semangat nasionalisme Indonesia, maka niscaya kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia dapat menjadi kenyataan.

Selain berperan penting dalam perjuangan menentang kehadiran dan usaha *NICA*, Hammad Saleh juga menunjukkan sikap dan prinsip perjuangan yang tetap konsekuen terhadap Republik Indonesia. Sikap tegasnya yang menolak kerjasama dengan *NICA* merupakan suatu bukti bahwa ia senantiasa “berdiri

di belakang republik” atau tidak pernah goyah kesetiaannya terhadap Republik Indonesia. Ancaman-ancaman apapun atau bujukan dan rayuan semanis apapun yang datang silih berganti kepadanya, tidak ada yang mampu menggoyahkan sikap dan prinsip perjuangannya dalam membela republik. Ia juga tidak pernah memikirkan konsekuensi dari suatu perjuangan melawan *NICA* (Belanda). Beliau pun bersedia mengorbankan segala-galanya demi perjuangan untuk tetap setia kepada republik. Bukan hanya kedudukan dan harta benda yang bersedia dikorbankan, tetapi kebebasan dan keselamatan jiwanya pun yang paling berharga di dunia ini bersedia dikorbankan dalam mempertahankan prinsip perjuangannya. Itulah sebabnya ia rela menanggung segala resiko dari perjuangan menentang Belanda ketimbang menjadi penghianat atau bekerjasama dengan *NICA*. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh *NICA* terhadap Hammad Saleh karena setia kepada republik merupakan suatu bukti kepada kita bahwa betapa besar rasa cintanya terhadap bangsa dan tanah airnya.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perjuangan Hammad Saleh dalam menentang kekuasaan militer Jepang, bukan hanya karena tindak kesewenang-wenangan aparat Jepang yang terhadap rakyat terutama dalam pengumpulan bahan makanan untuk menunjang perang Jepang melawan Sekutu. Akan tetapi juga karena kekecewaan Hammad Saleh terhadap pemerintah militer Jepang yang pada awal kedatangannya bersikap baik dan berhasil mengusir pemerintah kolonial Belanda, namun dalam perkembangannya berubah menjadi penjajah yang lebih kejam daripada Belanda. Penyerahan paksa sebagian besar hasil produksi pertanian rakyat menyebabkan terjadinya kekurangan pangan,

kelaparan atau penyakit busung lapar, dan semakin langkanya kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, rakyat juga dipaksa untuk mengerjakan lahan-lahan pertanian pemerintah, perkebunan kapas, dan membuat benteng-benteng pertahanan, serta paksaan untuk menjadi *rumusha*. Dominasi politik pemerintah militer Jepang juga menyebabkan terdesaknya lembaga politik tradisional sehingga aspirasi rakyat tersumbat. Bukan hanya itu karena aparat-aparat Jepang terkadang mengabaikan norma-norma dan tatanan kehidupan masyarakat. Akumulasi dari kesemua itu menjadi faktor penyebab timbulnya sikap antipati rakyat terhadap Jepang yang kemudian mengakibatkan terjadinya gerakan perlawanan di bawah pimpinan Hammad Saleh Puangna I Sudding.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hammad Saleh semakin menunjukkan diri sebagai seorang patriotik, terutama karena perjuangannya menentang kehadiran dan usaha *NICA* yang hendak menghancurkan Republik Indonesia. Sebab *NICA* bukan hanya berupaya memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga hendak memecah belah persatuan dan negara Republik Indonesia. Hal inilah yang mendasari perjuangan Hammad Saleh menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perjuangannya bukanlah didasari oleh kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan pula merupakan angan-angan untuk mendapatkan kedudukan yang strategis dalam struktur kekuasaan atau impian untuk memperoleh kekayaan jika kemerdekaan telah terwujud. Apa yang diperjuangkan dengan mengorbankan segala-galanya adalah untuk kehormatan dan martabat bangsa yang telah digerogeti oleh kolonial Belanda sekian lama. Namun yang tak kalah pentingnya adalah untuk masa depan yang lebih baik dalam kehi-

dupan berbangsa dan bernegara serta untuk mengangkat derajat bangsa setingkat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah sebabnya Hammad Saleh setelah mengetahui dengan pasti bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, maka ia bukan hanya tampil ke depan menunjukkan dukungan dan sikap tegasnya “berdiri di belakang” Republik Indonesia, tetapi ia juga mengambil peran yang amat penting dalam perlawanan menentang kolonial Belanda dan terlibat secara langsung dalam sejumlah pertempuran dengan aparat *NICA* yang hendak memecah belah persatuan bangsa dan menghancurkan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dkk., 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Abdullah, Taufik, 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abidin, A.Z., 1980. "La Ma'dukelleng Menggalang Persatuan Sulawesi Selatan Mengusir VOC", dalam *Prisma*, No. 8.
- Agung, Ide Anak Agung Gde. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amier, Sjarifuddin. 1989. *Perjanjian Antarkerajaan Menurut Lontarak: Mengungkap Salah Satu Aspek Hukum Internasional Adat Abad XV-XVIII di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Disertasi Doktor Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Amir, Muhammad. 1990. *Pemberontakan Rakyat Unra Terhadap Jepang Pada 1943*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Amir, Muhammad, 2008. *Peranan Andi Abdullah Bau Masepe Dalam Perjuangan Mempertahankan Proklamasi*

- Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sulawesi Selatan (1945-1947)*. Makassar: Laporan Penelitian, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.
- Amir, Muhammad, dkk. 2003. *Kelaskaran di Sulawesi Selatan*. Makassar: Laporan Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.
- Amir, Muhammad. 2010. *Kelaskaran di Mandar – Sulawesi Barat; Kajian Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan*. Makassar: Dian Istana.
- Amir, Muhammad. 2011. Maraqdia Andi Depu: Wanita Pejuang Dari Mandar, dalam *Tiga Srikandi Pejuang Dari Mandar – Sulawesi Selatan*. Makassar: Dian Istana.
- Amir, Muhammad dan Sahajuddin. 2011. *Konfederasi Mandar: Kajian Tentang Terbentuknya Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Barat*. Makassar: de la macca.
- Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir. 1993. *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Arsip Negara Indonesia Timur (NIT), No. 109. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 110. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip Negara Indonesia Timur (NIT), No. 111-119 (berbagai dokumen tentang laporan politik). Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 139. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 140, *Inlichtingen Rapport*. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 140, Keterangan Noehoeng kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene. NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 21/SPN ddo. 30 Juli 1947. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 140, Pengakuan Hammad Saleh kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene. NEFIS Buiten-kantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 22/SPN ddo. 30 Juli 1947. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 140, Keterangan Angga kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene. NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 25/SPN ddo. 30 Juli 1947. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 140, Keterangan Atjo Potjer kepada C. Pastor sebagai *De Ondervraging Officier Majene. NEFIS Buitenkantoor Makassar, Geheim, Inlichtingenrapport* No. 28/SPN ddo. 4 Agustus 1947. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 140. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 162. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 166. Laporan Asisten Residen Mandar, L.L.A. Maurenbrecher (22 Agustus 1946) Tentang Pembunuhan Controleur Polewali G. Monsees. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Arsip H.M. Amin Daud, No. 15. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Asdy, Ahmad. 2003. *Mandar Dalam Kenangan Tentang Latar Belakang Keberadaan Arajang Balanipa Ke-52*. Makassar: Yayasan Maha Putra Mandar.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, 2005. *Siballiparri: Gender Masyarakat Mandar*. Makassar: PT. Graha Media Celebes.
- Chabot, H.Th, 1950. *Verwantschap, Standen Sexe in Zuid-Celebes*. Groningen-Jakarta: J.B. Walters Uitgeversmaatschappij N.V.
- Daeng Patunru, 1983, *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Djarwadi, Radik, dkk. 1972. *Sejarah Corps Hasanuddin, Prajurit Tempur dan Pembangunan*. Makassar: Corhas.
- Djud Pantje, Haji Maemuna. 1982. Sejarah Kelaskaran GAPRI 5.3.1. (Gabungan Pemberontak Rakyat Indonesia, Kode 5.3.1.). Makalah pada Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing, yang diselenggarakan di Makassar.
- Errington, Shelly, 1977. "Siri', Darah dan Kekuasaan Politik di Dalam Kerajaan Luwu Zaman Dahulu", dalam *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*, No. 1, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Friedericy, H.J., 1933. "De Standen bij de Boeginezen en Makassaren", dalam *BKI (Bijdragen tot de Taal, Landen en Volkenkunde van Nederlandsche-Indie)*, No. 90.
- Gilberr J. Garraghan, 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordam University.
- Gonggong, Anhar, 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pem-berontak*. Yogyakarta: Ombak, Edisi Revisi.

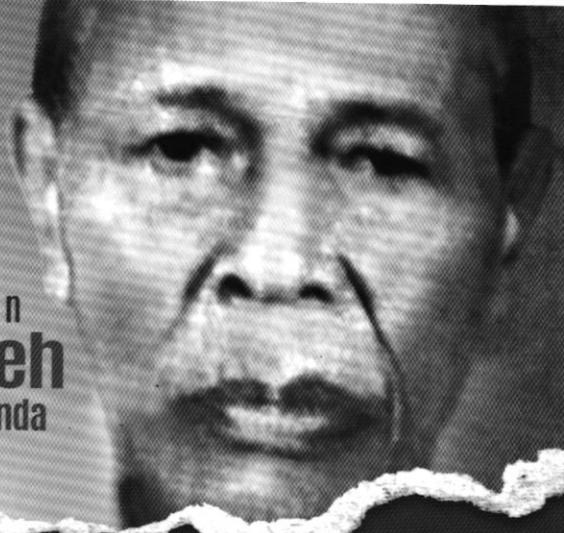
- Gottschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Harvey, Barbara S. 1974. *Tradition, Islam and Rebellion in South Sulawesi 1959-1965*. Michigan: Cornell Unibversity.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti.
- Ijzeeref, Willem. 1984. *De Zuid-Celebes Affaire*. Dieren: De Bataafsche Leew.
- Jong, L.D. 1987. *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Kesait Blanc.
- Junaeda, St. 2001. *Pemberontakan Petani Allu 1945, Studi Tentang Gerakan Sosial*. Makassar: Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Junaeda, ST., dkk. 2013. *Nasionalisme Masyarakat Mandar, Sejarah Kelaskaran GAPRI 5.3.1 di Mandar Tahun 1945-1949*. Makassar: de la macca.
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Unhas dengan Bappeda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk., 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Kila, Syahrir. 1993. *Pemberontakan Rakyat Petani Terhadap Pendudukan Militer Jepang di Unra, Bone Tahun 1943*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan.

- Leyds, W.J. 1940. *Memori van Overgave, Assistant Resident Mandar*. Majene: 9 Februari 1940. Diterjemahkan oleh Hanoch Luhkay dan B.E. Tuanakotta. Makassar: Yayasan Kaitupa, 2006.
- Lembaran Negara (*Staatsblad*) No. 139, Tahun 1946.
- Lontara Patturiyoloangnga ri tu Gowaya*, alenia 75. Ujung Pandang: Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Mallinckrodt, J., 1933. Zuid-Celebes Serie P. No. 77, Gegevens over Mandar en Andere Landschappen van Zuid-Celebes, dalam *KITLV (Koninklijk Instituut voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie) Adatrechtbundels XXXVI*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Mandra, A.Muis, dkk., 1986. *Transliterasi dan Terjemahan Lontara Mandar*. Jakarta: Depdikbud.
- Mandra, A. Muis, 1987. *Beberapa Perjanjian dan Hukum Tradisi Mandar*. Majene: Yayasan Saq Adawang.
- Mandra, A. Muis, dkk, 1991. *Transliterasi dan Terjemahan Lontar Mandar*. Jakarta: Depdikbud.
- Mandra, A. Muis, dkk., 2002. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Mandar*. Majene: Pemda Tk. II Majene.
- Mattulada, 1985. *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Medeelingen Betreffende Eenige Mandharsche Landschappen, 1909, dalam "*Bijdragen Tot De Taal-, Land-En Volkenkunde van Nederlandsche - Indie*", 62: 649-746.
- Mukhlis, 1971. *Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa Jaman Pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669)*.

Yogyakarta: Thesis (belum terbit) Universitas Gadjah Mada.

- Nasution. A.H. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid II*. Bandung: Angkasa.
- Nooteboom C. 1912, Kerajaan Balanipa-Mandar (terj) "*Nota van toelichting betreffende het Lansschap Balangnipa Tajd*. LIV, hlm. 503-535. Ujung Pandang: BKSNT.
- Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu.
- Pabittei, Aminah. 1991. *Hajjah Adi Depu, Maraddia Balanipa*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- PaEni, Mukhlis, 1986. "Landasan Kultur Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar", dalam *Dinamika Sosial Bugis Makassar*. Ujung Pandang: PLPIIS.
- PaEni, Mukhlis, dkk., 2002. *Batara Gowa, Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemda, 1991., *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L. 2000. "Militer dan Budaya Politik Indonesia", dalam *Dunia Militer di Indonesia, Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Makalah pada "Seminar dan Temu Tokoh" yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, yang berlangsung di Makassar pada tanggal 27 Juni 2002.
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.

- Poelinggomag, Edward L. dkk., 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pringgodigdo, A.K. 1984. "Sejarah Pembuatan UUD RI Tahun 1945", dalam J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, Disertasi Doktor, 1984.
- Rahman, Darmawan Mas'ud, 1987. "Sistem Kekerabatan dan Politik di Balanipa, Suatu Cermin Hubungan Balanipa dan Gowa (Makassar) di Abad XVI – XIX Masehi". Makalah pada Seminar Mahasiswa Sejarah se-Sulawesi, yang diselenggarakan di Ujung Pandang, pada tanggal 28-30 Desember 1987.
- Rahman, 1988. *Puang dan Daeng: Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar*. Ujung Pandang: Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Rasyid, Darwas, 1996. *Peristiwa Perlawanan Rakyat Allu Pada Masa Pendudukan Militer Jepang di Daerah Mandar Tahun 1945*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan.
- Ricklefs, M. C. 1994. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rukka, Muh. Yusuf. 1989. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Daerah Balanipa Mandar*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Unhas.
- Sagimun M.D., 1961. *Perang Sulawesi Selatan*. Jakarta: Pantia Museum Sejarah Tugu Nasional.
- Sagimun, M.D. 1985. *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Saharuddin. 1977. "Susunan dan Sistem Pemerintahan Balanipa Dahulu Dalam Hubungannya Dengan Kebudayaan Mandar", dalam *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.



Perjuangan
Hammad Saleh

Menentang Jepang & Belanda

Di Mandar 1942-1947

Hammad Saleh merupakan salah seorang tokoh pemimpin dan pejuang yang bukan hanya berperan penting dalam perlawanan menentang pemerintah militer Jepang, tetapi juga dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan cucu dari *marad'ia* Alu yang dilahirkan di Alu, Balanipa pada 1915.

Latar belakang keluarga Hammad Saleh sebagai keturunan dari *marad'ia* Alu penting diketahui. Sebab, selain turut berperan dalam membentuk karakter dan sikap Hammad Saleh, sejumlah keturunan dari *maradia* Alu juga telah tercatat dalam sejarah sebagai penentang yang gigih melawan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu di antaranya adalah I Calo Ammana I Wewang. Putra *Mara'dia* Alu I Gaang ini, yang dalam perkembangannya bukan hanya diangkat menjadi *marad'ia* Alu – menggantikan ayahnya (I Gaang), tetapi ia juga kemudian diangkat menjadi *marad'ia* malolo (panglima perang) Kerajaan Balanipa.

Hammad Saleh setelah mengetahui dengan pasti bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, maka ia bukan hanya tampil ke depan menunjukkan dukungan dan sikap tegasnya "berdiri di belakang" Republik Indonesia, tetapi ia juga mengambil peran yang amat penting dalam perlawanan menentang kolonial Belanda dan terlibat secara langsung dalam sejumlah pertempuran dengan aparat NICA yang hendak memecah belah persatuan bangsa dan menghancurkan Republik Indonesia.

ISBN: 978-602-9057-87-4



9 786029 105787 4

ARUS TIMUR
Enak Dibaca Dan Berkah!

Wanita
RUMAH BAKA

KELOMPOK PUSTAKA REFLEKSI

Jln. Tamangapa Raya III

Perum. Tritura A5 No.10 Makassar 90235

Telp. 0411-494086 – 5047064.

Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172

Email: arusbook@yahoo.co.id

PER
BPN